



# SELAYANG PANDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2013/2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
2015



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

**SELAYANG PANDANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2013/2014**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional  
Tahun 2013/2014. Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan  
Pelayanan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan  
Kebudayaan, Kemdikbud, 2015

xiv, 138 hal

ISSN 1829-7307

### TIM PENYUSUN:

Ketua:

Siti Sofiah

Penulis:

1. Lexy Torar
2. Wahono
3. Bambang S.J.

Penyunting:

Sudarwati

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menerbitkan buku yang berisi data dan informasi pendidikan dalam bentuk buku “Selayang Pandang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Tahun 2013/2014”. Buku ini disebut tahun 2013/2014 dengan tujuan memberikan data dan informasi tentang pendidikan pada tahun tersebut. Buku ini telah diterbitkan sejak tahun 2002 dan telah mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan keadaan pendidikan.

Materi di dalam buku ini meliputi lima bab, yaitu 1) keadaan umum Indonesia, 2) pendidikan nasional, 3) pendidikan formal dan nonformal, 4) pencapaian pendidikan formal dan nonformal, dan 5) pengelolaan pendidikan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah Undang-undang RI, Undang-undang tentang Pendidikan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Kurikulum Pendidikan, Buku Statistik Pendidikan, Buku Statistik Indonesia, Buku Statistik Angkatan Kerja, Laporan UNDP, Buku *Analysis of the World Education Indicators*, dan buku lainnya yang relevan dengan pendidikan baik yang diterbitkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan atau terbitan lainnya serta situs tentang pendidikan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun materi buku ini sampai diterbitkannya buku ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan penerbitan buku ini di waktu mendatang.

Jakarta, Desember 2015

Kepala,



Dr. Bastari  
NIP 196607301990011001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Secara astronomis, terletak antara garis-garis 6<sup>o</sup>08' lintang utara, 11<sup>o</sup>15' lintang selatan, dan antara 94<sup>o</sup>45'-141<sup>o</sup>05' bujur timur. Sebagai negara kepulauan, luas wilayah mencapai 5.193,3 ribu km<sup>2</sup>. Dari luas tersebut, sebesar 1.904,6 ribu km<sup>2</sup> merupakan daratan yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang katulistiwa (ekuator) dengan tiga perempat bagiannya merupakan lautan. Rangkaian gugusan pulau ini sering disebut sebagai “Untaian Zamrud Katulistiwa”.

Pada UU Nomor 20/2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan secara demokratis dan berkeadilan, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, pendidikan memberi keteladanan, pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung, dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat.

Pendidikan dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di sisi lain penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jenis-jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Adapun jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian

Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk mewujudkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan, seperti yang telah disebutkan, dengan bantuan unit-unit yang ada. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
- k. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter;
- l. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan;
- n. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
- q. Pusat Pengembangan Perfilman.

Terkait dengan anggaran pendidikan, anggaran pendidikan terdiri dari anggaran yang berupa rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Semua anggaran berupa rupiah murni berasal dari dana pemerintah sedangkan pinjaman luar negeri bersumber dari dana bantuan internasional (*World Bank/WB, Asian Development Bank/ADB, OECF, IDB, donor-donor bilateral/multilateral*).

Anggaran yang bersumber dari pemerintah dan bantuan internasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Selanjutnya, oleh Kemkeu menyalurkan ke kementerian yang menangani

pendidikan, yaitu Kemdikbud dan Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, Kemkeu juga langsung menyalurkan anggaran pendidikan ke pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui kantor-kantor wilayah anggaran (kanwil anggaran) di provinsi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Mengenai dana masyarakat, pada umumnya disalurkan langsung oleh masyarakat ke satuan-satuan pendidikan.

Pada jenjang SD dan SMP, jumlah sekolah negeri lebih banyak dari pada sekolah swasta, sedangkan untuk jenjang TK, SMA, SMK, dan SLB lebih banyak sekolah swasta. Walaupun jumlah sekolah di SMA lebih banyak yang berstatus swasta, tetapi jumlah siswa baru di SMA negeri lebih banyak daripada sekolah swasta, demikian juga dengan jumlah siswa, lulusan dan guru. Pada jenjang SLB, jenis ketunaan grahita memiliki siswa baru dan siswa paling banyak dibandingkan dengan jenis ketunaan lainnya. Rasio siswa per guru antara sekolah negeri dan swasta tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan kecuali pada jenjang SMK. Rasio siswa per guru di SMK swasta mencapai 28 yang berarti bahwa di SMK swasta kekurangan guru. Pada jenjang TK, SD, SMP dan SMA jumlah guru perempuan lebih banyak daripada laki-laki tetapi pada jenjang SMK justru sebaliknya. Pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK guru yang berijasah  $\geq$  S-1 lebih banyak daripada yang berijasah  $<$  S-1, tetapi untuk TK lebih banyak yang masih berijasah  $<$  S-1. APK PAUD mencapai 65,16%, SD/MI mencapai 110,68%, SMP/MTs mencapai 96,91%, dan SM/MA mencapai 74,63%. APM SD/MI mencapai 93,30%, SMP/MTs mencapai 78,83% sedangkan SM/MA mencapai 55,88%. APM usia 4-6 tahun mencapai 31,16%, APM usia 7-12 tahun mencapai 93,30%, APM usia 13-15 tahun mencapai 76,55%, dan APM usia 16-18 tahun mencapai 55,88%.

Jumlah lembaga/kelompok belajar di pendidikan nonformal cenderung fluktuatif kecuali Taman Penitipan Anak (TPA) dan kursus yang terus meningkat demikian juga untuk jumlah peserta didik juga mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah peserta didik terbesar adalah PAUD yang mencapai 6,90 juta. Lulusan di pendidikan nonformal berkembang sesuai dengan jumlah peserta didik. Jumlah pendidik di lembaga PAUD menunjukkan jumlah terbesar yaitu 330,6 ribu.

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/DIAGRAM	xii
BAB I: KEADAAN UMUM	1
A. Topografi dan Geografi	1
B. Kependudukan	2
C. Ketenagakerjaan	7
D. Perekonomian	9
E. Pemerintahan	14
BAB II: PENDIDIKAN NASIONAL	16
A. Sistem Pendidikan	16
B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	21
C. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	23
BAB III: PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL	28
A. Formal	28
B. Nonformal	62
BAB IV: PENCAPAIAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL	71
A. Formal	71
B. Nonformal	95
BAB V: PENGELOLAAN PENDIDIKAN	106
A. Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	106
B. Badan Akreditasi Nasional (BAN)	114
C. Anggaran Pendidikan	122
DAFTAR PUSTAKA	135



## DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I	1
Tabel 1.1 : Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.2 : Perkembangan Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.3 : Perkembangan Penduduk 15 tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	5
Tabel 1.4 : Tingkat Pendidikan Penduduk 15 tahun ke atas per Kelompok Usia	6
Tabel 1.5 : Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan	8
Tabel 1.6 : Perkembangan Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita	9
Tabel 1.7 : Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi	11
Tabel 1.8 : Nilai Ekspor Indonesia berdasarkan Negara Tujuan	12
Tabel 1.9 : Nilai Impor Indonesia berdasarkan Negara Asal Utama	13
 BAB III	
Tabel 3.1 : Skema Karakteristik Sekolah	29
Tabel 3.2 : Struktur Kurikulum SD/MI	35
Tabel 3.3 : Struktur Kurikulum SMP/MTs	36
Tabel 3.4 : Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X	37
Tabel 3.5 : Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA	38
Tabel 3.6 : Mata Pelajaran Umum SMA/SMK (Tiga Tahun)	39
Tabel 3.7 : Mata Pelajaran Umum SMA/SMK (Empat Tahun)	40
Tabel 3.8 : Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra (SDLB/A)	44
Tabel 3.9 : Struktur Kurikulum SDLB Tunarungu (SDLB/B)	44
Tabel 3.10 : Struktur Kurikulum SDLB Tunadaksa (SDLB/D)	45
Tabel 3.11 : Struktur Kurikulum SDLB Tunalaras (SDLB/E)	45
Tabel 3.12 : Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra (SMPLB/A)	46
Tabel 3.13 : Struktur Kurikulum SMPLB Tunarungu (SMPLB/B)	46
Tabel 3.14 : Struktur Kurikulum SMPLB Tunadaksa (SMPLB/D)	46
Tabel 3.15 : Struktur Kurikulum SMPLB Tunalaras (SMPLB/E)	47
Tabel 3.16 : Struktur Kurikulum SMALB Tunanetra (SMALB/A)	47
Tabel 3.17 : Struktur Kurikulum SMALB Tunarungu (SMALB/B)	47
Tabel 3.18 : Struktur Kurikulum SMALB Tunadaksa (SMALB/D)	48
Tabel 3.19 : Struktur Kurikulum SMALB Tunalaras (SMALB/E)	48
Tabel 3.20 : Struktur Kurikulum SDLB Tunagrahita Ringan (SDLB/C), Tuna Grahita Sedang (SDLB/C1), Tunadaksa Sedang (SDLB/D1) dan Tunaganda (SDLB/G)	48

	Halaman
Tabel 3.21 : Struktur Kurikulum SMPLB Tunagrahita Ringan (SMPLB/C), Tunagrahita Sedang (SMPLB/C1), Tunadaksa Sedang (SMPLB/D1), dan Tunaganda (SMPLB/G)	49
Tabel 3.22 : Struktur Kurikulum SMALB Tunagrahita Ringan (SMALB/C), Tunagrahita Sedang (SMALB/C1), Tunadaksa Sedang (SMALB/D1), dan Tunaganda (SMALB/G)	49
Tabel 3.23 : Struktur Kurikulum Paket A	51
Tabel 3.24 : Struktur Kurikulum Paket B	51
Tabel 3.25 : Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)	51
Tabel 3.26 : Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)	52
Tabel 3.27 : Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)	52
Tabel 3.28 : Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan untuk Setiap Satuan Pendidikan	58
Tabel 3.29 : Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan	60
 BAB IV	 71
Tabel 4.1 : Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	71
Tabel 4.2 : Jumlah Siswa Baru menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	72
Tabel 4.3 : Jumlah Siswa Baru menurut Jenis Ketunaan, Sekolah Luar Biasa Tahun 2013/2014	73
Tabel 4.4 : Jumlah Siswa menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	73
Tabel 4.5 : Jumlah Siswa menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Ketunaan, Sekolah Luar Biasa Tahun 2013/2014	74
Tabel 4.6 : Rasio Siswa Per Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	75
Tabel 4.7 : Jumlah lulusan menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	76
Tabel 4.8 : Jumlah Guru menurut Jenjang pendidikan dan status Sekolah Tahun 2013/2014	77
Tabel 4.9 : Rasio Ssiswa per Guru tiap Jenjang Pendidikan	77
Tabel 4.10 : Jumlah Guru menurut Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Ijazah Tertinggi dan Masa Kerja Tahun 2013/2014	78
Tabel 4.11 : Skema Kelayakan Mengajar Guru per Jenjang Pendidikan Menurut UU No. 14, Tahun 2005	79
Tabel 4.12 : Jumlah Guru/Dosen menurut Ijazah Tertinggi dan Kelayakan Mengajar Tahun 2013/2014	79

	Halaman
Tabel 4.13 : APK dan APM per Jenjang Sekolah dan APMus Per Kelompok Usia Tahun 2013/2014	80
Tabel 4.14 : Perkembangan Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	84
Tabel 4.15 : Perkembangan Jumlah Siswa Baru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	84
Tabel 4.16 : Perkembangan Jumlah Siswa menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	86
Tabel 4.17 : Perkembangan Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa menurut Jenis Ketunaan Tahun 2009/2010-2013/2014	87
Tabel 4.18 : Perkembangan Jumlah Lulusan menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	88
Tabel 4.19 : Perkembangan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	89
Tabel 4.20 : Perkembangan APK Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	90
Tabel 4.21 : Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	91
Tabel 4.22 : Perkembangan Rasio Siswa per Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	92
Tabel 4.23 : Perkembangan Rasio Siswa per Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014	93
Tabel 4.24 : Perkembangan Angka Melanjutkan Ke SMP, SM dan PT Tahun 2009/2010-2013/2014	94
Tabel 4.25 : Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Golongan Umur dan Kegiatan Tahun 2013	96
Tabel 4.26 : Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan dan Kegiatan Tahun 2013	96
Tabel 4.27: Peringkat Indeks Pembangunan Manusia ( <i>Human Development Index Ranking</i> )	97
Tabel 4.28 : Jumlah Buta Aksara 15 -59 Tahun 2013	97
Tabel 4.29 : Perkembangan Jumlah Lembaga/Kelompok Belajar menurut Program Tahun 2010-2014	98
Tabel 4.30 : Perkembangan Jumlah PKBM dan TBM Tahun 2010-2014	99
Tabel 4.31 : Perkembangan Jumlah Peserta Didik menurut Program Tahun 2010-2014	100
Tabel 4.32 : Perkembangan Jumlah Lulusan menurut Program Tahun 2010-2014	100
Tabel 4.33 : Perkembangan Jumlah Pendidik menurut Program Tahun 2010-2014	101

	Halaman
Tabel 4.34 : Indikator Pendidikan menurut Program Tahun 2013/2014	102
Tabel 4.35 : Perkembangan Rasio PD/L menurut Program Tahun 2010-2014	103
Tabel 4.36 : Perkembangan % Lulusan menurut Program Tahun 2010-2014	103
Tabel 4.37 : Perkembangan R-P/L menurut Program Tahun 2010-2014	104
Tabel 4.38 : Perkembangan R-PD/P menurut Program Tahun 2010-2014	105
 BAB V	 123
Tabel 5.1 : Anggaran Pendidikan menurut Asal tiap Program Tahun 2013	123
Tabel 5.2 : Anggaran Pendidikan menurut Asal dan Jenis Anggaran Tahun 2013	125
Tabel 5.3 : Anggaran Pendidikan menurut Asal Tiap Unit Utama Tahun 2013	127
Tabel 5.4 : Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan yang Dikeluarkan Orang Tua	128
Tabel 5.5 : Perbandingan Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan Januari-Juni 2009 dan Januari-Juni 2012	130
Tabel 5.6 : Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan tiap Provinsi (Januari – Juni 2012)	131
Tabel 5.7 : Persentase Pengeluaran Pendidikan oleh Orang Tua menurut Jenis (Januari – Juni 2012)	133
Tabel 5.8 : Persentase Pengeluaran Pendidikan menurut 5 Jenis (Januari – Juni 2012)	134
Tabel 5.9 : Perbandingan Persentase Pengeluaran Pendidikan menurut 5 Jenis (Perkotaan + Pedesaan)	135

## DAFTAR GAMBAR/GRAFIK/DIAGRAM

	Halaman
<b>BAB I</b>	
Gambar 1.1 : Indonesia di Peta Dunia	1
Grafik 1.1 : Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2013	3
Grafik 1.2 : Perkembangan Penduduk 15 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 1985-2013	5
Grafik 1.3 : Kelompok Usia Penduduk 15 tahun ke atas per Tingkat Pendidikan Tahun 2013	7
Grafik 1.4 : Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2013	8
Grafik 1.5 : Perkembangan Indeks Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita Tahun 1996-2013	10
Grafik 1.6 : Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi Tahun 2013	11
Grafik 1.7 : Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2013	12
Grafik 1.8 : Nilai Impor menurut Negara Asal Utama Tahun 2013	13
Gambar 1.2 : Indonesia Wilayah Indonesia	14
<b>BAB II</b>	
Diagram 2.1 : Hirarkhi Landasan Hukum Sistem Pendidikan Nasional	17
<b>BAB III</b>	
Bagan 3.1 : Mekanisme pendidikan untuk peserta didik melalui jalur formal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2003	42
Diagram 3.1 : Obyek Garapan Pendidikan Nonformal	63
<b>BAB IV</b>	
Grafik 4.1 : Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	71
Grafik 4.2 : Persentase Siswa Baru menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	72
Grafik 4.3 : Persentase Siswa menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	74
Grafik 4.4 : Persentase Lulusan menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	76
Grafik 4.5 : Persentase Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah Tahun 2013/2014	77

	Halaman
Diagram 4.1:	Arus Pendidikan Persekolahan Jenjang Sekolah Dasar sampai Jenjang SM 82
Grafik 4.6 :	Perkembangan Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 84
Grafik 4.7 :	Perkembangan Jumlah Siswa Baru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 85
Grafik 4.8 :	Perkembangan Jumlah Siswa menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 86
Grafik 4.9 :	Perkembangan Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa menurut Jenis Ketunaan Tahun 2009/2010-2013/2014 87
Grafik 4.10 :	Perkembangan Jumlah Lulusan menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 89
Grafik 4.11 :	Perkembangan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 91
Grafik 4.12 :	Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 90
Grafik 4.13 :	Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 92
Grafik 4.14 :	Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 93
Grafik 4.15 :	Perkembangan Rasio Siswa per Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009/2010-2013/2014 94
Grafik 4.16 :	Perkembangan Angka Melanjutkan ke SMP, SM, dan PT Tahun 2009/2010-2013/2014 95
 BAB V	
Diagram 5.1 :	Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015 107
Diagram 5.2:	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal 108
Diagram 5.3:	Struktur Organisasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 109
Diagram 5.4:	Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 110
Diagram 5.5:	Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah 111
Diagram 5.6:	Struktur Organisasi Dirjen Kebudayaan 112
Diagram 5.7:	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal 112
Diagram 5.8:	Struktur Organisasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 113
Diagram 5.9:	Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan 114

	Halaman
Grafik 5.1 : Persentase Anggaran Pendidikan berupa Rupiah Murni Tiap Program	124
Grafik 5.2 : Persentase Anggaran Pendidikan Berupa Pinjaman Luar Negeri tiap Program	125
Grafik 5.3 : Persentase Anggaran Pendidikan Kemdikbud menurut Asal	126
Grafik 5.4 : Anggaran Pendidikan menurut Asal Tiap Unit Utama	127
Grafik 5.5 : Rata-rata Biaya Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah	129
Grafik 5.6 : Perbandingan Rata-rata Satuan Biaya Pendidikan yang Dikeluarkan Orang Tua	130
Grafik 5.7 : Persentase Biaya Pendidikan menurut Jenis Pengeluaran	134

## BAB I KEADAAN UMUM

### A. Topografi dan Geografi

Wilayah Indonesia terbentang dari barat ke timur sepanjang 5.110 km dan dari utara ke selatan sepanjang 1.888 km. Secara astronomis, terletak antara garis-garis  $6^{\circ}08'$  lintang utara,  $11^{\circ}15'$  lintang selatan, dan antara  $94^{\circ}45'$ - $141^{\circ}05'$  bujur timur. Sebagai negara kepulauan, luas wilayah mencapai 5.193,3 ribu  $\text{km}^2$ . Dari luas tersebut, sebesar 1.904,6 ribu  $\text{km}^2$  merupakan daratan yang terdiri dari kurang lebih 17.500 pulau besar dan kecil yang tersebar di sepanjang katulistiwa (ekuator) dengan tiga perempat bagiannya merupakan lautan. Rangkaian gugusan pulau ini sering disebut sebagai “Untaian Zamrud Katulistiwa”.

Gambar 1.1  
Indonesia di Peta Dunia



Sumber: google.com yang diperbaiki

Oleh karena wilayah Indonesia dilalui oleh garis katulistiwa maka Indonesia beriklim tropis, dan mempunyai dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Berdasarkan posisi geografis, Kepulauan Indonesia berada di ujung tenggara Benua Asia berbatasan sebelah utara dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan



negara Australia dan Samudera Hindia. Sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan. Lima pulau besar tersebut adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua sedangkan empat kepulauan tersebut adalah Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku.

Kebanyakan wilayah daerah Indonesia berada di sepanjang pantai sehingga sebagian besar wilayah Indonesia beriklim panas dan lembab dengan suhu udara dan kelembaban masing-masing daerah bervariasi, sesuai tinggi-rendah letaknya terhadap permukaan laut. Rata-rata wilayah Indonesia memiliki suhu udara pada siang hari berkisar antara 28,2<sup>0</sup> Celcius sampai 34,6<sup>0</sup> Celsius, sedangkan suhu udara pada malam hari berkisar antara 12,8<sup>0</sup> Celcius sampai 30,0<sup>0</sup> Celcius.

Indonesia memiliki 47 perbedaan ekosistem alam, mulai dari daerah bersalju dan padang rumput pegunungan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan hutan-hutan dataran rendah yang lembab; dari danau-danau yang dalam sampai dengan rawa-rawa yang dangkal; dan dari batu-batu karang yang spektakuler sampai ke lautan rumput dan rawa-rawa hutan bakau. Masing-masing tipe ekosistem utama ini masih memiliki serangkaian variasi jenis ekosistem.

## **B. Kependudukan**

Berdasarkan asal-usul dan persebaran penduduk, diperkirakan sebagian besar penduduk Indonesia berasal dari keturunan ras Sinida, khususnya rumpun bangsa Mongoloid, terutama yang menghuni wilayah Indonesia bagian barat dan bagian tengah. Sebagian besar penduduk di wilayah Indonesia bagian timur merupakan keturunan Melanesia dan Negroid.

Perbedaan etnik yang terdapat di Indonesia jauh lebih besar daripada yang ada di belahan dunia. Bahkan, dari ratusan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, suku bangsa yang terbesar jumlahnya ialah etnis Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian disusul etnis Sunda yang bermukim di Provinsi Jawa Barat.

Jumlah penduduk yang terdapat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 telah mencapai 248.818,1 juta orang, terdiri dari 125.036,0 juta laki-laki (50,25%) dan 123.782,1 juta perempuan (49,75%). Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia yang berusia 0-24 tahun sebesar 112.417,8 juta (45,18%) sedangkan usia produktif (15-64 tahun) sebesar 166.709,9 juta (67,01%) dari seluruh penduduk. Hal ini berbeda dengan kondisi pada negara-negara maju sebesar 50% dari penduduknya berusia produktif (15-64 tahun).

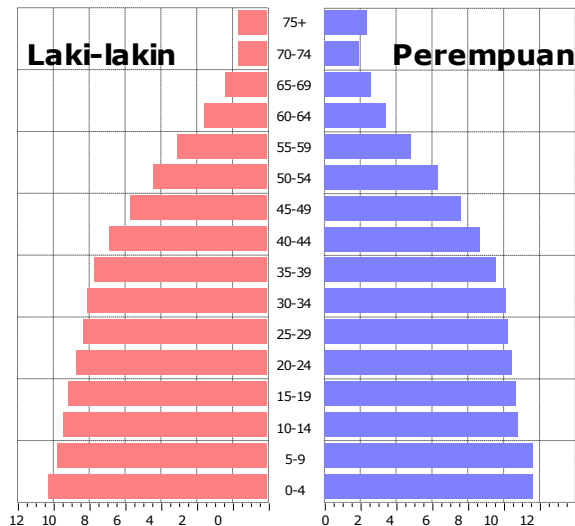
Tabel 1.1  
Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin  
Tahun 2013

(ribuan)

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
	Jumlah	%	Jumlah	%		
0-4	12.268,1	51,13	11.726,1	48,87	23.994,2	9,64
5-9	11.765,1	51,30	11.166,8	48,70	22.931,9	9,22
10-14	11.421,3	51,19	10.888,5	48,81	22.309,8	8,97
15-19	11.167,6	50,92	10.763,6	49,08	21.931,2	8,81
20-24	10.708,7	50,39	10.542,0	49,61	21.250,7	8,54
Subjml	57.330,8	51,00	55.087,0	49,00	112.417,8	45,18
25-29	10.348,6	50,08	10.315,2	49,92	20.663,8	8,30
30-34	10.110,1	49,69	10.238,0	50,31	20.348,1	8,18
35-39	9.717,7	50,18	9.648,2	49,82	19.365,9	7,78
40-44	8.894,2	50,30	8.789,0	49,70	17.683,2	7,11
45-49	7.734,2	50,07	7.712,8	49,93	15.447,0	6,21
Subjml	46.804,8	50,05	46.703,2	49,95	93.508,0	37,58
50-54	6.449,5	50,08	6.427,7	49,92	12.877,2	5,18
55-59	5.098,9	50,86	4.927,1	49,14	10.026,0	4,03
60-64	3.585,2	50,38	3.531,6	49,62	7.116,8	2,86
65-69	2.396,0	47,33	2.666,8	52,67	5.062,8	2,03
70-74	1.666,6	45,51	1.995,1	54,49	3.661,7	1,47
75 +	1.704,2	41,09	2.443,6	58,91	4.147,8	1,67
Subjml	20.900,4	48,73	21.991,9	51,27	42.892,3	17,24
Jumlah	125.036,0	50,25	123.782,1	49,75	248.818,1	100,00

Sumber: Proyeksi Penduduk SP 2010, BPS, 2014

Grafik 1.1  
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin  
Tahun 2013



Perkembangan penduduk dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yang diperlihatkan pada Tabel 1.2 menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 241,9 juta yang terdiri dari 121,6 juta penduduk laki-laki dan 120,3 juta perempuan pada tahun 2011 menjadi 245,5 juta yang terdiri dari 123,3 juta laki-laki dan 122,1 perempuan pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia mencapai 248,8 juta yang terdiri dari 125,1 juta laki-laki dan 123,7 juta perempuan. Lebih lanjut lagi, dilihat dari tahun ke tahun struktur penduduk usia 0-9 tahun terus meningkat hingga tahun 2013, di mana pada tahun 2011 penduduk usia 0-9 tahun yang berjumlah 46,3 juta (17,70%) meningkat menjadi 46,6 juta (19,33%) pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 terus meningkat menjadi 46,9 juta (19,00%).

Tabel 1.2  
Perkembangan Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin  
Tahun 2011-2013

(ribuan)

Usia	Tahun2011			Tahun2012			Tahun2013		
	Laki2	Peremp.	Jumlah	Laki2	Peremp.	Jumlah	Laki2	Peremp.	Jumlah
0-4	12.142,1	11.538,8	23.680,9	12.215,9	11.636,8	23.852,7	12.268,1	11.726,1	23.994,2
5-9	11.606,2	11.026,2	22.632,4	11.673,5	11.093,8	22.767,3	11.765,1	11.166,8	22.931,9
Subjml 0-9 th	23.748,3	22.565,0	46.313,3	23.889,4	22.730,6	46.620,0	24.033,2	22.892,9	46.926,1
%	19,76	18,89	17,70	19,49	18,69	19,33	19,37	18,62	19,00
10-14	11.379,7	10.850,4	22.230,1	11.408,9	10.872,0	22.280,9	11.421,3	10.888,5	22.309,8
15-19	10.982,6	10.695,7	21.678,3	11.078,5	10.733,6	21.812,1	11.167,6	10.763,6	21.931,2
20-24	10.592,1	10.446,9	21.039,0	10.650,0	10.498,7	21.148,7	10.708,7	10.542,0	21.250,7
25-29	10.290,1	10.346,5	20.636,6	10.318,6	10.328,0	20.646,6	10.348,6	10.315,2	20.663,8
30-34	10.025,2	10.080,7	20.105,9	10.072,9	10.167,6	20.240,5	10.110,1	10.238,0	20.348,1
35-39	9.470,1	9.358,9	18.829,0	9.598,7	9.505,6	19.104,3	9.717,7	9.648,2	19.365,9
40-44	8.525,1	8.433,3	16.958,4	8.716,8	8.616,0	17.332,8	8.894,2	8.789,0	17.683,2
45-49	7.300,3	7.284,8	14.585,1	7.514,7	7.500,5	15.015,2	7.734,2	7.712,8	15.447,0
50-54	6.051,4	5.928,6	11.980,0	6.253,9	6.186,7	12.440,6	6.449,5	6.427,7	12.877,2
55-59	4.625,4	4.389,8	9.015,2	4.866,5	4.649,2	9.515,7	5.098,9	4.927,1	10.026,0
60-64	3.181,4	3.251,1	6.432,5	3.371,3	3.382,1	6.753,4	3.585,2	3.531,6	7.116,8
65-69	2.256,4	2.519,2	4.775,6	2.320,6	2.587,9	4.908,5	2.396,0	2.666,8	5.062,8
70-74	1.565,2	1.904,2	3.469,4	1.615,4	1.949,9	3.565,3	1.666,6	1.995,1	3.661,7
75 +	1.609,1	2.333,2	3.942,3	1.654,8	2.385,8	4.040,6	1.704,2	2.443,6	4.147,8
Jumlah	121.602,4	120.388,3	241.990,7	123.331,0	122.094,2	245.425,2	125.036,0	123.782,1	248.818,1

Sumber: Proyeksi Penduduk SP 2011, BPS, 2014

Perkembangan komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan menunjukkan kecenderungan makin membaik. Tabel 1.3 dan Grafik 1.2 memperlihatkan terjadinya penurunan persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dari 19,06% pada tahun 1985, di mana setelah 26 tahun menurun secara drastis menjadi 8,37% dan kemudian menjadi 4,46% pada tahun 2013. Sedangkan pada penduduk yang tidak/belum tamat sekolah dasar (SD) terjadi sedikit perbedaan, dimana awalnya menurun cukup tajam dari 37,71% pada tahun 1985 menjadi 14,43% pada tahun 2000 namun penurunannya melambat menjadi 12,25% pada tahun 2013.

Persentase penduduk yang tamat SD telah meningkat dari 26,82% pada tahun 1985 menjadi 35,75% tahun 2000 namun menurun menjadi 27,95%

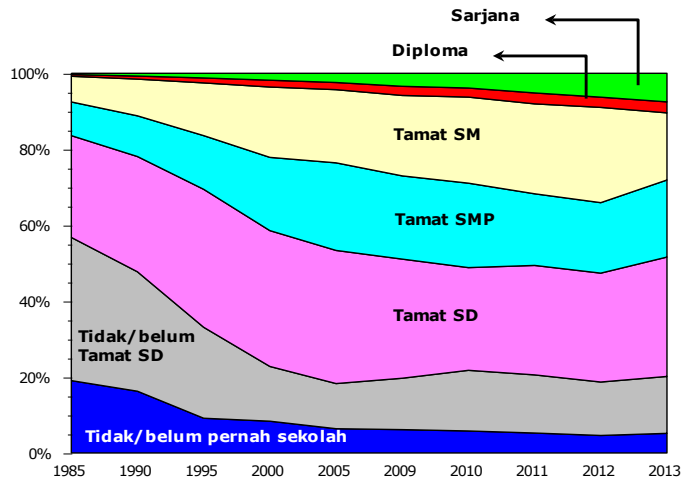
pada tahun 2013. Hal yang sama terjadi pada persentase penduduk berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP), yang mengalami peningkatan cukup tinggi dari 8,87% pada tahun 1985 menjadi 19,32% pada tahun 2000 namun mengalami sedikit penurunan menjadi 18,73% pada tahun 2013.

Tabel 1.3  
Perkembangan Penduduk 15 tahun ke atas menurut  
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan  
Tahun 1985-2013

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT		Jumlah
						Diploma	Sarjana	
1985	22.943,8	45.399,0	32.283,8	10.674,1	8.140,8	562,5	376,1	120.380,1
%	19,06	37,71	26,82	8,87	6,76	0,47	0,31	100,00
1990	21.954,3	42.480,4	40.996,4	14.481,1	13.087,4	1.053,3	986,7	135.039,6
1995	14.146,8	36.980,2	56.144,7	21.839,1	21.444,9	2.020,3	1.888,7	154.464,7
2000	11.821,7	20.364,0	50.470,9	27.268,5	26.159,0	2.516,8	2.569,8	141.170,7
%	8,37	14,43	35,75	19,32	18,53	1,78	1,82	100,00
2001	11.548,6	21.538,0	50.280,7	28.967,4	26.066,2	2.657,4	2.975,5	144.033,8
2002	11.465,0	21.495,8	52.862,2	30.306,1	26.941,0	2.631,3	3.028,4	148.729,8
2003	8.891,2	18.705,4	55.101,2	35.293,0	29.282,4	2.363,1	3.023,7	152.660,0
2004	9.500,5	19.128,1	53.967,0	35.651,0	29.444,0	2.708,3	3.550,0	153.948,9
2005	9.932,7	18.509,8	54.544,7	35.879,0	29.997,1	2.924,8	3.761,7	155.549,8
2006	9.831,8	18.703,4	55.009,2	36.504,6	33.066,8	3.388,2	4.307,6	160.811,5
2007	9.753,7	19.137,8	56.563,5	36.394,8	33.393,3	4.076,3	4.798,9	164.118,3
2008	9.834,4	19.539,1	56.018,3	36.911,7	35.090,4	3.871,8	5.375,4	166.641,1
2009	10.333,9	22.778,9	52.814,4	36.868,1	35.649,9	4.041,5	5.777,6	168.264,4
2010	9.979,8	27.482,5	46.538,7	38.299,9	38.992,0	4.113,5	6.663,5	172.069,9
2011	5.772,9	16.775,9	31.627,9	20.696,6	25.973,5	3.173,5	5.650,1	109.670,4
2012	5.441,3	16.611,6	33.860,6	21.924,2	29.625,5	3.170,4	7.419,5	118.053,1
2013	5.273,4	14.484,1	33.039,2	22.139,2	31.014,9	3.111,6	8.012,5	118.192,8
%	4,46	12,25	27,95	18,73	26,24	2,63	6,78	100,00

Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia November 2013, BPS, 2014

Grafik 1.2  
Perkembangan Penduduk 15 tahun ke atas menurut  
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,  
Tahun 1985-2013



Selanjutnya, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah menengah (SM) terus mengalami peningkatan dari 6,76% pada tahun 1985 menjadi 18,53% pada tahun 2000 dan meningkan lagi menjadi 26,24% pada tahun 2013. Perkembangan yang sangat tinggi terjadi pada jumlah penduduk dengan pendidikan diploma perguruan tinggi (PT) dari 0,47% pada tahun 1985 menjadi 1,78% pada tahun 2000 dan menjadi 2,63% pada tahun 2013. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana PT juga mengalami peningkatan sangat tajam dari 0,31% pada tahun 1985 menjadi 1,82% pada tahun 2000 dan menjadi 6,78% pada tahun 2013.

Pada Tabel 1.4 diperlihatkan bahwa jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 118.192 juta. Jika jumlah ini dipilah menjadi 10 kelompok usia, yaitu 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun, 50-54 tahun, 55-59 tahun dan 60 tahun ke atas, kelompok usia dengan jumlah penduduk terbesar adalah kelompok usia 30-34 tahun sebesar 15.985,5 ribu (13,5%) dengan tingkat pendidikan paling besar adalah tamat SM sebesar 5.313,8 ribu (17,13%). Sedangkan untuk kelompok usia 60 tahun ke atas sebesar 8.647,8 ribu (7,30%) dengan tingkat pendidikan yang paling besar adalah tidak/belum tamat SD sebesar 2.979,4 ribu (2,52%).

Tabel 1.4  
Tingkat Pendidikan Penduduk 15 tahun ke atas per Kelompok Usia  
Tahun 2013

(ribuan)

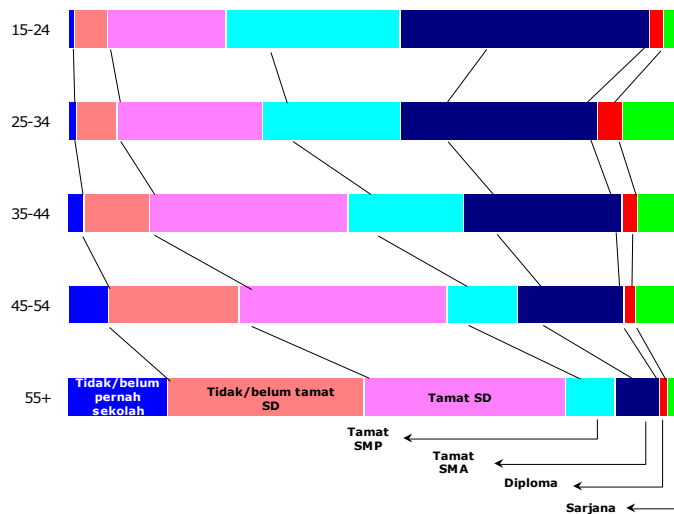
Kelompok Usia	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SM	Tamat PT		Jumlah	%
						Diploma	Sarjana		
15-19	95,7	510,5	1.780,4	3.011,2	2.640,3	8,4	0,0	8.046,4	6,8
20-24	126,5	608,5	2.181,8	2.819,0	5.727,6	459,2	646,4	11.923,2	10,1
Subjml 15-24 th	222,2	1.119,0	3.962,1	5.830,3	8.367,8	467,6	646,4	19.969,6	16,9
%	0,18	0,93	3,29	4,84	6,95	0,39	0,54	100,00	
25-29	186,4	870,9	3.127,0	3.331,1	5.090,0	673,2	1.668,0	13.280,1	11,2
30-34	277,7	1.265,7	4.531,9	3.947,4	5.313,8	647,5	1.527,7	15.985,5	13,5
Subjml 25-34 th	464,1	2.136,6	7.658,8	7.278,5	10.403,8	1.320,7	3.195,7	29.265,7	24,8
%	0,39	1,77	6,36	6,05	8,64	1,10	2,65	100,00	
35-39	299,8	1.301,7	4.529,3	2.737,5	3.650,2	386,1	1.041,7	12.905,6	10,9
40-44	454,7	1.770,3	4.797,7	2.675,1	3.788,5	343,0	1.104,2	13.830,4	11,7
Subjml 35-44 th	754,5	3.072,0	9.327,0	5.412,5	7.438,7	729,1	2.145,9	26.736,0	22,6
%	0,63	2,55	7,75	4,50	6,18	0,61	1,78	100,00	
45-49	600,4	2.087,4	3.778,2	1.444,6	2.416,1	221,0	950,1	10.548,6	8,9
50-54	820,4	2.450,1	3.456,7	997,1	1.302,3	168,7	714,5	9.195,9	7,8
Subjml 45-54 th	1.420,7	4.537,5	7.234,8	2.441,7	3.718,4	389,7	1.664,7	19.744,5	16,7
%	1,18	3,77	6,01	2,03	3,09	0,32	1,38	100,00	
55-59	627,3	1.757,8	2.155,1	593,9	582,9	107,6	256,5	5.824,8	4,9
60+	1.784,6	2.979,1	2.701,4	582,4	503,3	96,9	103,3	8.647,8	7,3
Subjml 55+ th	2.411,9	4.736,9	4.856,4	1.176,3	1.086,1	204,5	359,9	14.472,6	12,2
%	2,00	3,93	4,03	0,98	0,90	0,17	0,30	100,00	0,08
Jumlah	5.273,427	14.484,135	33.039,191	22.139,232	31.014,9	3.111,579	8.012,474	118.192,8	100,0

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2013, BPS, 2014

Grafik 1.3 dan Tabel 1.4 menunjukkan bahwa di tahun 2013 persentase tertinggi kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan SM terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun yaitu sekitar 8.367,8 ribu (6,95%). Penduduk usia 25-34 tahun didominasi juga oleh tamatan SM sebanyak 10.403,8 ribu

atau setara 8,64%. Sementara itu, penduduk kelompok usia lainnya, yaitu 35-44 tahun dan 45-54 tahun didominasi oleh tingkat pendidikan tamat SD, yaitu masing-masing 7,75% dan 6,01%, sedangkan untuk usia 55 ke atas didominasi oleh tingkat pendidikan tidak/belum tamat SD yaitu sebesar 3,93%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pendidikan yang dilakukan selama ini secara kuantitatif telah berhasil memperkecil jumlah penduduk yang tidak/belum tamat sekolah dan sekaligus meningkatkan pula jumlah penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

Grafik 1.3  
Kelompok Usia Penduduk 15 tahun ke atas per Tingkat Pendidikan Tahun 2013



### C. Ketenagakerjaan

Penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Dari sejumlah 118.192,8 juta penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, terdapat 110,8 juta tenaga kerja yang tersebar di 9 sektor pekerjaan. Kesembilan kelompok sektor lapangan pekerjaan tersebut meliputi 1) pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas dan air; 5) bangunan; 6) perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; 7) angkutan, pergudangan, dan komunikasi; 8) keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan; serta 9) jasa

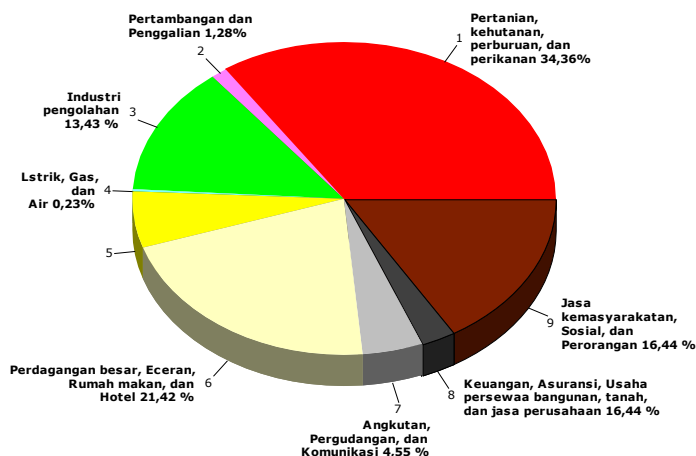
kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Tabel 1.5  
Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan  
Tahun 2013

(ribuan)			
No.	Sektor	Jumlah	%
1	Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	38.068.254	34,36
2	Pertambangan dan penggalian	1.420.767	1,28
3	Industri pengolahan	14.883.817	13,43
4	Listrik, gas dan air	250.945	0,23
5	Bangunan	6.276.723	5,66
6	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	23.737.236	21,42
7	Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	5.040.849	4,55
8	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	2.912.418	2,63
9	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	18.213.032	16,44
	Jumlah	110.804.041,0	100,00

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2013, BPS 2013

Grafik 1.4  
Tenaga Kerja menurut Sektor Pekerjaan  
Tahun 2013



Distribusi tenaga kerja menurut sektor pekerjaan diperlihatkan pada Tabel 1.5 dan Grafik 1.4. Sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dengan jumlah lebih dari 38.068,2 juta (34,36%). Terbesar kedua ditempati sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan jumlah lebih

dari 23.737,2 juta (21,42%), sedangkan sektor terkecil adalah sektor listrik, gas dan air sebanyak 250.945 ribu (0,23%).

#### D. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya nilai ekspor, impor, produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Perkembangan nilai ekspor dan impor yang disajikan merupakan ekspor dan impor migas, sedangkan pendapatan per kapita dimaksud adalah pendapatan per kapita atas dasar harga konstan 2000.

Tabel 1.6  
Perkembangan Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita  
Tahun 1996-2013

Tahun	Ekspor (juta, US\$)	Impor (juta, US\$)	PDB (milyar, Rp)	Pendapatan per Kapita (Rp)
1996	49.814,80	42.928,50	413.797,90	1.819.811,40
1997	53.443,60	41.679,80	433.245,90	1.851.611,60
1998	48.847,60	27.336,90	376.374,90	1.615.512,90
1999	48.665,40	24.003,30	379.352,50	1.637.116,00
2000	62.124,00	33.514,80	398.016,90	1.769.959,60
2001	56.320,90	30.962,10	411.753,50	1.744.178,30
2002	57.158,80	31.288,90	426.942,90	6.244.362,20
2003	61.058,20	32.550,70	1.577.171,30	6.327.334,30
2004	71.584,60	46.524,50	1.656.516,80	6.688.101,80
2005	85.660,00	57.700,90	1.750.656,10	6.939.456,30
2006	100.798,60	61.065,50	1.846.654,90	7.136.388,50
2007	114.100,90	74.473,40	1.964.327,30	7.486.000,00
2008	137.020,40	129.197,30	2.082.315,90	8.096.300,00
2009	116.510,00	96.829,20	2.176.975,50	8.184.000,00
2010	157.779,10	135.663,30	2.314.458,80	9.313.600,00
2011	203.496,60	177.435,60	2.464.566,10	9.785.900,00
2012	190.020,30	191.689,50	2.618.938,40	10.260.900,00
2013	182.551,80	186.628,70	2.770.345,10	10.687.682,53

Catatan: Tahun 1995-2004 menggunakan harga konstan 1993, mulai tahun 2005 menggunakan harga konstan 2000

Sumber: Statistik Indonesia 2013, BPS, 2014

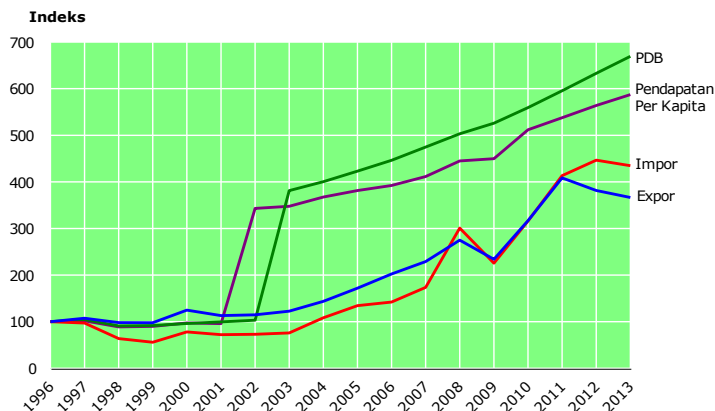
Berdasarkan pada Tabel 1.6 dan Grafik 1.5, nilai ekspor Indonesia yang pada tahun 1996 hingga 1997 terjadi peningkatan dari 49.814,8 juta US\$ menjadi 53.443,6 juta US\$. Namun, mengalami penurunan secara drastis pada tahun 1998 hingga tahun 1999 menjadi 48.665,4 juta US\$. Hal ini diakibatkan krisis moneter yang berkepanjangan yang secara langsung berdampak terhadap nilai ekspor. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor secara tajam menjadi 62.124,0 juta US\$, namun turun kembali pada tahun 2001 menjadi 56.320,9 juta US\$. Mulai tahun 2002 terjadi



peningkatan lagi meski tidak terlalu besar menjadi 57.158,8 juta US\$, tahun 2003 meningkat menjadi 61.058,2 juta US\$ dan menjadi 71.584,6 juta US\$ pada tahun 2004. Pada tahun 2005 meningkat sangat signifikan menjadi 85.660,0 juta US\$ dan selanjutnya meningkat secara signifikan sampai tahun 2008 menjadi 137.020,4 US\$. Namun, pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 116.510,0 US\$, dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan lagi menjadi 203.496,6 US\$. Pada tahun 2012 kembali terjadi penurunan menjadi 190.020,3 US\$, dan pada tahun 2013 menjadi 182.551,8 US\$.

Demikian pula dengan nilai impor Indonesia yang mengalami penurunan yang signifikan dari 42.928,5 juta US\$ hingga tahun 1999 menjadi 24.003,3 juta US\$. Hal ini diakibatkan krisis moneter yang berkepanjangan yang secara langsung juga berdampak terhadap nilai impor. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan impor menjadi 33.514,8 juta US\$, namun turun kembali pada tahun 2001 menjadi 30.962,1 juta US\$. Mulai tahun 2002, meski tidak terlalu besar meningkat menjadi 31.288,9 juta US\$ dan selanjutnya meningkat sangat signifikan dari 46.524,5 juta US\$ pada tahun 2004, kemudian meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 129.197,3 juta US\$ pada tahun 2008. Pada tahun 2009 nilai impor kembali mengalami penurunan menjadi 96.829,2 juta US\$. Namun pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan nilai impor menjadi 177.435,6 juta US\$ dan 191.689,5 juta US\$. Tahun 2013 kembali menurun menjadi 186.628,70 US\$.

Grafik 1.5  
Perkembangan Indeks Ekspor, Impor, PDB, dan Pendapatan per Kapita  
Tahun 1996-2013



Nilai ekspor dan impor pada tahun 2013 menurut 10 jenis komoditi dinyatakan dalam Tabel 1.7 dan Grafik 1.6. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 2013 adalah untuk bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu dengan nilai nominal sebesar 57.395,8 juta US\$

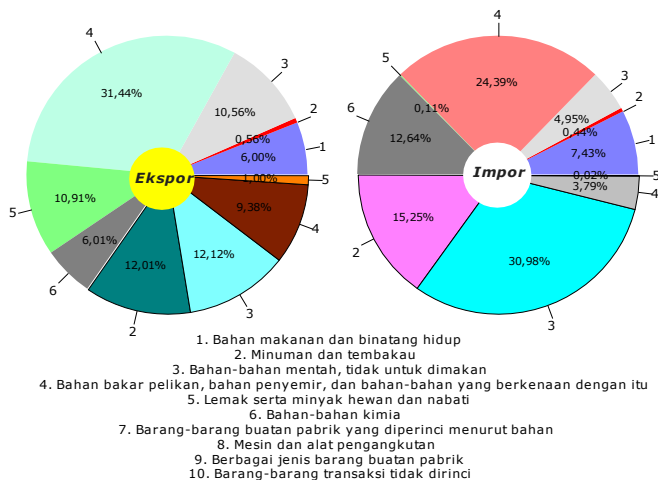
(31,44%). Pada urutan berikutnya mesin dan alat pengangkutan sebesar 22.133,3 juta US\$ (12,02%). Nilai impor terkecil di tahun 2013 adalah minuman dan tembakau sebesar 821,6 juta US\$ atau 0,44 % dan diikuti dengan batang-barang transaksi tidak dirinci sebesar 33,5 juta US\$ atau 0,02%. Pada tahun 2013 nilai ekspor terkecil masih pada sektor minuman dan tembakau, yaitu 1.017,3 US\$ atau 0,56%.

Tabel 1.7  
 Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi  
 Tahun 2013

No	Jenis Komoditi	Ekspor (juta US\$)	%	Impor (juta US\$)	%
1	Bahan makanan dan binatang hidup	10.961,2	6,00	13.871,7	7,43
2	Minuman dan tembakau	1.017,3	0,56	821,6	0,44
3	Bahan-bahan mentah, tidak untuk dimakan	19.275,6	10,56	9.231,1	4,95
4	Bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu	57.395,8	31,44	45.510,1	24,39
5	Lemak serta minyak hewan dan nabati	19.924,5	10,91	205,8	0,11
6	Bahan-bahan kimia	10.976,9	6,01	23.593,6	12,64
7	Barang-barang buatan pabrik yang diperinci menurut bahan	21.923,7	12,01	28.462,1	15,25
8	Mesin dan alat pengangkutan	22.133,3	12,12	57.823,6	30,98
9	Berbagai jenis barang buatan pabrik	17.124,5	9,38	7.075,6	3,79
10	Barang-barang transaksi tidak dirinci	1.819,0	1,00	33,5	0,02
Jumlah		182.551,8	100,00	186.628,7	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2013, BPS, 2014

Grafik 1.6  
 Nilai Ekspor dan Impor menurut Jenis Komoditi  
 Tahun 2013



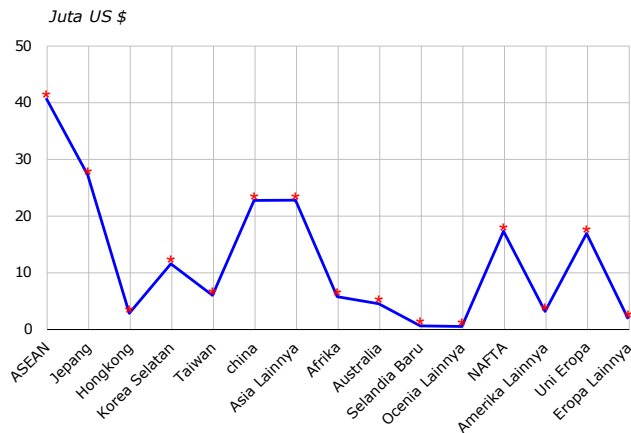
Nilai impor tertinggi pada tahun 2013 adalah mesin dan alat pengangkutan dengan nilai nominal sebesar 57.823,6 juta US\$ (30,98%). Pada urutan berikutnya bahan bakar pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan yang berkenaan dengan itu sebesar 45.510,1 juta US\$ (24,39%). Nilai impor terkecil di tahun 2013 adalah barang-barang transaksi tidak dirinci sebesar 33,5 juta US\$ atau 0,02%.

Tabel 1.8  
Nilai Ekspor Indonesia berdasarkan Negara Tujuan Utama  
(dalam kurun 6 tahun)

No.	Negara Tujuan	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
		Jumlah	%					Jumlah	%
1	ASEAN	27.170,8	19,83	24.624,0	33.347,5	42.098,9	41.829,1	40.630,0	22,01
2	Jepang	27.743,9	20,25	18.574,7	25.781,8	33.714,7	30.135,1	27.086,3	15,86
3	Hongkong	1.808,8	1,32	2.111,8	2.501,4	3.215,5	2.631,9	2.693,3	1,39
4	Korea Selatan	9.116,8	6,65	8.145,2	12.574,6	16.388,8	15.049,9	11.422,5	7,92
5	Taiwan	3.154,7	2,30	3.382,1	4.837,6	6.584,9	6.242,5	5.862,4	3,29
6	Cina	11.636,5	8,49	11.499,3	15.692,6	22.941,0	21.659,5	22.601,5	11,40
7	Asia lainnya	15.273,4	11,15	13.498,0	17.416,6	22.902,8	22.059,7	22.630,6	11,61
8	Afrika	3.281,3	2,39	2.753,5	3.657,0	5.675,3	5.713,7	5.615,5	3,01
9	Australia	4.111,0	3,00	3.264,2	4.244,4	5.582,5	4.905,4	4.370,5	2,58
10	Selandia Baru	542,3	0,40	349,5	396,2	371,7	441,0	469,5	0,23
11	Oceania lainnya	167,0	0,12	243,0	249,8	348,9	336,4	367,5	0,18
12	NAFTA	14.108,4	10,30	11.746,5	15.761,2	18.077,8	16.316,7	17.161,3	8,59
13	Amerika Lainnya	1.972,3	1,44	1.717,1	2.710,3	3.295,2	2.975,2	3.018,5	1,57
14	Uni Eropa	15.454,5	11,28	13.568,2	17.127,4	20.508,9	18.027,3	16.763,7	9,49
15	Eropa lainnya	1.478,7	1,08	1.032,9	1.450,7	1.789,7	1.696,9	1.634,8	0,89
	Jumlah	137.020,4	100,00	116.510,0	157.749,1	203.496,6	190.020,3	182.327,9	100,00

Sumber: Statistik Indonesia 2013, BPS, 2014

Grafik 1.7  
Nilai Ekspor menurut Negara Tujuan  
Tahun 2013



Perkembangan nilai ekspor Indonesia ke negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 1.8 dan Grafik 1.7. Ekspor Indonesia meliputi negara-negara ASEAN (Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Brunei

Darussalam, Laos, dan Vietnam), Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Cina, Asia lainnya, Afrika, Australia, Selandia Baru, Oceania lainnya, NAFTA (Amerika Serikat, Kanada, Meksiko), Amerika lainnya, Uni Eropa (Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Italia, Spanyol, Yunani, Polandia, Uni Eropa), dan Eropa lainnya.

Pada tahun 2008 Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor perdagangan Indonesia dengan nilai ekspor 27.743,9 juta US\$ (20,25%). Namun, tujuan sasaran ekspor Indonesia di tahun 2013 adalah ASEAN dengan nilai mencapai 40.630,0 juta US\$ (22,01%) atau lebih besar atas Jepang dengan nilai ekspor 27.086,3 juta US\$ (11,88%).

Tabel 1.9  
Nilai Impor Indonesia berdasarkan Negara Asal Utama  
2008-2013

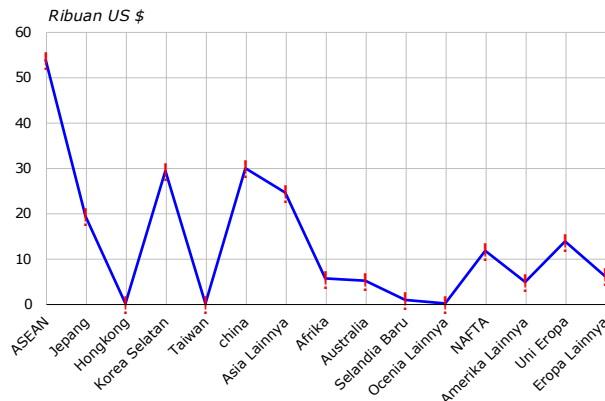
(Juta US\$)

No.	Negara Asal Utama	2008		2009	2010	2011	2012	2013	
		Jumlah	%					Jumlah	%
1	ASEAN	40.967,8	31,71	27.722,0	38.912,2	51.108,9	53.662,2	53.851,4	27,99
2	Jepang	15.128,0	11,71	9.843,7	16.965,8	19.436,6	22.767,8	19.284,3	11,88
3	Hongkong	...	...	...	...	...	...	...	...
4	Korea Selatan	6.920,1	5,36	4.742,3	7.703,0	12.999,7	11.970,4	29.284,3	6,24
5	Taiwan	...	...	...	...	...	...	...	...
6	Cina	15.247,2	11,80	14.002,2	20.424,2	26.212,2	29.385,8	29.849,5	15,33
7	Asia lainnya	17.734,1	13,73	12.932,6	17.016,9	22.505,3	24.086,7	24.471,9	12,57
8	Afrika	2.241,9	1,74	2.047,4	2.455,4	4.029,9	5.703,4	5.549,6	2,98
9	Australia	3.997,5	3,09	3.436,0	1.099,0	5.177,1	5.297,6	5.038,2	2,76
10	Selandia Baru	706,7	0,55	556,8	726,9	729,2	696,3	806,0	0,36
11	Oceania lainnya	53,9	0,04	154,0	54,3	37,6	62,4	23,4	0,03
12	NAFTA	9.901,0	7,66	8.216,2	10.720,5	13.241,7	13.981,8	11.648,9	7,29
13	Amerika Lainnya	2.494,6	1,93	2.282,0	3.212,9	4.231,1	4.457,0	4.768,4	2,33
14	Uni Eropa	10.560,0	8,17	8.679,9	9.862,5	12.499,7	14.132,2	13.708,1	7,37
15	Eropa lainnya	3.244,5	2,51	2.214,1	3.509,7	5.226,6	5.485,9	6.036,4	2,86
	Jumlah	129.197,3	100,00	96.829,2	132.663,3	177.435,6	191.689,5	204.320,4	100,00

Sumber: Statistik Indonesia, 2013, BPS, 2014,

Keterangan: ... Data tidak tersedia

Grafik 1.8  
Nilai Impor menurut Negara Asal Utama  
Tahun 2013



Pada Tabel 1.9 dan Grafik 1.8 tampak perkembangan nilai impor Indonesia dari negara-negara asal utama di dunia sepanjang lima tahun. Pada Tabel 1.9 tampak jelas nilai impor pada tahun 2008 sebesar 129.197,3 juta US\$, menurun pada tahun 2009 dan meningkat kembali secara signifikan sebesar 191.689,5 juta US\$ pada tahun 2012 dan tahun 2013 meningkat sebesar 204.320,4 juta US\$. Hongkong dan Taiwan adalah negara yang merupakan tujuan ekspor Indonesia namun Indonesia tidak melakukan impor dari kedua Negara tersebut dalam jumlah cukup besar sehingga nilai impor dari kedua negara tersebut dikelompokkan dalam negara asia lainnya.

Berdasarkan asal negara, impor tertinggi dari negara ASEAN pada tahun 2008 sebesar 40.967,8 juta US\$ (31,71%) meningkat menjadi 53.662,2 juta US\$ pada tahun 2012 dan 53.851,4 juta US\$ pada tahun 2013.

### E. Pemerintahan

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Lambang negara adalah "Burung Garuda", dengan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai sembojannya, dasar negara adalah "Pancasila" dan yang menjadi landasan konstitusi adalah "Undang-Undang Dasar 1945".

Gambar 1.2  
Peta Wilayah Indonesia



Secara administrasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999 sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah di kabupaten/kota. Sejalan dengan otonomi telah terjadi pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia seiring dengan tuntutan otonomi daerah. Sampai tahun 2012, wilayah administrasi Indonesia menjadi 33 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.651 kecamatan, dan 76.983 desa/kelurahan.



Pemerintah Indonesia menganut sistem kabinet presidensiil berdasarkan Pancasila. Indonesia dipimpin oleh presiden dibantu wakil presiden dan menteri. Pemerintah di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, di tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota, di tingkat kecamatan oleh camat, dan di tingkat kelurahan/desa oleh lurah/kepala desa.

Desentralisasi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah diwarnai oleh proses demokratisasi dan transparansi. Sistem politik Indonesia didasarkan pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politika). Kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Keanggotaan MPR berubah setelah amandemen UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah kabinet presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung termasuk pengaturan administrasi para hakim.

Susunan pemerintahan Indonesia periode tahun 2009-2014 terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Lembaga Tinggi Negara, Kementerian, Setingkat Menteri, dan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK). Lembaga Tinggi Negara terdiri dari MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Kementerian terdiri dari Kementerian Koordinator, Kementerian, dan Kementerian Negara. Kementerian Koordinator terdiri dari bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam), bidang perekonomian, dan bidang kesejahteraan rakyat. Kementerian terdiri dari 21 lembaga, kementerian negara terdiri dari 10 lembaga. Setingkat Menteri terdiri dari Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI, dan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP4). LPNK terdiri dari 22 lembaga.

## BAB II PENDIDIKAN NASIONAL

### A. Sistem Pendidikan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan pentingnya pendidikan bagi masyarakat seperti tercantum dalam Bab XIII Pasal 31 yang berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang*". Klausul ini merupakan landasan hukum bagi pembangunan pendidikan nasional. Selama ini, kalangan masyarakat masih mempunyai pandangan yang kurang tepat tentang pendidikan, di mana pendidikan sering disamakan dengan sekolah sehingga pengertian tentang kesempatan memperoleh pendidikan sering diartikan sebagai kesempatan untuk bersekolah. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU Nomor 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan terdiri dari 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pada Diagram 2.1 digambarkan hirarki landasan hukum pendidikan nasional.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut UU Nomor 20/2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial, dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berkeinginan untuk maju. Iklim belajar-mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan berorientasi ke masa depan.

## Diagram 2.1 Hirarki Landasan Hukum Sistem Pendidikan Nasional

Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945

*"...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."*

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003)

*"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa..."*

Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1

Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan: Pasal 2, Pasal 3

Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan: Pasal 4

Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah

*Bagian Kesatu: Hak dan Kewajiban Warga Negara: Pasal 5-6*

*Bagian Kedua: Hak dan Kewajiban Orangtua: Pasal 7*

*Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Masyarakat: Pasal 8-9*

*Bagian Keempat: Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah: Pasal 10- 11*

Bab V Peserta Didik: Pasal 12

Bab VI Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan

*Bagian Kesatu: Umum: Pasal 13- 16*

*Bagian Kedua: Pendidikan Dasar: Pasal 17*

*Bagian Ketiga: Pendidikan Menengah: Pasal 18*

*Bagian Keempat: Pendidikan Tinggi: Pasal 19-25*

*Bagian Kelima: Pendidikan Nonformal: Pasal 26*

*Bagian Keenam: Pendidikan Informal: Pasal 27*

*Bagian Ketujuh: Pendidikan Anak Usia Dini: Pasal 28*

*Bagian Kedelapan: Pendidikan Kedinasan: Pasal 29*

*Bagian Kesembilan: Pendidikan Keagamaan: Pasal 30*

*Bagian Kesebelas: Pendidikan Jarak Jauh: Pasal 31*

*Bagian Kesebelas: Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus: Pasal 32*

Bab VII Bahasa Pengantar: Pasal 33

Bab VIII Wajib Belajar: Pasal 34

Bab IX Standar Nasional Pendidikan: Pasal 35

Bab X Kurikulum: Pasal 3- 38

Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pasal 39- 44

Bab XII Sarana dan Prasarana Pendidikan: Pasal 45

Bab XIII Pendanaan Pendidikan

*Bagian Kesatu: Tanggung Jawab Pendanaan: Pasal 46*

*Bagian Kedua: Sumber Pendanaan Pendidikan: Pasal 47*

*Bagian Ketiga: Pengelolaan Dana Pendidikan: Pasal 48*

*Bagian Keempat: Pengalokasian Dana Pendidikan: Pasal 49*

Bab XIV Pengelolaan Pendidikan

*Bagian Kesatu: Umum: Pasal 50-52*

*Bagian Kedua: Badan Hukum Pendidikan: Pasal 53*

Bab XV Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan

*Bagian Kesatu: Umum: Pasal 54*

*Bagian Kedua: Pendidikan Berbasis Masyarakat: Pasal 55*

*Bagian Ketiga: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah: Pasal 56*

Bab XVI Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi

*Bagian Kesatu: Evaluasi: Pasal 57-59*

*Bagian Kedua: Akreditasi: Pasal 60*

*Bagian Ketiga: Sertifikasi: Pasal 61*

Bab XVII Pendirian Satuan Pendidikan: Pasal 62-63

Bab XVIII Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain: Pasal 64-65

Bab XIX Pengawasan: Pasal 66

Bab XX Ketentuan Pidana: Pasal 67-71

Bab XXI Ketentuan Peralihan: Pasal 72- 74

Bab XXII Ketentuan Penutup: Pasal 75- 77



Dalam sistem pendidikan nasional telah ditegaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan secara demokratis dan berkeadilan, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik, pendidikan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, pendidikan memberi keteladanan, pendidikan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung, dan pendidikan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat.

Pendidikan dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan jenis-jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

*Pendidikan dasar* merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), dan bentuk lain yang sederajat. *Pendidikan menengah* merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah umum berbentuk sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) sedangkan pendidikan menengah kejuruan berbentuk sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) serta bentuk lain yang sederajat.

*Pendidikan tinggi* merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis (terdiri dari spesialis I/Sp-I dan spesialis II/Sp-II), dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (PT). Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. PT dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. PT berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PT dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

*Pendidikan nonformal* diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal

meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP).

*Pendidikan Informal* adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan SNP.

PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul athfal atau bustanul athfal (RA/BA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

*Pendidikan kedinasan* merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri sipil (PNS) suatu kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

*Pendidikan keagamaan* diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk

lain yang sejenis.

*Pendidikan jarak jauh* adalah pendidikan yang dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan SNP.

*Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus* merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. *Pendidikan Layanan khusus* merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1997 juga sangat berpengaruh ke dunia pendidikan. Salah satu bentuk reformasi yang dilakukan dalam dunia pendidikan, menyangkut penyelenggaraan pendidikan adalah dikembangkannya apa yang disebut sebagai "*pendidikan berbasis masyarakat*". Pendidikan berbasis masyarakat karena dilaksanakan oleh masyarakat yang berhak menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan SNP. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pengembangan pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kondisi agar setiap lembaga pendidikan mempunyai otonomi yang lebih besar dalam memproduksi sehingga tidak hanya mengandalkan masukan namun juga harus mendasarkan pada proses yang benar. Penilaian benarnya proses ini bukan hanya menjadi wewenang pemerintah namun sebagian besar tergantung pada masyarakat lingkungan lembaga pendidikan tersebut.

*Dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah* mempunyai fungsi yang cukup penting karena masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite

sekolah/madrasah. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Proses belajar-mengajar yang berjalan selama ini bersifat pengajaran harus diubah menjadi proses pembelajaran. Pengajaran lebih bersifat indoktrinatif sehingga para peserta didik tidak berusaha untuk menambah ilmu maupun memperbaiki perilaku namun dengan berbagai cara peserta didik lebih berusaha hanya untuk mengejar nilai dan ijazah. Pembelajaran lebih bersifat menumbuhkan motivasi agar peserta didik tertarik untuk menambah ilmu dan memperbaiki perilaku.

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010--2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan dan kebudayaan di pusat dan di daerah terkait dengan upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang menggambarkan tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

## 1. Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat. Adapun tujuan strategi tersebut adalah:

- a. Tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- b. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- c. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
- d. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.
- e. Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

## 2. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tahun 2010—2014

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010—2014 sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemdiknas selama periode 2005--2009. Kebijakan terobosan yang dilanjutkan adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan penekanan pada periode 2010--2014. Selain itu, juga diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014. Penjelasan dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik
- b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya
- c. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah
- d. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa
- e. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang

- berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
- f. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan
  - g. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK (Teknologi Komunikasi dan Informasi) di bidang pendidikan
  - h. Penyediaan buku teks murah
  - i. Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
  - j. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri
  - k. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal
  - l. Reformasi birokrasi
  - m. Koordinasi antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah serta pusat dan daerah
  - n. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana
  - o. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

### **C. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

#### **1. Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Pembangunan pendidikan nasional diarahkan pada terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi pendidikan dan kebudayaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2025 berhasrat untuk menghasilkan: “INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF” (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

- a. Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara
- b. Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- c. Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri
- d. Setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya, dan
- e. Menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam

pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Misi Kemdikbud 2010--2014 dikemas dalam "Misi 5K", yaitu

- **Ketersediaan**

Meningkatkan *ketersedian* layanan pendidikan, sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infrastruktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

- **Keterjangkauan**

Memperluas *keterjangkauan* layanan pendidikan, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

- **Kualitas**

Meningkatkan *kualitas* dan relevansi layanan pendidikan, sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

- **Kesetaraan**

Mewujudkan *kesetaraan* dalam memperoleh layanan pendidikan, tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

- **Kepastian Jaminan**

Menjamin *kepastian* memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.

## 2. Program Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010—2014

Program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2010—2014 mencakup tiga hal, yaitu restrukturisasi program dan kegiatan Kemdikbud, pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pengelompokan program.

### a. Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemdikbud dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi proyek percontohan untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan surat Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Januari 2009. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan rencana strategis tahun 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Rencana strategis juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Rencana strategis menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan program prioritas nasional melalui reformasi perencanaan dan penganggaran agar diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Sehingga pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan rencana strategis juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Rencana strategis tahun 2010--2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kemdikbud dan Kementerian Agama. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi (APBN). Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya rencana strategis, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

b. Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.



Undang-Undang Nomor 20/2003 menetapkan bahwa Menteri Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

### c. Pengelompokan Program

Mengacu pada strukturisasi program dan kegiatan tersebut, Kemdikbud telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Namun, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, Kemdikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemdikbud menyelenggarakan fungsi: a) perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan; b) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan; c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan; d) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; e) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; f) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; g) pelaksanaan

bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; h) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; i) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan j) pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah:

1. Program pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal;
2. Program pendidikan dasar;
3. Program pendidikan menengah;
4. Program pengembangan SDM pendidikan dan kebudayaan dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Program penelitian dan pengembangan;
6. Program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra;
7. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
8. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur;
9. Program pelestarian budaya.

## BAB III PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

### A. Formal

#### 1. *Penyelenggaraan*

Pada UU Nomor 20/2003 Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

##### a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan dasar dalam bentuk SD dan untuk pendidikan keagamaan khusus Islam diselenggarakan dalam bentuk MI. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 7-12 tahun, dengan lama pendidikan selama 6 tahun.

Pendidikan dasar dalam bentuk SMP dan untuk pendidikan keagamaan khusus Islam diselenggarakan dalam bentuk MTs. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 13-15 tahun yang telah menyelesaikan SD atau MI atau yang sederajat, dengan lama pendidikan selama 3 tahun.

##### b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah

diperuntukkan bagi anak usia 16-18 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dengan lama pendidikan selama 3 tahun.

### c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi ini mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh PT. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. PT memiliki lima bentuk, yaitu 1) akademi, 2) politeknik, 3) sekolah tinggi, 4) institut, dan 5) universitas.

Tabel 3.1  
Skema Karakteristik Sekolah

Jenjang Sekolah		Usia Masuk resmi	Lama pendidikan (tahun)	Syarat kelulusan
Pendidikan Prasekolah	TK Kelompok A	Usia 5	1	-
	TK Kelompok B	Usia 6	1	-
Pendidikan Dasar	SD	Usia 7	6	Menyelesaikan pendidikan 6 tahun
	SMP	Usia 13	3	Menyelesaikan pendidikan 3 tahun
Pendidikan Menengah	SMA	Usia 16	3	Menyelesaikan pendidikan 3 tahun
	SMK	Usia 16	3	Menyelesaikan pendidikan 3 tahun
Pendidikan Luar Biasa	SLB	Sama seperti pada jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK		
Pendidikan Tinggi	Diploma 1/D-1	Usia 19	1	Menyelesaikan 40-50 SKS
	Diploma 2/D-2	Usia 19	2	Menyelesaikan 80-90 SKS
	Diploma 3/D-3	Usia 19	3	Menyelesaikan 110-120 SKS
	Diploma 4/D-4	Usia 19	4	Menyelesaikan 144-160 SKS
	Sarjana/S-1	Usia 19	4 atau lebih	Menyelesaikan 144-160 SKS
	Spesialis 1/Sp-1	Usia 23	2 atau lebih	Menyelesaikan 36-50 SKS
	Magister/S-2	Usia 23	2 atau lebih	Menyelesaikan 36-50 SKS
	Spesialis 2/Sp-2	Usia 25	3 atau lebih	Menyelesaikan 40 SKS
	Doktor/S-3	Usia 25	3 atau lebih	Menyelesaikan 40 SKS

## 2. Kurikulum

Penjelasan kurikulum dirinci menjadi tiga, yaitu latar belakang kurikulum 2013, perbedaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan Kurikulum 2013, kerangka dasar kurikulum, dan struktur kurikulum 2013.

### a. Latar Belakang Kurikulum 2013

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam mengemban fungsi tersebut Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab IX tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi undang-undang tersebut dijabarkan dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 (PP Nomor 19 Thn 2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan beberapa SNP, antara lain standar isi.

Standar isi yang dimaksud oleh PP Nomor 19/2005 tentang SNP secara keseluruhan mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penataan kurikulum 2013 ini adalah salah satu target yang harus diselesaikan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Demi mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke Kurikulum 2013 dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah KTSP dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuat para peserta didik terbebani. Untuk tingkat SD terjadi perubahan yang cukup signifikan pada jumlah mata pelajaran, namun tidak mengurangi jam mengajar. Yang dulunya 10 mata pelajaran dikurangi menjadi 6 mata pelajaran, yaitu 4 mata pelajaran utama (PPKn, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika) dan 2 mata pelajaran muatan lokal (Seni Budaya dan Penjas). KTSP yang memberi keleluasaan terhadap guru membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata belum optimal. Hal ini karena tidak semua guru memiliki profesionalisme untuk membuat kurikulum.

Dari segi materi KTSP lebih berat isi tanpa kompetensi yang jelas, sehingga sistem dalam proses belajar mengajar (PBM) peserta didik harus menunggu guru baru mulai belajar. Proses belajar mengajar ini membuat peserta didik tidak mandiri karena istilah Catat Buku Sampai Abis (CBSA) akan terpola pada peserta didik. Untuk itu, kurikulum 2013 dirancang oleh Kemdikbud terutama untuk bagian yang sangat inti. Dengan demikian, pihak sekolah dan guru tinggal mengaplikasikan saja pola yang sudah dimasukkan dalam struktur kurikulum untuk masing-masing jenjang pendidikan. Menindaklanjuti PP 19 Thn 2005 tersebut, kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 54 Tahun

2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Penetapan Permendikbud ini menjadi tonggak perubahan dari KTSP yang telah diterapkan sejak tahun 2006 menjadi Kurikulum 2013.

#### b. Perbedaan KTSP dengan Kurikulum 2013

Secara substansial, tidak banyak perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dengan KTSP karena Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan dari KTSP. Muatan, target, maupun materi kurikulum sama. Bedanya adalah tidak ada lagi pengaturan secara rinci karena pada KTSP, proses pengembangan silabus adalah kewenangan satuan pendidikan tingkat sekolah, namun dalam Kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan Kemdikbud, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Walaupun kelihatannya terdapat perbedaan yang sangat jauh antara Kurikulum 2013 dan KTSP, namun di balik perbedaan yang ada, terdapat kesamaan esensi. Misalnya pendekatan ilmiah yang pada hakikatnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan Pendekatan Keterampilan Proses (PKP).

Di lihat dari segi kompetensi pada KTSP, Standar Isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 kemudian ditentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) melalui Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006. Pada Kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu, melalui Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 kemudian ditentukan Standar Isi berbentuk Kerangka Dasar Kurikulum (KDK) yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Selain itu, kompetensi siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP. Sedangkan pada Kurikulum 2013, kompetensi antara siswa SMA dan SMK serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Dari segi materi pelajaran KTSP, setiap mata pelajaran dalam KTSP berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi dari sebelas mata pelajaran. Pada Kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan ilmiah, yaitu peserta didik mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Setiap mata pelajaran saling terkait dan mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total, ada enam hingga tujuh mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu, mata pelajaran bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Sedangkan dalam Kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dan pembawa pengetahuan.

Begitu juga dengan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi, dan Konfirmasi. Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan dengan pendekatan ilmiah (scientific approach), yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

Dalam proses belajar mengajar, KTSP menerapkan skema tematik pada kelas satu hingga tiga SD. Sedangkan pada Kurikulum 2013, pola Tematik Terpadu ini diterapkan di kelas satu hingga enam. Pemintaan (Penjurusan) mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA. Sedangkan penjurusan pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas XI. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat rinci. Pada Kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, peminatan, antarminat, dan pendalaman minat. Pada SMK, penjurusan tidak terlalu detil hingga bidang studi. Penjurusan di SMK meliputi pengelompokan peminatan dan pendalaman.

Proses penilaian dalam penerapan KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada Kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar mengajar siswa. Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penerapan ekstrakurikuler pada KTSP, kegiatan pramuka tidak diwajibkan. Sedangkan pramuka diwajibkan dalam Kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi geografis, jenjang pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum 2013 meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

### c. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum 2013 mencakup kompetensi dasar, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan.

#### 1) Kerangka Dasar Kurikulum

Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang SNP pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas lima kelompok, yaitu 1) mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2) mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 3) mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) mata pelajaran estetika; dan 5) mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri. Kelompok



mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

## 2) Struktur Kurikulum

### a) Struktur Kurikulum Pendidikan Umum

Struktur kurikulum mencerminkan desain dari konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum juga gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai kompetensi peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran dalam satu jenjang pendidikan.

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, dan beban belajar. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam Tabel 3.2 struktur kurikulum SD/MI.

- Struktur Kurikulum SD/MI

Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran ditempuh dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar di SD/MI ditentukan dengan durasi 35 menit untuk satu jam pembelajaran. Kelas I, 30 jam, kelas II, 32 jam, dan kelas III, 34 jam, serta kelas IV, V, dan VI, 36 jam pelajaran.

Beban belajar di Kelas I, II, III, IV, dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu, pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

Jumlah jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran sifatnya relatif karena di SD/MI menerapkan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu. Guru dapat mengatur jam pelajaran per minggu sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.

Tabel 3.2  
Struktur Kurikulum SD/MI

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	6	5	5	5
3.	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7
4.	Matematika	5	6	6	6	6	6
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	4	4	4	4	4	4
Jumlah		30	32	34	36	36	36

- Struktur Kurikulum SMP/MTs

Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu dengan durasi 40 menit. Beban belajar di Kelas VII, VIII, dan IX dalam satu semester minimal 18 minggu dan maksimal 20 minggu. Beban belajar di kelas IX pada semester ganjil minimal 18 minggu maksimal 20 minggu, pada semester genap minimal 14 minggu, maksimal 16 minggu. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran minimal 36 minggu dan maksimal 40 minggu. Namun, masih dimungkinkan bagi sekolah untuk menambah jam pelajaran sesuai kebutuhan. Guru dapat mengatur jam pelajaran per minggu sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian kompetensi.

Tabel 3.3  
Struktur Kurikulum SMP/MTs

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya (termasuk muatan lokal)	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3.	Prakarya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
Jumlah		38	38	38

- Struktur Kurikulum SMA/MA

Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (sembilan) mata pelajaran. Konten Kompetensi Isi (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan kemasannya serta label konten (mata pelajaran) untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai minatnya. Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik (SMA) serta pilihan akademik dan vokasional (SMK). Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada

fungsi satuan pendidikan dan didalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik.

Beban belajar di SMA ada penambahan jam belajar sebesar 4-6 jam per minggu. Kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar. Kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. Dengan adanya penambahan jam belajar dan pengurangan jumlah Kompetensi Dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi. Hal ini karena peserta didik perlu latihan untuk melakukan mengamati, menanya, mengasosiasi, dan berkomunikasi.

Pengorganisasian kelas pada SMA/MA dibagi dalam dua kelompok, yaitu 1) kelas X merupakan program wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik, 2) kelas XI dan XII merupakan program Peminatan (penjurusan) yang terdiri atas tiga program, yaitu 1) Peminatan Matematika dan Sains, 2) Peminatan Sosial, dan 3) Peminatan Bahasa. Kelompok mata pelajaran program peminatan ini bertujuan (1) untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai minat keilmuannya di perguruan tinggi, dan (2) untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu.

Tabel 3.4  
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X  
Program Wajib

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
<b>Kelompok A (Wajib)</b>				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
<b>Kelompok B (Wajib)</b>				
7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		2	2	2
<b>Kelompok C (Peminatan)</b>				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)		18	20	20
<b>Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu</b>		<b>44</b>	<b>46</b>	<b>46</b>

Keterangan: Mata pelajaran Seni Budaya dapat memuat Bahasa Daerah

Tabel 3.5  
Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII  
Program Peminatan

MATA PELAJARAN			ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
			X	XI	XII
Kelompok A dan B (Wajib)			24	24	24
<b>C. Kelompok Peminatan</b>					
Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam					
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial					
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya					
II	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	3	4	4
	4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman					
		Pilihan Lintas Minat dan atau Pendahlaman Minat	6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran yang Tersedia per Minggu			66	76	76
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh per Minggu			42	44	44

b) Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.

Mata pelajaran SMK/MAK dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu 1) mata pelajaran umum Kelompok A, 2) mata pelajaran umum Kelompok B, dan 3) mata pelajaran peminatan kejuruan Kelompok C. Mata pelajaran umum Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Kelompok C merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dalam bidang, program, dan paket kejuruan.


Mata pelajaran wajib mencakup 9 mata pelajaran dengan belajar 24 jam

per minggu. Kelompok A terdiri dari 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Matematika, 5) Sejarah Indonesia, dan 6) Bahasa Inggris. Kelompok B terdiri dari 1) Seni Budaya, 2) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, dan 3) Prakarya dan Kewirausahaan. Mata pelajaran dasar bidang kejuruan meliputi Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Agribisnis dan Agroteknologi, Perikanan dan Kelautan, Bisnis dan Manajemen, Parawisata, Seni Rupa dan Kriya, dan Seni Pertunjukan. Mata pelajaran dasar program kejuruan merupakan muatan-substantif pengikat yang berfungsi sebagai fokus utama dari program kejuruan tersebut.

Beban belajar adalah 48 jam pelajaran per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit. Beban belajar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) yang diatur lebih lanjut dalam aturan tersendiri.


Tabel 3.6  
Mata Pelajaran Umum SMK/MAK  
(Tiga Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
<b>Kelompok A (Wajib)</b>				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
<b>Kelompok B (Wajib)</b>				
7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		24	24	24
<b>Kelompok C (Peminatan)</b>				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK/MAK)		24	24	24
<b>JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

 Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

Tabel 3.7  
Mata Pelajaran Umum SMK/MAK  
(Empat Tahun)

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU			
		X	XI	XII	XIII
<b>Kelompok A (Wajib)</b>					
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2	2
<b>Kelompok B (Wajib)</b>					
7.	Seni Budaya	2	2	2	2
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3	3
9.	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu		24	24	24	24
<b>Kelompok C (Peminatan)</b>					
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK/MAK)		24	24	24	24
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU		48	48	48	48

 Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan di satuan pendidikan dan/atau industri (terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan) dengan Portofolio sebagai instrumen utama penilaian.

Materi pembelajaran dasar kompetensi kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian untuk memenuhi standar kompetensi kerja di dunia kerja. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir penyelesaian satu standar kompetensi atau beberapa penyelesaian kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktek di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 48 minggu dalam satu tahun pelajaran. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian.

#### c) Struktur Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus

Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1) peserta didik berkelainan

tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan 2) peserta didik berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata.

Kurikulum pendidikan khusus terdiri atas 8 sampai 10 mata pelajaran, muatan lokal, program khusus, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Program khusus berisi kegiatan yang bervariasi sesuai dengan jenis ketunaannya, yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra, bina komunikasi persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu, bina diri untuk peserta didik tunagrahita, bina gerak untuk peserta didik tunadaksa, dan bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras.

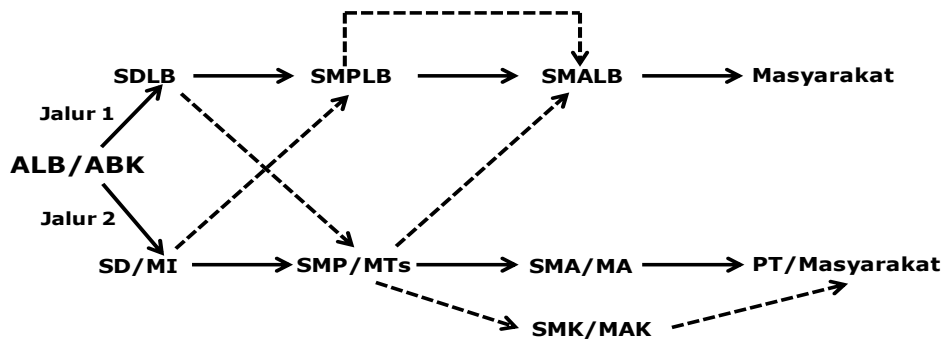
Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dalam batas tertentu masih dimungkinkan dapat mengikuti kurikulum standar meskipun harus dengan penyesuaian. Peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, diperlukan kurikulum yang sangat spesifik, sederhana dan bersifat tematik untuk mendorong kemandirian dalam hidup sehari-hari. Peserta didik berkelainan tanpa disertai kemampuan intelektual di bawah rata-rata, yang berkeinginan untuk melanjutkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi, semaksimal mungkin didorong untuk dapat mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan umum sejak SD. Jika peserta didik mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SDLB, setelah lulus, didorong untuk dapat melanjutkan ke SMP. Bagi mereka yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, setelah menyelesaikan pada jenjang SDLB dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMPLB, dan SMALB.

Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memerlukan pindah jalur pendidikan antarsatuan pendidikan yang setara sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 20/2003 maka mekanisme pendidikan bagi peserta didik melalui jalur formal dilukiskan pada bagan berikut.



Bagan 3.1  
Mekanisme Pendidikan untuk Peserta Didik melalui Jalur Formal  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2003



Struktur kurikulum satuan pendidikan khusus dikembangkan dengan memperhatikan 12 variabel berikut ini.

1. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB A=tunanetra, B=tunarungu, D=tunadaksa ringan, E=tunalaras; SMPLB A, B, D, E; dan SMALB A, B, D, E.
2. Kurikulum untuk peserta didik berkelainan yang disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, menggunakan sebutan Kurikulum SDLB C=tunagrahita ringan, C1=tunagrahita sedang, D1=tunadaksa sedang, G=tunaganda; SMPLB C, C1, D1, G, dan SMALB C, C1, D1, G.
3. Kurikulum satuan pendidikan SDLB A, B, D, E relatif sama dengan kurikulum SD umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E dan SMALB A, B, D, E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
4. Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E terdiri atas 60%--70% aspek akademik dan 40%--30% berisi aspek keterampilan vokasional. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40%--50% aspek akademik dan 60%--50% aspek keterampilan vokasional.
5. Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G, dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual.
6. Pembelajaran untuk satuan pendidikan khusus SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G menggunakan pendekatan tematik.

7. Standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran umum SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, E mengacu pada SK dan KD sekolah umum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik, dikembangkan oleh BSNP, sedangkan SK dan KD untuk mata pelajaran program khusus, dan keterampilan dikembangkan oleh satuan pendidikan khusus dengan memperhatikan jenjang dan jenis satuan pendidikan.
8. Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan pada satuan pendidikan khusus yang bersangkutan dengan memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikan.
9. Struktur kurikulum pada satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB mengacu pada struktur kurikulum SD dan SMP dengan penambahan program khusus sesuai jenis kelainan, dengan alokasi waktu 2 jam/minggu. pada jenjang SMALB, program khusus bersifat kasuistik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik tertentu, dan tidak dihitung sebagai beban belajar.
10. Program khusus sesuai jenis kelainan peserta didik meliputi:
  - a. Orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra.
  - b. Bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama untuk peserta didik tunarungu.
  - c. Bina diri untuk peserta didik tunagrahita ringan dan sedang.
  - d. Bina gerak untuk peserta didik tunadaksa ringan.
  - e. Bina pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras.
  - f. Bina diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa sedang, dan tunaganda.
11. Jumlah dan alokasi waktu jam pembelajaran diatur sebagai berikut.
  - a. Jumlah jam pembelajaran SDLB A, B, D, E kelas I sampai III berkisar antara 28–30 jam pembelajaran/minggu dan 34 jam pembelajaran/minggu untuk kelas IV sampai VI. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SD umum karena ada tambahan mata pelajaran program khusus.
  - b. Jumlah jam pembelajaran SMPLB A, B, D, E kelas VII, VIII, IX adalah 34 jam/minggu. Kelebihan 2 jam pembelajaran dari SMP umum karena ada penambahan mata pelajaran program khusus.
  - c. Jumlah jam pembelajaran SMALB A, B, D, E kelas X, XI, XII adalah 36 jam/minggu, sama dengan jumlah jam pembelajaran SMA umum. Program khusus pada jenjang SMALB bersifat fakultatif dan tidak termasuk beban pembelajaran.
  - d. Jumlah jam pembelajaran SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G sama dengan jumlah jam pembelajaran pada SDLB, SMPLB, SMALB A, B, D, E, tetapi penyajiannya melalui pendekatan tematik.
  - e. Alokasi per jam pembelajaran untuk SDLB, SMPLB dan SMALB A, B, D, E maupun C, C1, D1, G masing-masing 30 menit, 35 menit dan 40

menit. Selisih 5 menit dari sekolah reguler karena disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkelainan.

- f. Satuan pendidikan khusus SDLB dan SMPLB dapat menambah maksimum 6 jam pembelajaran/minggu untuk keseluruhan jam pembelajaran, dan 4 jam pembelajaran untuk tingkat SMALB sesuai kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.8  
Struktur Kurikulum SDLB Tunanetra (SDLB/A)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
		I	II	III	IV, V, & VI
A	Mata Pelajaran				
1	Pendidikan Agama				3
2	Pendidikan Kewarganegaraan				2
3	Bahasa Indonesia				5
4	Matematika				5
5	Ilmu Pengetahuan Alam				4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7	Seni Budaya dan Keterampilan				4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				4
B	Muatan Lokal				2
C	Program Khusus Orientasi & Mobilitas				2
D	Pengembangan Diri *)				2 *)
	Jumlah	28	29	30	34

Catatan: \*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 3.9  
Struktur Kurikulum SDLB Tunarungu (SDLB/B)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
		I	II	III	IV, V, & VI
A	Mata Pelajaran				
1	Pendidikan Agama				3
2	Pendidikan Kewarganegaraan				2
3	Bahasa Indonesia				5
4	Matematika				5
5	Ilmu Pengetahuan Alam				4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7	Seni Budaya dan Keterampilan				4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan				4
B	Muatan Lokal				2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas				2
D	Pengembangan Diri *)				2 *)
	Jumlah	28	29	30	34

Catatan: \*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

12. Muatan isi pada setiap mata pelajaran:
  - a. Untuk SDLB A, B, D, E pada dasarnya sama dengan SD umum, tetapi karena kelainan dan kebutuhan khususnya sehingga diperlukan modifikasi dan/atau penyesuaian secara terbatas.
  - b. Pada program khusus disusun tersendiri oleh satuan pendidikan.
  - c. Pada SMPLB A, B, D, E bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMP umum sehingga menjadi sekitar 60%–70%. Sisanya sekitar 40%–30% muatan isi kurikulum ditekankan pada bidang keterampilan vokasional.
  - d. Pada keterampilan vokasional meliputi tingkat dasar, tingkat

terampil dan tingkat mahir. Jenis keterampilan yang akan dikembangkan, diserahkan pada satuan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan.

- e. Pada SMALB A, B, D, E bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA umum sehingga menjadi sekitar 40%—50% bidang akademik dan sekitar 60%—50% bidang keterampilan vokasional.
- f. Pada muatan kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G lebih ditekankan pada kemampuan menolong diri sendiri dan keterampilan sederhana yang memungkinkan untuk menunjang kemandirian peserta didik sehingga muatan keterampilan vokasional lebih diutamakan.

Tabel 3.10  
Struktur Kurikulum SDLB Tunadaksa (SDLB/D)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
		I	II	III	IV, V, & VI
A	Mata Pelajaran				
1	Pendidikan Agama				3
2	Pendidikan Kewarganegaraan				2
3	Bahasa Indonesia				5
4	Matematika				5
5	Ilmu Pengetahuan Alam				4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7	Seni Budaya dan Keterampilan				4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B	Muatan Lokal				2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas				2
D	Pengembangan Diri *)				2 *)
	Jumlah	28	29	30	34

Catatan: \*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 3.11  
Struktur Kurikulum SDLB Tunalaras (SDLB/E)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
		I	II	III	IV, V, & VI
A	Mata Pelajaran				
1	Pendidikan Agama				3
2	Pendidikan Kewarganegaraan				2
3	Bahasa Indonesia				5
4	Matematika				5
5	Ilmu Pengetahuan Alam				4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7	Seni Budaya dan Keterampilan				4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B	Muatan Lokal				2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas				2
D	Pengembangan Diri *)				2 *)
	Jumlah	28	29	30	34

Catatan: \*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.12**  
**Struktur Kurikulum SMPLB Tunanetra (SMPLB/A)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	3
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi*)	10	10	10
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas	2	2	2
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	34	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.13**  
**Struktur Kurikulum SMPLB Tunarungu (SMPLB/B)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	3
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	10	10	10
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Bina Komu-nikasi, Persepsi Bunyi & Irama	2	2	2
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	34	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.14**  
**Struktur Kurikulum SMPLB Tunadaksa SMPLB/D)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	3
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	10	10	10
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Bina Gerak	2	2	2
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	34	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.15**  
**Struktur Kurikulum SMPLB Tunalaras (SMPLB/E)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	3	3	3
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	3	3	3
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	10	10	10
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Bina Pribadi dan Sosial	2	2	2
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	34	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.16**  
**Struktur Kurikulum SMALB Tunanetra (SMALB/A)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		X	XI	XII
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	2	2	2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	16	16	16
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas	-	-	-
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	36	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.17**  
**Struktur Kurikulum SMALB Tunarungu (SMALB/B)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		X	XI	XII
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	2	2	2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	16	16	16
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas	-	-	-
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	36	36	36

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.18**  
**Struktur Kurikulum SMALB Tunadaksa (SMALB/D)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		X	XI	XII
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	2	2	2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	16	16	16
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas	-	-	-
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	36	36	36

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.19**  
**Struktur Kurikulum SMALB Tunalaras (SMALB/E)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama	2	2	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	2	2	2
4	Bahasa Inggris	2	2	2
5	Matematika	2	2	2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
8	Seni Budaya	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Orkes	2	2	2
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	16	16	16
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus Orientasi dan Mobilitas	-	-	-
D	Pengembangan Diri	2**)	2**)	2**)
	Jumlah	36	36	36

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 3.20**  
**Struktur Kurikulum SDLB**  
**Tunagrahita Ringan (SDLB/C), Tunagrahita Sedang (SDLB/C1),**  
**Tunadaksa Sedang (SDLB/D1), dan Tunaganda (SDLB/G)**

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu	
		I, II, dan III	IV, V, dan VI
A	Mata Pelajaran		
1	Pendidikan Agama	29 - 32 (Pendekatan Tematik)	30 (Pendekatan Tematik)
2	Pendidikan Kewarganegaraan		
3	Bahasa Indonesia		
4	Matematika		
5	Ilmu Pengetahuan Alam		
6	Ilmu Pengetahuan Sosial		
7	Seni Budaya dan Keterampilan		
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan		
B	Muatan Lokal		2
C	Program Khusus *)		2
D	Pengembangan Diri		2 **)
	Jumlah	29 - 32	34

Catatan: \*) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan peserta didik  
\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

Struktur kurikulum satuan pendidikan khusus tingkat SDLB, SMPLB, dan SMALB C, C1, D1, dan G merupakan satu rumpun yang relatif sama antara satu jenis kelainan dengan jenis kelainan yang lain.

Tabel 3.21  
Struktur Kurikulum SMPLB  
Tunagrahita Ringan (SMPLB/C), Tunagrahita Sedang (SMPLB/C1),  
Tunadaksa Sedang (SMPLB/D1), dan Tunaganda (SMPLB/G)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		VII	VIII	IX
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama			
2	Pendidikan Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Bahasa Inggris			
5	Matematika			
6	Ilmu Pengetahuan Sosial			
7	Ilmu Pengetahuan Alam			
8	Seni Budaya			
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	20	20	20
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus **)	2	2	2
D	Pengembangan Diri	2***)	2***)	2***)
	Jumlah	34	34	34

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan peserta didik  
\*\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

Tabel 3.22  
Struktur Kurikulum SMALB  
Tunagrahita Ringan (SMALB/C), Tunagrahita Sedang (SMALB/C1), Tunadaksa  
Sedang (SMALBD1), dan Tunaganda (SMALB/G)

No.	Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
		X	XI	XII
A	Mata Pelajaran			
1	Pendidikan Agama			
2	Pend. Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia			
4	Bahasa Inggris			
5	Matematika			
6	Ilmu Pengetahuan Sosial			
7	Ilmu Pengetahuan Alam			
8	Seni Budaya			
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan			
10	Keterampilan Vokasional/ Teknologi Informasi dan Komunikasi *)	24	24	24
B	Muatan Lokal	2	2	2
C	Program Khusus **)	-	-	-
D	Pengembangan Diri	2***)	2***)	2***)
	Jumlah	36	36	36

Catatan: \*) Keterampilan vokasional/teknologi informasi dan komunikasi merupakan paket pilihan, Jenis keterampilan vokasional/teknologi informasi yang dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai potensi daerah  
\*\*) Disesuaikan dengan kelainan dan kebutuhan peserta didik  
\*\*\*) ekuivalen 2 jam pembelajaran

#### d) Struktur Kurikulum Program Paket A, Paket B dan Paket C

Struktur kurikulum program paket A, paket B, dan paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).

Susunan mata pelajaran program paket A, paket B, dan paket C terdiri



atas berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga, dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional dan pengembangan kepribadian profesional.

Beban belajar program paket A, paket B, dan paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran=35 menit untuk paket A, 40 menit untuk paket B, dan 45 menit untuk paket C.

Struktur kurikulum program paket A, paket B, dan paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program paket A, paket B, dan paket C, yaitu

- a) Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b) Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- c) Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Muatan lokal merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan.

Pengembangan kepribadian profesional merupakan kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola potensi, bakat, minat, prakarsa, kemandirian, tindakan, dan waktu secara profesional sesuai tujuan dan kebutuhan, yang dapat dilakukan antara lain melalui pelayanan konseling.

Kemampuan olahhati dan olahrasa termasuk estetika dikembangkan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program paket A, paket B dan

paket C (IPA, IPS, dan Bahasa) sebagaimana tersaji pada Tabel 3.29-3.33.

Tabel 3.23

Struktur Kurikulum Paket A

No.	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I-III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar Setara Kelas IV-VI	Jumlah
1	Pendidikan Agama	9	9	18
2	Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3	Bahasa Indonesia	15	15	30
4	Matematika	15	15	30
5	Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7	Seni Budaya	6	6	12
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9	Keterampilan Fungsional *)	9	9	18
10	Muatan Lokal **)	6**)	6**)	12**)
11	Pengembangan Kepribadian Profesional	6	6	12
Jumlah		102	102	204

Catatan: \*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.

SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.24

Struktur Kurikulum Paket B

No.	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah
1	Pendidikan Agama	4	2	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3	Bahasa Indonesia	8	4	12
4	Bahasa Inggris	8	4	12
5	Matematika	8	4	12
6	Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8	Seni Budaya	4	2	6
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10	Keterampilan Fungsional *)	4	2	6
11	Muatan Lokal **)	4**)	2**)	6**)
12	Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah		68	34	102

Catatan: \*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.

SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.25

Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)

No.	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3	Bahasa Indonesia	4	8	12
4	Bahasa Inggris	4	8	12
5	Matematika	4	8	12
6	Fisika	2	8	10
7	Kimia	2	8	10
8	Biologi	2	8	10
9	Sejarah	1	2	3
10	Geografi	1	-	1
11	Ekonomi	2	-	2
12	Sosiologi	2	-	2
13	Seni Budaya	2	4	6
14	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15	Keterampilan Fungsional *)	4*)	8*)	12*)
16	Muatan Lokal **)	2**)	4**)	6**)
17	Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah		40	82	122

Catatan: \*) Pilihan mata pelajaran

\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.

SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.26  
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)

No.	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3	Bahasa Indonesia	4	8	12
4	Bahasa Inggris	4	8	12
5	Matematika	4	8	12
6	Fisika	2	-	2
7	Kimia	2	-	2
8	Biologi	2	-	2
9	Sejarah	1	3	4
10	Geografi	1	7	8
11	Ekonomi	2	8	10
12	Sosiologi	2	8	10
13	Seni Budaya	2	4	6
14	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15	Keterampilan Fungsional *)	4*)	8*)	12*)
16	Muatan Lokal **)	2**)	4**)	6**)
17	Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
	Jumlah	40	82	122

Catatan: \*) Pilihan mata pelajaran  
\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.  
SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3.27  
Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)

No.	Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1	Pendidikan Agama	2	4	6
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3	Bahasa Indonesia	4	10	14
4	Bahasa Inggris	4	10	14
5	Matematika	4	6	10
6	Fisika	2	-	2
7	Kimia	2	-	2
8	Biologi	2	-	2
9	Sejarah	1	4	5
10	Geografi	1	-	1
11	Ekonomi	2	-	2
12	Sosiologi	2	-	2
13	Antropologi	-	4	4
14	Sastra Indonesia	-	8	8
15	Bahasa Asing	-	8	8
16	Seni Budaya	2	4	6
17	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
18	Keterampilan Fungsional *)	4*)	8*)	12*)
19	Muatan Lokal **)	2**)	4**)	6**)
20	Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
	Jumlah	40	82	122

Catatan: \*) Pilihan mata pelajaran  
\*\*) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.  
SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

#### d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mengatur dua variabel, yaitu (a) standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan; (b) standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester.

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) meliputi:

- 1) SD/MI/SDLB/Paket A;
- 2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
- 3) SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/Paket C;

SKL-SP dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Pendidikan dasar yang terdiri atas SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

SKL-SP selengkapnya menurut satuan pendidikan disajikan berikut ini.

- 1) SD/MI/SDLB/Paket A
  - Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.
  - Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
  - Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.
  - Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.
  - Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.
  - Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik.
  - Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.
  - Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
  - Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.
  - Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
  - Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.
  - Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.
  - Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan

memanfaatkan waktu luang.

- Berkomunikasi secara jelas dan santun.
- Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
- Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.
- Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

## 2) SMP/MTs/SMPLB/Paket B

- Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja.
- Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
- Menunjukkan sikap percaya diri.
- Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas.
- Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional.
- Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif.
- Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
- Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
- Mendeskripsi gejala alam dan sosial.
- Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.
- Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
- Menghargai karya seni dan budaya nasional.
- Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya.
- Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.
- Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun.
- Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- Menghargai adanya perbedaan pendapat.
- Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana.
- Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana.

- Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah.

### 3) SMA/MA/SMALB/Paket C

- Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.
- Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
- Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
- Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
- Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
- Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
- Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
- Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
- Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.
- Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
- Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
- Mengapresiasi karya seni dan budaya.
- Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.
- Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.
- Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
- Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
- Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
- Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

- Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi.

#### 4) SMK/MAK

- Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja.
- Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.
- Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.
- Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.
- Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global.
- Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
- Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
- Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri.
- Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks.
- Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.
- Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.
- Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.
- Mengapresiasi karya seni dan budaya.
- Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.
- Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan.
- Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.
- Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain.
- Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis.
- Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

- Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan kejuruannya.

e. Beban Belajar dan Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau SKS. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan.

Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan SKS. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan SKS.

Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut.

1. SD sederajat berlangsung selama 35 menit, dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu: (a) kelas I sampai dengan III adalah 29 sampai dengan 32 jam pembelajaran dan (b) kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran.
2. SMP atau yang sederajat berlangsung selama 40 menit, dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu sebanyak 34 jam pembelajaran.
3. SMA atau yang sederajat berlangsung selama 45 menit, dengan jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu sebanyak 38 sampai dengan 39 jam pembelajaran.



Waktu untuk beban penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur berlaku ketentuan sebagai berikut.:

1. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SD atau yang sederajat maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP atau yang sederajat maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA atau yang sederajat maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

**Tabel 3.28**  
**Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka Keseluruhan untuk**  
**Setiap Satuan Pendidikan**

Satuan Pendidikan	Kelas	Satu jam pemb. tatap muka (menit)	Jumlah jam pemb. per minggu	Minggu efektif per tahun ajaran	Waktu pembelajaran per tahun	Jumlah jam per tahun (@ 60 menit)
SD/MI/ SDLB*)	I s.d III	35	26-28	34-38	884-1.064 jam pembelajaran (30.940-37.240 menit)	516-621
	IV sd. VI	35	32	34-38	1.088-1.216 jam pembelajaran (38.080-42.560 menit)	635-709
SMP/MTs/ SMPLB*)	VII s.d XII	40	32	34-38	1.088-1.216 jam pembelajaran (43.520-48.640 menit)	725-811
SMA/MA/ SMALB*)	X s.d. XII	45	38-39	34-38	1.292-1.482 jam pembelajaran (58.140-66.690 menit)	969-1.111,5
SMK/MAK	X s.d. XII	45	36	38	1.368 jam pelajaran (61.560 menit)	1.026 (standar minimum)

Catatan: \*) untuk SDLB, SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri dari waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 1) bagi peserta didik pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan; 2) bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan; dan 3) bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket adalah enam tahun untuk SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Tabel 3.29  
Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

No.	Kegiatan	Alokasi waktu	Keterangan
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3	Jeda antarsemester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5	Hari libur keagamaan	2-4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6	Hari libur umum/ nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

Penetapan kalender pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- 2) Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- 4) Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.

f. Pelaksanaan Kurikulum 2013

Dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, sekolah tetap berwenang mengembangkan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Dalam menyusun KTSP, pihak sekolah dapat mengacu pada Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan KTSP pada Lampiran I Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum. KTSP yang dibuat oleh pihak sekolah berisi 2 muatan kurikulum, yaitu kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Ketika semua kelas sudah menerapkan kurikulum 2013 maka muatan kurikulum di KTSP hanya memuat kurikulum 2013.

Sehubungan dengan pengembangan KTSP di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan

Dasar dan Menengah. Khusus untuk pengembangan KTSP kurikulum 2013 perlu diperhatikan komponen KTSP meliputi 3 dokumen sebagai berikut.:

- 1) Dokumen 1 berisi minimal visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan.
- 2) Dokumen 2 berisi silabus, dan
- 3) Dokumen 3 KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar.

Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Permendiknas Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dan Permendiknas Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah paling lambat tahun ajaran 2013/2014.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- 2) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhan-an, keindividualan, kesosialan, dan moral.
- 4) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) belajar untuk memahami dan menghayati, c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- 5) Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

- 6) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
- 7) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, ing ngarso sung tulado* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
- 8) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
- 9) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

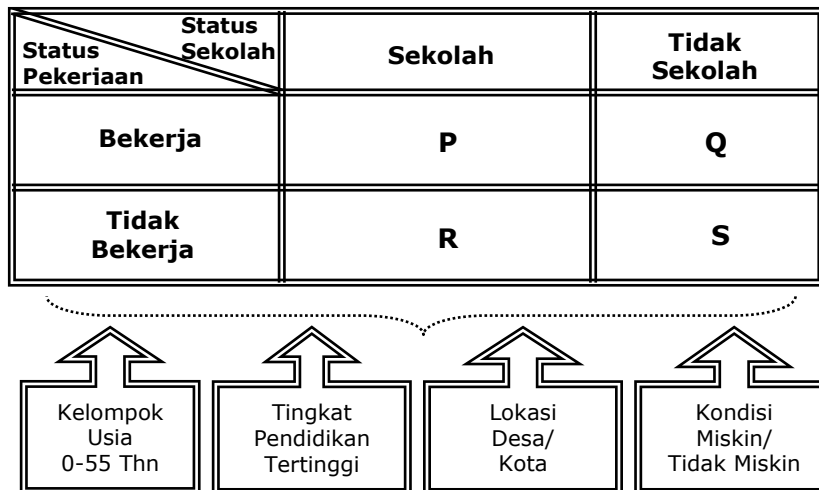
## **B. Nonformal**

*Asian Development Bank (ADB)* menegaskan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesetaraan, pengembangan, dan kedamaian. Dalam program Persatuan Bangsa Bangsa yang bertajuk *Millenium Development Goals (MDGs)* dinyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang yang digambarkan dalam *Education for All (EFA)* atau pendidikan untuk Semua (PUS). Demi mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus bisa diakses oleh semua orang tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, gender, umur, agama, suku, dan penanda lainnya. Pendidikan tidak boleh bersifat diskriminatif. Akan tetapi, berbagai kondisi kesulitan hidup membuat sebagian orang tidak mampu mengecap pendidikan. Salah satu alternatif yang ditawarkan Kemdikbud untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah jalur pendidikan nonformal.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Layanan itu bisa berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Penyelenggaraan pendidikan nonformal diarahkan pada peningkatan kecakapan hidup untuk membentuk sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan mandiri.

Berbeda dengan objek garapan jalur pendidikan formal, objek garapan jalur pendidikan nonformal merupakan kombinasi/perpaduan dari enam variabel, yaitu 1) kelompok usia penduduk; 2) kelompok status sekolah/tidak sekolah; 3) kelompok status bekerja/tidak bekerja; 4) kelompok tingkat pendidikan tertinggi; 5) kelompok desa/kota; dan 6) kelompok miskin/tidak miskin. Objek garapan ini digambarkan pada Diagram 4.2.

Diagram 3.1  
Obyek Garapan Pendidikan Nonformal



Berdasarkan ketentuan, penduduk usia 0--15 tahun tergolong penduduk yang tidak bekerja, sehingga termasuk dalam kelompok tidak bekerja bisa **R** (sekolah) atau **S** (tidak sekolah), sedangkan penduduk usia 0--6 tahun tergolong penduduk yang tidak bekerja dan juga tidak sekolah. Hal ini berarti bahwa penduduk usia 0--6 tahun termasuk kelompok **S**. Pemerintah mengharapkan agar penduduk usia 7--15 tahun harus masuk dalam kelompok **R**. Mengingat belum semua anak kelompok usia tersebut berada pada kelompok yang seharusnya, Pemerintah melaksanakan program pendidikan nonformal untuk memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan.

## 1. Pendidikan Anak Usia Dini

Usia dini (0-6 thn) merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan keperibadian seorang anak serta pengembangan intelegensi permanen untuk menyerap informasi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya PAUD, yaitu 1) tujuan utama dan 2) tujuan penyerta. Tujuan utama adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Tujuan penyerta adalah untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. PAUD terdiri dari : a) taman kanak-kanak, b) taman penitipan anak, c) kelompok bermain, d) satuan pendidikan anak usia dini sejenis, dan e) pendidikan anak usia dini informal

## 2. Kursus dan Pelatihan

Kursus sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sumber daya yang terampil dan profesional. Sesuai dengan UU Nomor 30/2003 pasal 26 lembaga kursus dan lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 103, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat dalam rangka untuk

mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus dan program yang dapat diselenggarakan antara lain sebagai berikut.

- a. Pendidikan kecakapan hidup;
- b. Pendidikan kepemudaan;
- c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- d. Pendidikan keaksaraan;
- e. Pendidikan keterampilan kerja;
- f. Pendidikan kesetaraan dan/atau;
- g. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Rencana strategis Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam pembinaan dan pengembangan kursus dan pelatihan dibagi menjadi 3 terminal besar yang terdiri dari:

1. 2010–2013: penguatan produk terhadap program layanan dan lembaga kursus dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik ataupun *stakeholder* terhadap dunia kursus dan pelatihan sebagai salah satu pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal.
2. 2013–2015: pengembangan layanan program dan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan dalam rangka memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan jaminan akan kursus dan pelatihan telah merata di seluruh Indonesia.
3. 2015–2017: persiapan kursus dan pelatihan dapat berkompetisi di kancah Internasional dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan adalah pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM), dan desa vokasi. Penyelenggaraan program PKH merupakan upaya nyata untuk mendidik dan melatih warga masyarakat agar menguasai bidang-bidang keterampilan tertentu sesuai dengan kebutuhan, bakat-minat, dan peluang kerja/usaha mandiri yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja baik di sektor formal maupun informal sesuai dengan peluang kerja (*job opportunities*) atau usaha mandiri. Misi dari program PKH adalah; 1) mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan/pedesaan, 2) memberdayakan masyarakat perkotaan/pedesaan, 3) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna potensi dan peluang kerja yang ada, serta 4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kursus dan pelatihan sehingga memiliki bekal untuk bekerja atau usaha mandiri. Adapun sasaran penyelenggaraan program PKH ada empat, yaitu 1) diprioritaskan bagi masyarakat usia 16-44 tahun yang tidak sekolah dan tidak bekerja, 2) warga belajar binaan SKB atau warga masyarakat putus atau tamat SD/SMP, 3) berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, dan 4) memiliki minat dan bakat tertentu.

Program PKM dilaksanakan untuk penguatan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kemampuan dalam rangka menumbuhkan jiwa



kewirausahaan untuk mengurangi pengangguran serta mendorong kemajuan ekonomi baik bagi perorangan, masyarakat, maupun negara.

Program desa vokasi dimaksudkan untuk mengembangkan sumberdaya manusia dan lingkungan yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Melalui program desa vokasi ini diharapkan dapat membentuk kawasan desa yang menjadi sentra beragam vokasi dan terbentuknya kelompok-kelompok usaha yang memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Program desa vokasi merupakan wujud implementasi program PKH dan kewirausahaan dalam spektrum perdesaan dengan pendekatan kawasan, yaitu kawasan perdesaan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan lulusan, peserta kursus mengikuti uji kompetensi sebagai pengganti ujian nasional kursus. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (UU Nomor 20/2003 pasal 61 ayat (3)). Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi (PP Nomor 19/2005 pasal 89 ayat (5)).

Untuk mewujudkan UU dan PP tersebut diperlukan empat komponen yang harus disiapkan yakni; 1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi, 2) Tempat Uji Kompetensi (TUK), 3) Penguji, dan 4) instrumen uji kompetensi. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) didirikan oleh asosiasi/organisasi profesi yang selama ini menjadi mitra Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) dan keberadaannya diakui oleh Ditjen PAUDNI. LSK ini merupakan lembaga independen yang berhak melakukan uji kompetensi. Sampai dengan tahun 2013 ini sudah terbentuk 27 LSK. TUK merupakan tempat berlangsungnya uji kompetensi. Keberadaan TUK ini ditetapkan oleh LSK setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. Saat ini sudah ditetapkan 952 TUK untuk 26 bidang keterampilan. Target sampai dengan 2015, akan

terdapat 2.000 TUK untuk 60 jenis keterampilan. Master penguji adalah orang yang memiliki keterampilan dan atau evaluasi yang dibuktikan dengan sertifikat nasional dan atau internasional. Para master ini berasal dari pakar-pakar keahlian dan dari perguruan tinggi. Tugas master adalah melatih dan menguji kompetensi calon penguji uji kompetensi. Sampai saat ini sudah terdapat 86 master penguji untuk 26 bidang keterampilan, dan target sampai dengan tahun 2015 akan terdapat 240 master untuk 60 jenis keterampilan. Penguji uji kompetensi adalah seseorang yang telah lulus uji calon penguji uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK dan diuji oleh master penguji. Tugas penguji adalah melaksanakan uji kompetensi bagi peserta didik kursus atau warga masyarakat di setiap TUK atas penugasan LSK. Sampai saat ini sudah terdapat 1.208 penguji untuk 26 bidang keterampilan, target sampai tahun 2015 akan terdapat 2400 orang penguji untuk 60 jenis keterampilan.

Prosedur pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan warga masyarakat pada dasarnya memberdayakan masyarakat (para organisasi dan ahli bidang keterampilan). Prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan uji kompetensi adalah; pemberdayaan organisasi profesi, proses pelaksanaan yang mudah, biaya murah, adil dalam uji kompetensi, relevan dengan perkembangan, serta proses dan hasil yang bermutu. Prosedur pelaksanaan uji kompetensi dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Peserta didik kursus atau warga masyarakat secara individu atau kolektif mendaftarkan uji kompetensi di TUK
- b. TUK melaporkan ke LSK tentang jadwal dan peserta calon uji kompetensi
- c. TUK menugaskan penguji dengan seperangkat alat uji kompetensi untuk melakukan uji kompetensi di TUK
- d. Penguji melakukan uji kompetensi di TUK
- e. Penguji mengolah hasil uji kompetensi dan hasilnya diserahkan kepada LSK
- f. LSK menetapkan peserta uji kompetensi yang lulus (berkompeten) atau tidak lulus (belum berkompeten) dan hasilnya dilaporkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsus)
- g. Ditbinsuskel mengirimkan blanko sertifikat uji kompetensi ke LSK
- h. LSK mengisi blanko sertifikat dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris LSK dan hasilnya dikirimkan ke TUK
- i. TUK menerima sertifikat dari LSK dan menyerahkan kepada peserta didik yang berkompeten (lulus)
- j. Ditbinsuspel dan Dinas Pendidikan dapat melakukan monitoring sebagai bagian dari pengendalian.

### 3. Pendidikan Masyarakat

Secara konseptual, pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi atau mempelajari kompetensi baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisik. Oleh sebab itu, pendidikan masyarakat sering diartikan sebagai pendidikan nonformal, walaupun sebetulnya pendidikan nonformal lebih luas daripada pendidikan masyarakat.

Tujuan pendidikan masyarakat secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar fungsional sehingga hasil belajarnya dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas pekerjaan.

Pendidikan masyarakat memiliki nilai strategis karena secara filosofis manusia adalah makhluk sosial dan makhluk pembelajar. Berarti, setiap manusia memerlukan pendidikan dan belajar sepanjang kehidupan (*life long learning*). Filosofi ini menanamkan kesadaran yang bersifat religius, bahwa ilmu pengetahuan bukanlah hasil ciptaan manusia, melainkan hasil temuan atau pencarian manusia.

Konsep pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berimbang dan setara antara laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Hasil analisis situasi pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam memperoleh pendidikan. Perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang berbeda mulai dari TK hingga jenjang PT. Apabila tidak ada intervensi pemerintah secara sungguh-sungguh maka hal tersebut pasti berdampak terhadap IPM. Perempuan buta aksara dan berpendidikan kurang dari SMP tidak dapat diandalkan menjadi sumber daya manusia produktif. Padahal jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki.

Keadilan gender dalam memperoleh pendidikan harus dimulai dari perencanaan pendidikan yang responsif gender. Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan harus mengenal dan dapat menggunakan lensa gender dalam merencanakan programnya. Program pendidikan perempuan adalah program yang dirancang untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap mental perempuan sehingga mereka mampu melaksanakan fungsi keluarga dalam rangka terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Kegiatan dalam program pendidikan perempuan ada tiga jenis, yaitu a) pendidikan keterampilan usaha perempuan (PKUP) guna memberikan bekal kemampuan berusaha sehingga mereka memiliki sumber penghasilan yang tetap, b) pendidikan orang tua guna memberikan

bekal kemampuan dalam melaksanakan fungsi keluarga, dan c) pemberdayaan perempuan guna memberdayakan perempuan sebagai mitra sejajar pria (gender).

Program pendidikan perempuan diarahkan pada lima sasaran, yaitu 1) peningkatan keterampilan perempuan melalui kegiatan pelatihan dan penyediaan dana belajar usaha, 2) pemupukan jiwa kepemimpinan sehingga mampu berperan sebagai kepala rumah tangga ketika suami sudah tidak mampu (penyakit atau kesibukan lain), 3) penyuluhan tentang kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki, 4) pendidikan keluarga yang diarahkan pada kesejahteraan anak dan keluarga, dan 5) meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai kepala rumah tangga sehingga makin banyak perempuan yang menduduki posisi strategis baik dalam sektor formal maupun informal. Sasaran utama yang dilayani melalui program ini ialah perempuan usia produktif dan berasal dari keluarga miskin.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melestarikan kemampuan baca bagi masyarakat yang baru terbebas dari ketunaaksaraan, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat (Dikmas) mengembangkan budaya baca. Pengembangan budaya baca dilakukan dengan empat cara, yaitu 1) melalui rintisan dan penguatan taman bacaan masyarakat (TBM) di desa-desa, 2) pemberian *block Grant* ke TBM untuk membeli buku-buku koleksi baru, 3) pelatihan pengelolaan TBM dan perpustakaan desa, dan 4) diskusi-diskusi yang bersumber dari buku-buku di TBM. Pengembangan budaya baca dilakukan melalui menjalin kerja sama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan desa. Tujuan jangka panjang pengembangan budaya baca ada tiga, yaitu 1) mencerdaskan bangsa, 2) mewujudkan masyarakat gemar membaca/belajar (*learning society*), dan 3) menumbuhkembangkan industri perbukuan di desa-desa.

Kriteria bahan bacaan yang diperlukan ada empat, yaitu 1) sesuai dengan kemampuan belajar kelompok sasaran, 2) dapat membantu kelompok sasaran untuk memelihara, menata, memantapkan dan meningkatkan kemampuan membaca, 3) tertuju pada masalah nyata dan disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat (misalnya masyarakat berprofesi nelayan, pertanian, atau pertukangan/kerajinan), dan 4) mampu merangsang secara aktif dan mendorong sikap kritis terhadap berbagai masalah.

Program peningkatan budaya baca bertumpu pada tiga pilar utama, yakni 1) terbentuknya TBM di seluruh pelosok daerah, 2) bahan bacaan yang sesuai kondisi obyektif masyarakat, dan 3) tumbuhnya minat baca masyarakat. Secara umum TBM di masa depan direncanakan ada pada setiap desa, pada setiap tahun jumlah TBM di seluruh Indonesia direncanakan akan ditambah. Demi mewujudkan hal ini, terdapat tiga

kegiatan, yaitu 1) konsolidasi TBM yang ada, 2) perintisan TBM baru dengan prioritas pada desa tuntas aksara, dan 3) donasi buku dari masyarakat. Dengan meningkatnya budaya baca masyarakat maka industri perbukuan dan toko buku di daerah akan tumbuh sehingga harga buku bermutu akan lebih terjangkau oleh masyarakat umum. Membaca sebenarnya adalah sebuah proses belajar sehingga masyarakat yang gemar membaca (*reading society*) akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) yang cerdas.

Dalam upaya mengoptimalkan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat, Kemdikbud, dalam hal ini Direktorat Dikmas mengembangkan kemitraan, baik dengan lembaga/instansi di lingkungan Kemdikbud maupun dengan lembaga nonpemerintah dan internasional. Kemitraan dan kerja sama dengan lembaga/instansi di jajaran Kemdikbud, antara lain perguruan tinggi, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, unit pelaksana teknis daerah (UPTD) seperti BPPNFI, BPKB dan SKB. dalam bentuk pengembangan model penyelenggaraan program-program Direktorat Dikmas.

Kemitraan dengan lembaga internasional sudah dijalin sejak dahulu, seperti dengan UNESCO, UNICEF, ACCU, ASPBAE, SIL Internasional, ILO, dan lainnya. Demikian pula dengan dengan pemerintah negara lain, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan India. Kemitraan dengan negara lain berjalan pasang surut, namun program-program pendidikan masyarakat di Indonesia telah dijadikan acuan dan dijadikan studi banding oleh mereka.

Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan/keagamaan terjadi dengan nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani untuk melaksanakan program-program pendidikan masyarakat, terutama berkaitan dengan pemberantasan buta aksara, pendidikan perempuan, dan budaya baca masyarakat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan/keagamaan tersebut antara lain organisasi perempuan (PKK, Muslimat NU, Aisyiah, Kowani, Wanita Islam), organisasi keagamaan (Pondok Pesantren, LPP-SDM, Lembaga Alkitab, dan PP Alhidayah), dan media masa baik cetak maupun elektronik (radio, televisi nasional dan swasta, surat kabar, dan majalah).

#### 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dit. P2TK PAUDNI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 bertugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Selain tugas di atas Direktorat P2TK PAUDNI juga menjalankan fungsi pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat.

**BAB IV**  
**PENCAPAIAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL**

**A. Formal**

Pencapaian pendidikan formal digambarkan dari jumlah sekolah, siswa baru, siswa, lulusan, guru, angka partisipasi pendidikan, arus pendidikan pada tahun 2013/2014, perkembangan pendidikan, dan perkembangan indikator pendidikan tahun 2009/2010—2013/2014.

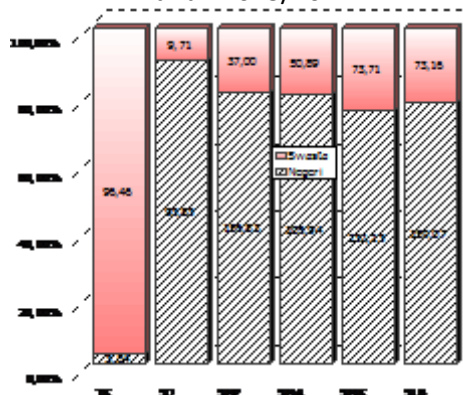
1. Sekolah

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah sekolah per jenjang pendidikan, di mana terdapat 74.982 TK; 148.272 SD; 35.488 SMP; 12.409 SMA; 11.726 SMK; dan 2.887 SLB. Di sini terlihat bahwa sebagian besar TK, SMA, SMK, dan SLB adalah sekolah swasta. Hanya pada SD dan SMP, jumlah sekolah swasta lebih kecil daripada sekolah negeri. Perbedaan jumlah sekolah terjadi cukup tinggi pada SD yaitu 133.874 untuk SD negeri dan 14.398 untuk SD swasta, sedangkan perbedaan terkecil ada pada SMA, yaitu 6.094 untuk SMA negeri dan 6.315 untuk SMA swasta.

Tabel 4.1  
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	2.654	133.874	22.356	6.094	3.083	775
Swasta	72.328	14.398	13.132	6.315	8.643	2.112
Jumlah	74.982	148.272	35.488	12.409	11.726	2.887

Grafik 4.1  
Persentase Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014



## 2. Siswa Baru Baru Tingkat I

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah siswa baru tingkat I per jenjang pendidikan, di mana terdapat 4.421.163 SD; 3.259.757 SMP; 1.494.952 SMA; 1.409.229 SMK; dan 19.345. Jika dilihat sebagian besar siswa baru SMK, SLB dan PT berasal dari sekolah swasta. Sedangkan jumlah siswa baru SD, SMP, dan SMA dari sekolah swasta lebih kecil daripada sekolah negeri. Perbedaan jumlah siswa baru yang sangat besar terjadi pada SD, yaitu 460.716 swasta dan 3.960.447 negeri, sedangkan perbedaan terkecil pada SLB dengan perbedaan 5.222 negeri dan 14.123 swasta.

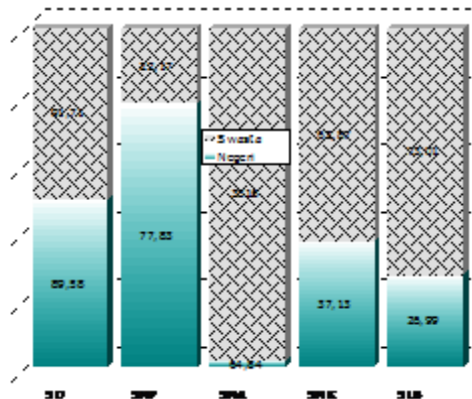
Tabel 4.2  
Jumlah Siswa Baru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	...	3.960.447	2.537.117	969.300	523.203	5.222
Swasta	...	460.716	722.640	525.652	886.026	14.123
Jumlah	...	4.421.163	3.259.757	1.494.952	1.409.229	19.345

Catatan: ... data tidak tersedia

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah siswa baru SLB menurut 8 jenis ketunaan yang berjumlah 19.345 anak. Jenis ketunaan yang terbesar adalah Tunagrahita berjumlah 11.705 anak (60,51%) dan yang terkecil adalah Kesulitan Belajar sebanyak 185 anak (0,96%), dan siswa baru jenis ketunaan lainnya yang kecil, yaitu 211 anak (1,09%) pada Tunaganda, dan 230 anak (1,19%) pada Tunalaras.

Grafik 4.2  
Persentase Siswa Baru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014



Tabel 4.3  
Jumlah Siswa Baru Menurut Jenis Ketunaan, Sekolah Luar Biasa  
Tahun 2013/2014

No.	Jenis Ketunaan	Siswa Baru	%
1	Tunanetra	844	4,36
2	Tunarungu	4.584	23,70
3	Tunagrahita	11.705	60,51
4	Tunadaksa	813	4,20
5	Tunalaras	230	1,19
6	Tunaganda	211	1,09
7	Autisme	773	4,00
8	Kesulitan Belajar	185	0,96
	Jumlah	19.345	100,00

### 3. Siswa

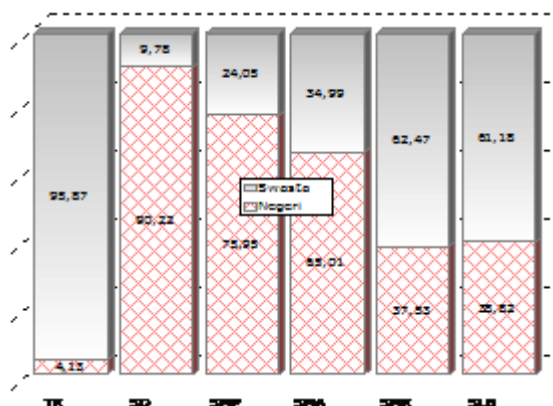
Tabel 4.4 menunjukkan jumlah siswa per jenjang pendidikan, di mana terdapat 4.174.783 siswa TK; 26.504.160 siswa SD; 9.715.203 siswa SMP; 4.292.288 siswa SMA; 4.199.657 siswa SMK; dan 101.918 siswa SLB. Hal yang menarik mengenai jumlah siswa di SMA, meskipun jumlah satuan pendidikan SMA negeri lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan SMA swasta namun jumlah siswa SMA negeri justru lebih besar 2,03 kali daripada SMA swasta, yaitu 2.379.033 berbanding 1.501.843 orang.

Tabel 4.4  
Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	172.222	23.911.525	7.379.033	2.790.445	1.576.056	39.566
Swasta	4.002.561	2.592.635	2.336.170	1.501.843	2.623.601	62.352
Jumlah	4.174.783	26.504.160	9.715.203	4.292.288	4.199.657	101.918



Grafik 4.3  
 Persentase Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
 Tahun 2014/2014



Tabel 4.5 menunjukkan jumlah siswa SLB menurut jenis ketunaan. Sebagian besar siswa SLB pada jenjang SD sebesar 75.426 anak (74,01%) dan terkecil pada jenjang SM sebesar 9.335 orang (9,61%). Bila dilihat dari jenis ketunaan maka yang terbesar adalah siswa jenjang SD Tunagrahita sebesar 45,295 anak sedangkan terkecil adalah siswa jenjang SM Kesulitan Belajar sebesar 38 orang. Selain itu, sebagian besar siswa SLB adalah Tunagrahita, yaitu sebesar 45,295 (59,27%) dan terkecil adalah Tunaganda sebesar 786 (1,00%).

Tabel 4.5  
 Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Ketunaan  
 Sekolah Luar Biasa  
 Tahun 2013/2014

No.	Jenis Ketunaan	Siswa menurut Jenjang Pendidikan				%
		SD	SMP	SM	Jml	
1	Tunanetra	3.253	953	622	4.828	4,74
2	Tunarungu	17.393	4.822	2.748	24.963	24,49
3	Tunagrahita	45.295	9.907	5.202	60.404	59,27
4	Tunadaksa	3.289	693	413	4.395	4,31
5	Tunalaras	812	285	118	1.215	1,19
6	Tunaganda	786	159	71	1.016	1,00
7	Autisme	3.591	253	123	3.967	3,89
8	Kesulitan Belajar	1.007	85	38	1.130	1,11
	Jumlah	75.426	17.157	9.335	101.918	100,00
	%	74,01	16,83	9,16	100,00	

Tabel 4.6  
Rasio Siswa Per Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	65	179	330	458	511	51
Swasta	55	180	178	238	304	30
Rata-rata	56	179	274	346	358	35

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui rasio siswa per sekolah per jenjang pendidikan. Rasio siswa per lembaga terbesar pada SMK sebesar 358 jika dibandingkan dengan jenjang persekolahan lainnya. Sedangkan rasio siswa per lembaga terkecil adalah pada SLB sebesar 35, diikuti dengan rasio pada TK sebesar 56, di mana TK negeri sebesar 65 lebih besar dari TK swasta sebesar 55. Bila dibedakan juga status sekolah, rasio terbesar pada SMK sebesar negeri 511 rasio terkecil pada SLB swasta sebesar 30. Hal yang sama juga terjadi untuk jenjang lainnya di mana negeri memiliki rasio lebih besar dari swasta. Untuk jenjang SD, SD swasta sebesar 180 lebih kecil daripada SMP negeri sebesar 330. Untuk jenjang SMP, SMP swasta sebesar 178 lebih kecil daripada SMP negeri. Untuk jenjang SMA, SMA swasta sebesar 238 lebih kecil daripada SMA negeri sebesar 458, dan pada SMK negeri sebesar 511 dan SMK swasta sebesar 304.

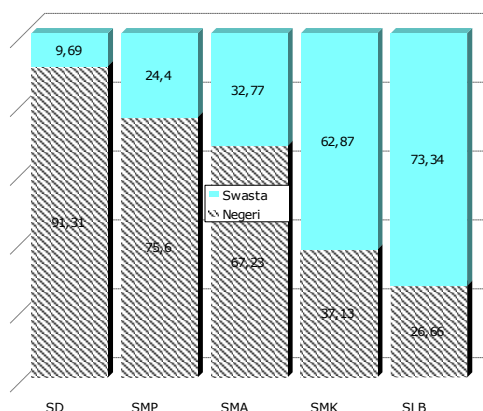
#### 4. Lulusan

Tabel 4.7 menunjukkan jumlah lulusan per jenjang pendidikan, di mana terdapat 4.392.638 lulusan SD, 3.060.211 lulusan SMP, 1.433.516 lulusan SMA, 1.270.054 lulusan SMK, dan 12.174 lulusan SLB, di mana jumlah lulusan siswa sejalan dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Pada jenjang SMK dan SLB jumlah lulusan terbesar berada pada lembaga swasta, yaitu masing-masing sebesar 798.469 (SMK) dan 8.928 (SLB). Sebaliknya, pada jenjang SD, SMP, dan SMA jumlah lulusan dari lembaga negeri lebih besar dibanding lembaga swasta, yaitu masing-masing sebesar 4.005.114 (SD), 2.313.432 (SMP), dan 963.787 (SMA). Jika dicermati lebih lanjut, yang menarik adalah pada jenjang SMA jumlah sekolah swasta lebih besar dibanding negeri, namun jumlah siswa dan lulusannya lebih besar pada sekolah negeri. Hal ini menunjukkan untuk jenjang SMA daya tampung dan minat masyarakat lebih besar pada sekolah negeri.

Tabel 4.7  
Jumlah Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	4.005.114	2.313.432	963.787	471.585	3.246
Swasta	387.524	746.779	469.729	798.469	8.928
Jumlah	4.392.638	3.060.211	1.433.516	1.270.054	12.174

Grafik 4.4  
Persentase Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014



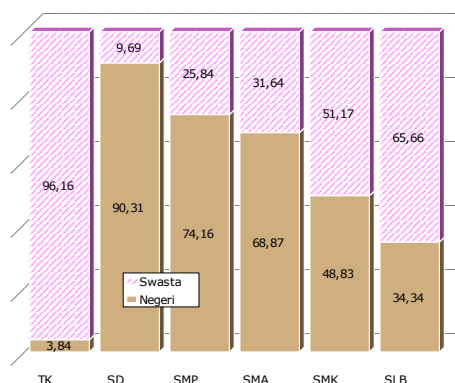
## 5. Guru

Tabel 4.8 menunjukkan jumlah guru per jenjang pendidikan, di mana terdapat 302.182 guru TK; 1.539.819 guru SD; 596.089 guru SMP; 278.711 guru SMA; 186.401 guru SMK; dan 16.813 guru SLB. Jika dilihat lebih lanjut, jumlah guru TK dan SLB swasta lebih besar daripada negeri, yaitu masing-masing 302.182 (TK) dan 16.813 (SLB). Hal ini sejalan dengan jumlah sekolah, siswa, dan lulusannya. Sedangkan sebaliknya untuk jumlah guru SD, SMP, SMA, dan SMK negeri lebih besar daripada swasta, yaitu masing-masing 1.390.571 (SD), 442.084 (SMP), 278.711 (SMA), dan 186.401 (SMK), padahal jumlah sekolah SMA dan SMK swasta lebih besar daripada negeri serta jumlah siswa dan lulusan SMK swasta lebih besar.

Tabel 4.8  
Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	11.601	1.390.571	442.084	190.533	91.023	5.773
Swasta	290.581	149.248	154.005	88.178	95.378	11.040
Jumlah	302.182	1.539.819	596.089	278.711	186.401	16.813

Grafik 4.5  
Persentase Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah  
Tahun 2013/2014



Tabel 4.9  
Rasio Siswa Per Guru Tiap Jenjang Pendidikan  
Tahun 2013/2014

Status	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
Negeri	15	17	17	15	17	7
Swasta	14	17	15	17	28	6
Rata2	14	17	16	15	23	6

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui rasio siswa per guru per jenjang pendidikan. Rasio tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku selama ini bahwa seorang guru dapat melayani siswa antara 4 sampai 18 sehingga perhatian dan konsentrasi guru dapat diberikan dengan baik kepada setiap siswa dari segi akademik maupun nonakademik. Rasio siswa per guru terkecil adalah SLB sebesar 6 sedangkan terbesar pada SMK sebesar 23. Rasio antara sekolah negeri dan swasta tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan kecuali pada SMK, untuk jenjang SMK rasio siswa per guru negeri sebesar 17 dan 28 untuk swasta, berarti untuk sekolah SMK swasta masih banyak kekurangan guru.

**Tabel 4.10**  
**Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Ijazah Tertinggi**  
**dan Masa Kerja**  
**Tahun 2013/2014**

Komponen		Guru TK	Guru SD	Guru SMP	Guru SMA	Guru SMK
Jenis Kelamin	Laki-laki	2,61%	37,02%	43,03%	43,38%	50,61%
	Perempuan	97,39%	62,98%	56,97%	56,62%	49,39%
Usia (tahun)	<=30	27,76%	30,04%	13,61%	12,82%	18,13%
	31 – 35	19,01%	17,66%	13,58%	15,74%	18,60%
	36 – 40	16,13%	14,05%	12,99%	14,94%	16,34%
	41 – 45	17,41%	11,53%	19,91%	18,35%	16,96%
	46 – 50	11,91%	14,49%	21,27%	19,32%	14,64%
	51 – 55	5,04%	6,37%	13,05%	12,58%	10,38%
	> =60	2,73%	5,86%	5,59%	6,24%	4,95%
Ijazah Tertinggi	< S1	59,83%	18,97%	8,64%	7,14%	18,29%
	>= S1	40,17%	81,03%	91,36%	92,86%	81,71%

Dengan adanya program kesetaraan gender maka pada dunia pendidikan pada umumnya dan guru khususnya perempuan diharapkan memiliki peranan yang besar. Oleh karena itu terlihat bahwa perempuan saat ini sudah memiliki peran yang cukup besar di bidang pendidikan. Tabel 4.10 menunjukkan banyaknya guru perempuan pada TK dan SD masing-masing sebesar 97,39% dan 62,98% sedangkan guru laki-laki sebesar 2,61% dan 37,02%. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMP dan SMA, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh, di mana banyaknya guru perempuan pada SMP dan SMA masing-masing sebesar 56,97% dan 56,62% sedangkan guru laki-laki sebesar 43,03% dan 43,38%. Meski demikian pada jenjang SMK jumlah guru perempuan berada sedikit di bawah jumlah guru laki-laki yaitu sebesar 50,61% berbanding 49,39%.

Sementara itu, dipandang dari usianya terdapat banyak variasi usia guru. Guru TK yang paling banyak berusia <=30 tahun sebesar 27,76%. Guru SD yang paling banyak berusia <=30 tahun sebesar 30,04%. Guru SMP dan SMA yang paling banyak berusia 46-50 tahun masing-masing sebesar 21,27% dan 19,32%. Untuk SMK lebih banyak guru yang berusia 31-35 tahun sebesar 18,60%. Hanya sedikit guru yang berusia 56 tahun atau lebih, guru TK sebesar 2,73%, guru SD sebesar 5,86%, guru SMP sebesar 5,59%, guru SMA sebesar 6,24%, dan guru SMK sebesar 4,95%.

Guru yang mengajar pada setiap jenjang pendidikan dibedakan atas layak mengajar dan tidak layak mengajar. Guru dikatakan layak mengajar bila memiliki kualifikasi minimum yang dihasilkan oleh PT sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Tabel 4.11 adalah skema kelayakan mengajar guru tiap jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terlihat bahwa kelayakan mengajar guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah S-1/Diploma 4 dan yang lebih tinggi. Kelayakan mengajar dosen PT untuk program S-1/Diploma adalah lulusan S-2 dan yang lebih tinggi dan program pascasarjana adalah lulusan S-3.

**Tabel 4.11**  
**Skema Kelayakan Mengajar Guru Per Jenjang Pendidikan**  
**Menurut UU No. 14, Tahun 2005**

Satuan Pendidikan	Layak Mengajar	Tidak Layak
TK	Sarjana /S-1, Diploma 4, dan ijazah lain di atasnya	- SPGT, Diploma 1, 2, dan 3
SD		- SLTA dan ijazah di bawahnya
		- SPGSD, Diploma 1, 2, dan 3
SMP		- SLTA dan ijazah di bawahnya
SMP		- PGSMMP, Diploma 1,2, dan 3
	- SLTA dan ijazah di bawahnya	
	- PGSLTA, Diploma 3	
PT S-1 dan Diploma	S-2 dan ijazah lain di atasnya	- Sarjana/S-1 Non Keguruan
PT Pascasarjana	Doktor	- D2 dan Ijazah di bawahnya
		- Sarjana/S-1 dan di bawahnya
		- S-2 dan di bawahnya

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa sebagian besar guru TK adalah kurang dari S-1 sebesar 59,83% dan sebagian besar guru SD, SMP, SMA, serta SMK adalah lulusan sarjana dan yang lebih tinggi masing-masing sebesar 81,03%, 91,36%, 92,86%, dan 81,71%.

Dengan mendasarkan pada skema kelayakan mengajar pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 tampak bahwa guru yang layak mengajar atau yang berijazah S-1/Diploma 4 dan yang lebih tinggi yang paling baik di SMA sebesar 92,86% diikuti SMP sebesar 91,86%, SMK sebesar 81,71%, dan SD sebesar 81,03%. Keadaan yang paling memprihatinkan terjadi di TK karena guru yang layak mengajar hanya sebesar 40,17% sehingga pada TK masih banyak guru yang tidak layak mengajar. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah bila akan meningkatkan mutu pendidikan.

**Tabel 4.12**  
**Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi dan Kelayakan Mengajar**  
**Tahun 2013/2014**

Komponen		Guru TK	Guru SD	Guru SMP	Guru SMA	Guru SMK
Ijazah Tertinggi	< S-1	59,83%	18,97%	8,64%	7,14%	18,29%
	>= S-1	40,17%	81,03%	91,36%	92,86%	81,71%
Kelayakan Mengajar	Tidak Layak	59,83%	18,97%	8,64%	7,14%	18,29%
	Layak	40,17%	81,03%	91,36%	92,86%	81,71%

## 6. Angka Partisipasi Pendidikan

Angka partisipasi pendidikan terdiri dari angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi murni usia sekolah (APMus). Besarnya APK, APM dan APMus tahun 2013 untuk tiap jenjang pendidikan dinyatakan pada Tabel 4.13.

APK adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa APK untuk PAUD (TK, RA, dan PAUD nonformal) adalah 65,16%. APK untuk jenjang SD telah mencapai 110,68%. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat SD cukup banyak siswa yang berusia di luar kelompok usia 7–12 tahun sehingga APK mencapai lebih dari 100%. APK di jenjang SMP mencapai 96,91% sementara di jenjang SM mencapai 74,63%. Di jenjang SMP, seperti di jenjang SD, ada siswa yang berusia di luar kelompok usia 13–15 tahun sehingga APK mencapai lebih dari 100%. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil APK.

APM adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM pada jenjang SD telah mencapai 30,30%. Hal ini berarti terdapat 8,70% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah di tingkat. APM di jenjang SMP mencapai 76,55%, dan di jenjang SM hanya sebesar 55,88%. Seperti halnya APK, besarnya APM ini menunjukkan angka yang semakin kecil pada jenjang pendidikan yang makin tinggi. APM di jenjang PAUD belum digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan sehingga tidak dihitung.

APMus adalah perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah tertentu yang berada di semua jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2013/2014 APMus 7-12 tahun sebesar 96,78%, berarti ada sebanyak 3,22% anak usia 7-12 tahun yang belum/tidak bersekolah. APMus 13-15 tahun sebesar 95,67% berarti ada sebanyak 4,33% anak usia 13-15 tahun yang belum/tidak bersekolah. Selanjutnya, APMus 16-18 tahun sebesar 60,95% berarti ada sebanyak 39,05% anak usia 16-18 tahun yang belum/tidak bersekolah, sudah bekerja atau sebab lainnya.

Tabel 4.13  
APK dan APM Per Jenjang Sekolah dan APMus Per Kelompok Usia  
Tahun 2013/2014

Jenjang Pendidikan	APK (%)		APM (%)
PAUD	65,16		
SD dan MI	110,68		90,30
SMP dan MTs	96,91		76,55
SM dan MA	74,63		55,88
Kelompok Usia	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 tahun
APMus (%)	96,78	95,67	60,95

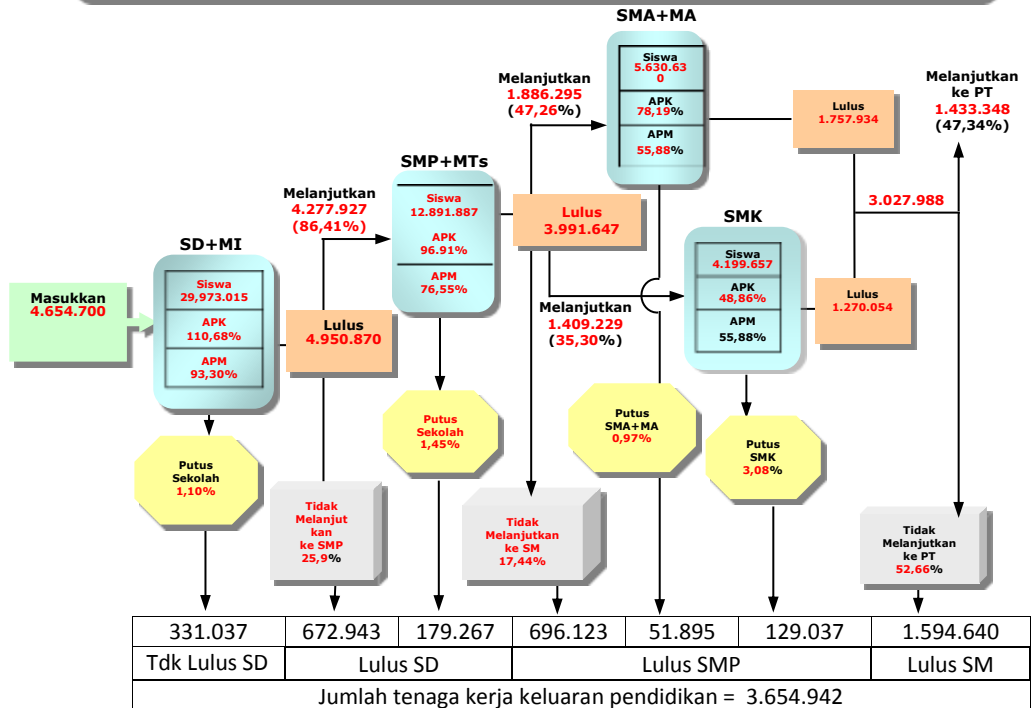
Selisih sebesar 6,48% antara APM jenjang SD (90,30%) dan APMus 7-12 tahun (96,78%) memberi arti bahwa terdapat 6,48% anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di jenjang. Selanjutnya, selisih sebesar 19,91% antara APM jenjang SMP (76,55%) dan APMus 13-15 tahun (95,67%) memberi arti bahwa terdapat 19,12% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SMP. Untuk jenjang SM terdapat selisih 5,07% antara APM jenjang SM (55,88%) dan APMus 16-18 tahun (60,95%), berarti terdapat 5,07% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SM.

## 7. Arus Pendidikan

Diagram 4.1 menunjukkan arus pendidikan dari jenjang SD sampai jenjang SM pada tahun 2013/2014. Arus pertama adalah terdapat 4.654.700 siswa baru tingkat I yang masuk ke jenjang SD (SD dan MI) sehingga jumlah siswa jenjang SD mencapai 29.973.015 juta dengan APK sebesar 110,68% dan APM sebesar 93,30%. Namun, di jenjang SD terjadi putus sekolah sebanyak 331.037 ribu (1,10%). Sementara itu, dari 4.950.870 lulusan jenjang SD yang melanjutkan ke jenjang SMP sebanyak 4.277.927 (86,41%) sedangkan sisanya sebanyak 672.943 (13,59%) tidak melanjutkan ke jenjang SMP. Dengan demikian, jumlah siswa jenjang SMP sebanyak 12.891.887 dengan APK sebesar 96,91% dan APM sebesar 76,55%. Namun, di jenjang SMP juga terjadi putus sekolah sebanyak 179.267 (1,45%). Sementara itu, dari 3.991.647 lulusan jenjang SMP terlihat bahwa yang melanjutkan ke SMA dan MA sebesar 1.886.295 (47,26%) dan melanjutkan ke SMK sebesar 1.409.229 (35,30%) sedangkan sisanya sebanyak 696.123 (17,44%) tidak melanjutkan ke jenjang SM.



**Diagram 4.1**  
**Arus Pendidikan Persekolahan Jenjang Pendidikan Dasar sampai Jenjang SM**  
**Tahun Ajaran 2013/2014**



- Keterangan:**
- Tingkat SD terdiri dari
  - SD = Sekolah Dasar
  - MI = Madrasah Ibtidaiyah
  - Paket A setara SD
  - Tingkat SMP terdiri dari
  - SMP = Sekolah Menengah Pertama
  - MTs = Madrasah Tsanawiyah
  - Paket B setara SMP
  - Tingkat SM terdiri dari
  - SMA = Sekolah Menengah Atas
  - SMK = Sekolah Menengah Kejuruan
  - MA = Madrasah Aliyah
  - Paket C setara SMA
  - Tingkat PT terdiri dari
  - PT = Perguruan Tinggi

Dengan demikian, jumlah siswa jenjang SM sebanyak 9,830.287 di mana 5.630.630 berada di SMA dan MA dan 4.199.657 berada di SMK. APK SMA dan MA mencapai 78,19% dan APM SMA dan MA sebesar 55,88% sedangkan APK SMK mencapai 48,86% dan APM SMK sebesar 55,88%. Jadi, APK SM sebesar 74,63% dan APM sebesar 55,88%. Seperti halnya jenjang SD dan SMP, di jenjang SM pun terjadi putus sekolah sebesar 180.932 ribu yang berasal dari SMK sebesar 129.037 ribu (3,08%) dan dari SMA+MA sebesar 51.895 ribu (0,97%). Lulusan tingkat SM mencapai 3.027.988, berasal dari SMA dan MA sebesar 1.757.934 dan dari SMK sebesar 1.270.054. Namun, yang melanjutkan ke tingkat PT sebanyak 1.433.348 (47,34%) sehingga yang tidak melanjutkan ke tingkat PT menjadi 1.594.640 (52,66%). Siswa yang putus jenjang SD disebut tak lulus jenjang SD, siswa yang putus

jenjang SMP berarti tidak lulus jenjang SMP disebut lulus jenjang SD. Begitu juga siswa yang putus jenjang SM disebut tak lulus SM atau lulus SMP, dan mahasiswa yang putus kuliah disebut tak lulus PT atau lulus SM. Berdasarkan istilah tersebut maka terdapat lima kategori tenaga kerja keluaran pendidikan, yaitu 1) tidak lulus SD, 2) lulus SD yang terdiri dari tidak melanjutkan ke SMP dan putus SMP, 3) lulus SMP yang terdiri dari tidak melanjutkan ke SM dan putus SMA/MA atau SMK, 4) lulus SM yang terdiri dari tidak melanjutkan ke PT dan putus PT, dan 5) lulus PT.

Dengan melihat pada arus pendidikan maka dalam tahun 2013/2014 di Indonesia telah terjadi keluaran pendidikan yang berasal dari siswa yang tidak lulus SD sebesar 331.037 orang, yang berpendidikan SD sebesar 1.003.980 orang (672.943 adalah lulus SD dan 179.267 adalah putus SMP) yang berpendidikan SMP sebanyak 748.018 orang (696.123 adalah lulus SMP, 51.895 adalah putus SMA, dan 129.037 ribu adalah putus SMK) yang berpendidikan SM sebanyak 1.970.331 orang (1.594.640 adalah lulus tingkat SM dan 375.691 adalah putus PT). Bila mereka yang keluar dari pendidikan ini dijumlahkan maka terdapat 3.654.942 orang yang pada tahun 2013/2014 akan menjadi tenaga kerja keluaran pendidikan.

## 8. Perkembangan Pendidikan

### a. Sekolah

Selama 4 tahun terlihat perkembangan sekolah yang meningkat pada semua jenjang pendidikan. Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa dari tahun 2009/2010 sampai tahun 2013/2014 jumlah TK, SMP, SMA, dan SMK

makin bertambah setiap tahun terkecuali SD, di mana SD sempat mengalami penurunan pada tahun 2009/2010. Peningkatan terbesar pada SMK karena adanya alih fungsi dari SMA ke SMK sebesar 28,37% selama 4 tahun dari 8.399 menjadi 11.726. Peningkatan terkecil pada SD sebesar 3,39% selama 4 tahun dari 148.272 menjadi 148.272.

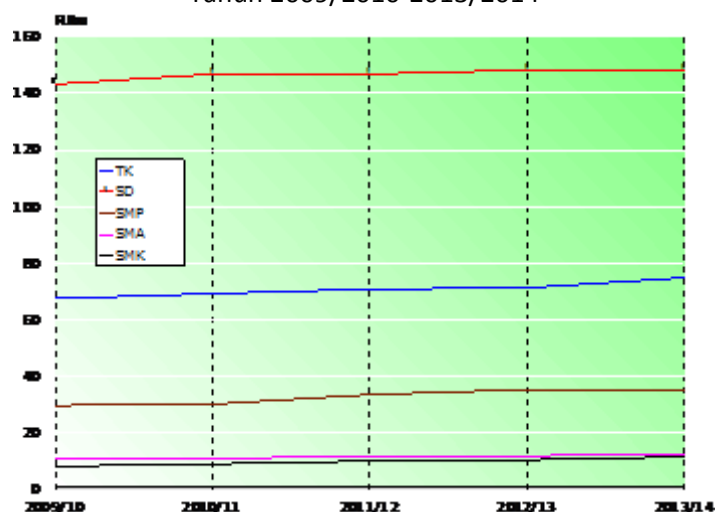
### b. Siswa Baru Tingkat I

Seperti halnya sekolah, selama 4 tahun terlihat perkembangan siswa baru tingkat I yang meningkat setiap tahunnya, kecuali pada jenjang SD. Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa dari tahun 2009/2010 sampai tahun 2013/2014 terjadi peningkatan terbesar pada jumlah siswa baru SMK sebesar 28,37% selama 4 tahun dari 1.219.418 menjadi 1.409.229. Peningkatan terkecil pada SMP sebesar 3,65% selama 4 tahun dari 3.145.012 menjadi 3.259.757. Di sisi lain, pada SD terjadi penurunan jumlah siswa baru sebesar -13,57% selama 4 tahun dari 4.732.548 menjadi 4.421.163.

Tabel 4.14  
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
TK	67.550	69.326	70.917	71.356	74.982	11,00
SD	143.252	146.804	146.826	148.272	148.272	3,39
SMP	29.866	30.290	3.668	35.527	35.488	15,84
SMA	11.036	11.306	11.654	12.107	12.409	11,06
SMK	8.399	9.164	10.256	10.673	11.726	28,37

Grafik 4.6  
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

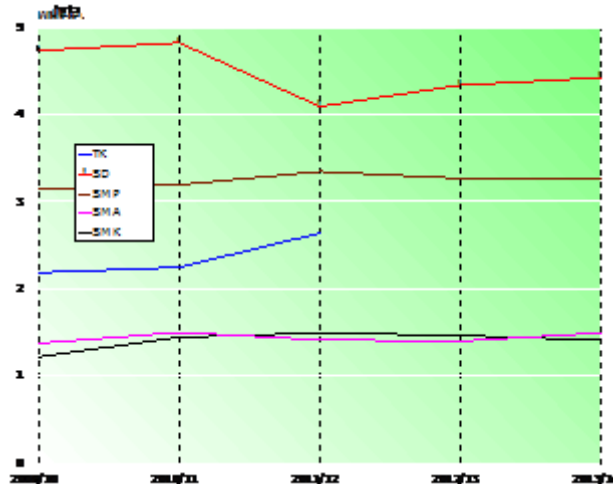


Tabel 4.15  
Perkembangan Jumlah Siswa Baru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
TK	2.185.253	2.245.895	2.637.299	...	...	20,69
SD	4.732.548	4.822.160	4.090.219	4.336.261	4.421.163	-13,57
SMP	3.145.012	3.191.899	3.345.075	3.266.002	3.259.757	3,65
SMA	1.374.804	1.500.923	1.413.223	1.399.050	1.494.952	8,74
SMK	1.219.418	1.443.517	1.493.178	1.464.371	1.409.229	13,47

Catatan: ... = data tidak tersedia

Grafik 4.7  
Perkembangan Jumlah Siswa Baru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014



c. Siswa

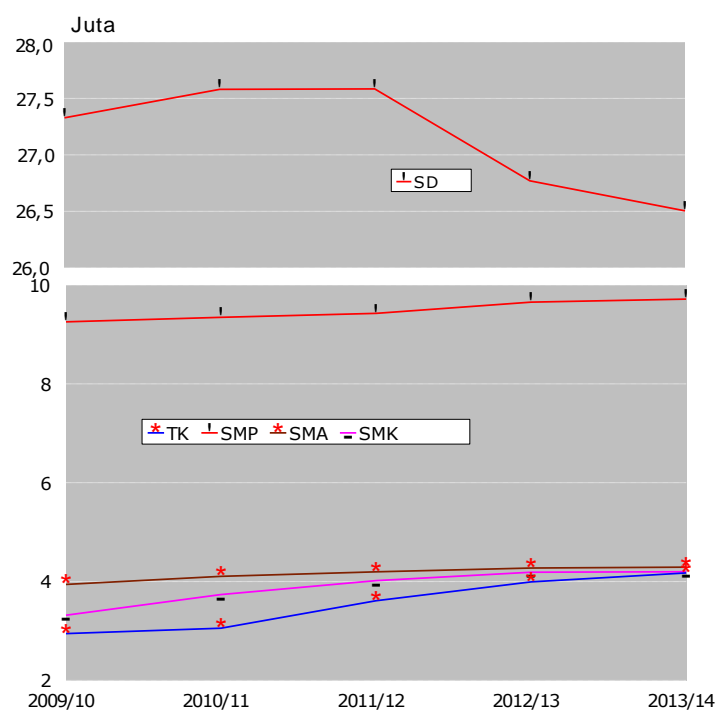
Tabel 4.17 menunjukkan perkembangan jumlah siswa dari tahun 2009/2010 sampai tahun 2013/2014 menurut jenjang pendidikan. Jumlah siswa TK, SD, SMP, SMA, dan SMK makin bertambah setiap tahun. Peningkatan terbesar pada TK sebesar 29,40% selama 4 tahun dari 2.947,2 ribu meningkat menjadi 4.174.7 ribu. Sebaliknya, untuk siswa SD terjadi sedikit penurunan jumlah siswa dalam 4 tahun terakhir sebesar -3,11%, dari 27.769,6 ribu menjadi 26.504,1 ribu.

Sejalan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun, jumlah siswa SMP meningkat dari 9.255,0 ribu menjadi 9.715,2 ribu atau meningkat 4,74% selama 4 tahun. Siswa SMA juga meningkat dari 3.942,7 ribu menjadi 4.292,2 ribu pada tahun 2013/2014 atau meningkat 8,14% selama 4 tahun. Siswa SMK juga meningkat dari 3.319,1 ribu menjadi 4.199,6 ribu atau meningkat 20,97% selama 4 tahun.

Tabel 4.16  
Perkembangan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
TK	2.947.193	3.056.377	3.612.441	3.993.929	4.174.783	29,40
SD	27.328.601	27.580.215	27.583.919	26.769.680	26.504.160	-3,11
SMP	9.255.006	9.346.454	9.425.336	9.653.093	9.715.203	4,74
SMA	3.942.776	4.105.139	4.196.467	4.272.860	4.292.288	8,14
SMK	3.319.068	3.737.158	4.019.157	4.189.519	4.199.657	20,97

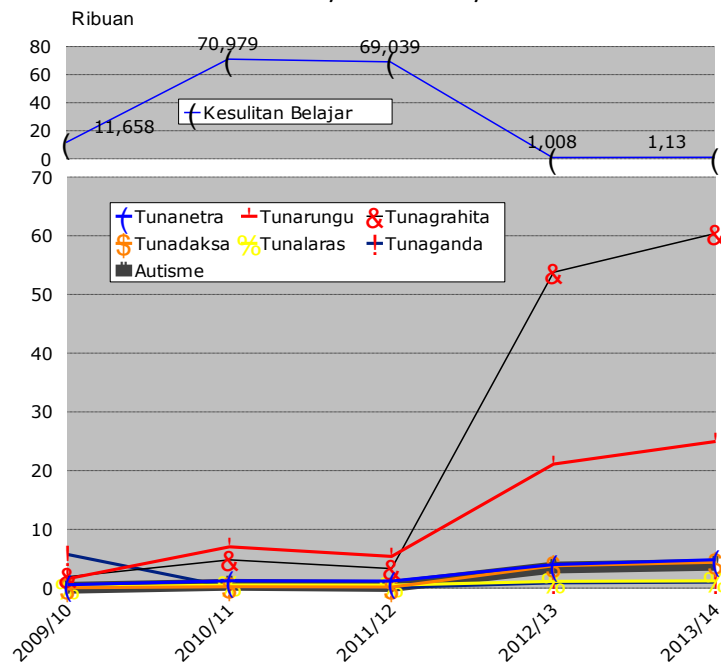
Grafik 4.8  
Perkembangan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014



Tabel 4.17  
Perkembangan Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa Menurut Jenis Ketunaan  
Tahun 2009/2010–2013/2014

No.	Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
1	Tunanetra	566	1.230	1.193	4.007	4.828	88,28
2	Tunarungu	1.580	7.029	5.397	21.109	24.963	93,67
3	Tunagrahita	1.917	4.805	3.315	53.781	60.404	96,83
4	Tunadaksa	54	225	164	3.801	4.395	98,77
5	Tunalaras	127	533	498	1.129	1.215	89,55
6	Tunaganda	5.720	186	82	892	1.016	-462,99
7	Autisme	44	555	346	3.496	3.967	98,89
8	Kesulitan Belajar	11.658	70.979	69.039	1.008	1.130	-931,68
Jumlah		21.666	85.542	80.034	89.223	101.918	-828,69

Grafik 4.9  
Perkembangan Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa Menurut Jenis Ketunaan  
Tahun 2009/2010–2013/2014



Tabel 4.17 menunjukkan perkembangan jumlah siswa SLB tahun 2009/2010 sampai 2013/2014 menurut jenis ketunaan. Mulai tahun 2013/2014 ada perubahan jenis ketunaan, di mana jenis tuna campuran hilang dan ada

jenis baru, yaitu kesulitan belajar. Siswa yang pada tahun-tahun sebelumnya dikategorikan sebagai tuna campuran, mulai tahun 2012/2013 dikelompokkan ke dalam jenis ketunaan yang dominan sehingga beberapa jenis ketunaan mengalami peningkatan jumlah siswa yang sangat signifikan. Peningkatan tertinggi terjadi pada siswa Tunadaksa yang diikuti dengan siswa Tunagrahita dengan kenaikan masing-masing sebesar 98,77%, yaitu dari 54.781 siswa menjadi 4.395 siswa. Sebaliknya peningkatan terkecil pada siswa Tunalaras sebesar 89,55%, dari 1.127 siswa menjadi 1.215 siswa.

Jumlah siswa Tunanetra meningkat dari 4.556 anak menjadi 4.828 atau sebesar 88,28%, Tunarungu dari 1.580 meningkat menjadi 24.963 atau meningkat sebesar 93,67%, dan siswa Tunaganda dengan penurunan sebesar -462,99% dari 5.720 menjadi 1.016. Siswa autisme meningkat dari 44 menjadi 3.967 atau meningkat sebesar 98,89%.

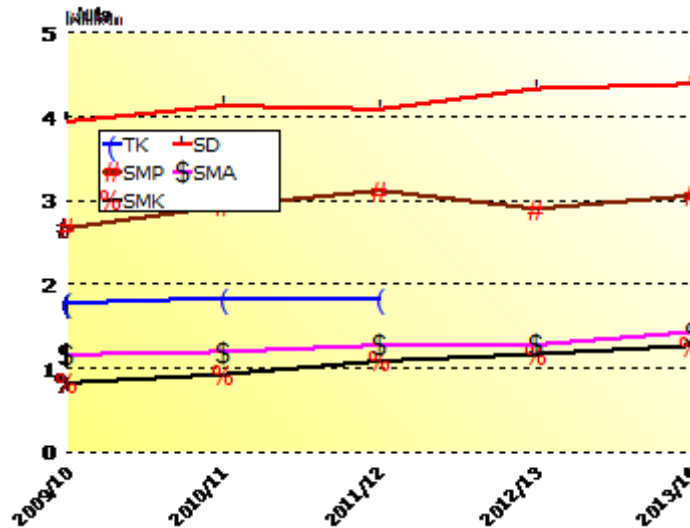
d. Lulusan

Tabel 4.18 menunjukkan perkembangan jumlah lulusan tahun 2009/2010 sampai tahun 2013/2014 yang terjadi peningkatan perkembangan lulusan di hampir semua jenjang pendidikan dengan peningkatan terbesar di SMK sebesar 35,02% dari 825.222 ribu pada tahun 2009/2010 menjadi 1.270.054 juta pada tahun 2013/2014 dan peningkatan terkecil di SD sebesar 10,22% dari 3.943.696 juta pada tahun 2009/2010 menjadi 4.392.638 juta pada tahun 2013/2014.

Tabel 4.18  
Perkembangan Jumlah Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
TK	1.779.337	1.839.783	1.839.783	1.832.783	1.973.756	9,85
SD	3.943.696	4.131.513	4.090.219	4.336.261	4.392.638	10,22
SMP	2.673.362	2.934.123	3.119.322	2.903.421	3.060.211	12,64
SMA	1.163.207	1.196.285	1.274.186	1.280.186	1.433.516	18,86
SMK	825.222	926.787	1.086.387	1.169.218	1.270.054	35,02

Grafik 4.10  
Perkembangan Jumlah Lulusan Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014



e. Guru

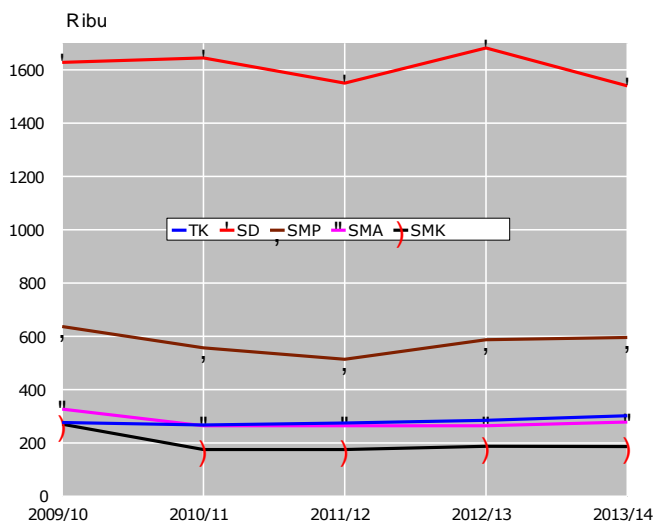
Tabel 4.22 menunjukkan perkembangan jumlah guru tahun 2009/2010 sampai tahun 2013/2014 menurut jenjang pendidikan. Peningkatan perkembangan jumlah guru terjadi dijenjang pendidikan TK dengan peningkatan terbesar (9,16%). Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, di mana terjadi penurunan sebesar (-5,73%), (-6,85%), (-17,38%) dan (-45,06%). Penurunan jumlah guru terjadi sebagai akibat adanya perubahan metode penghitungan jumlah guru pada tahun 2010/2011. Penghitungan jumlah guru yang mengajar di depan kelas diganti dengan jumlah individu guru yang telah memiliki NUPTK dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Tabel 4.19  
Perkembangan Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	% Kenaikan
TK	276.835	267.576	275.099	285.179	302.182	9,16
SD	1.627.984	1.644.925	1.550.276	1.682.263	1.539.819	-5,73
SMP	636.948	556.905	513.831	587.610	596.089	-6,85
SMA	327.163	264.512	264.512	264.512	278.711	-17,38
SMK	270.401	175.656	175.656	187.529	186.401	-45,06



Grafik 4.11  
Perkembangan Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014



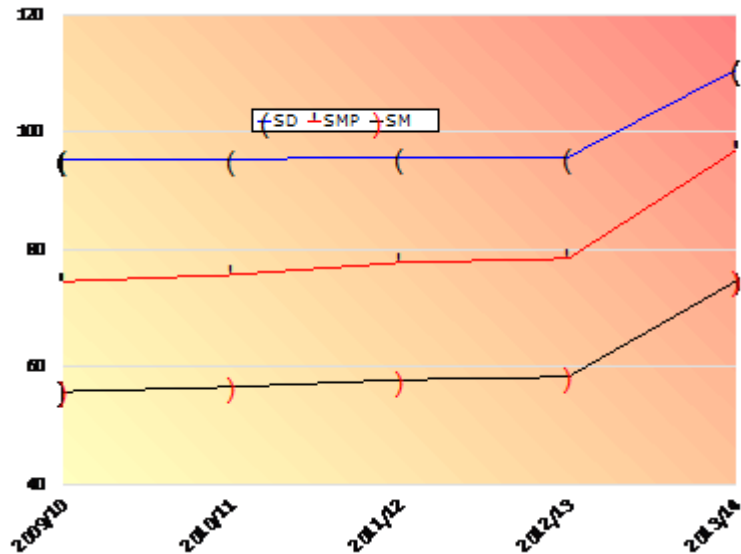
## 9. Perkembangan Indikator Pendidikan

Perkembangan indikator pendidikan yang dimaksud adalah perkembangan APK/APM, rasio siswa per guru, siswa per sekolah, dan angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tabel 4.20 menunjukkan perkembangan APK pada 4 jenjang pendidikan. Persentase kenaikan APK yang terbesar terjadi pada PAUD sebesar 2,87% per tahun. Sedangkan jenjang pendidikan mengalami penurunan, yaitu SD -1,49, SMP -0,30, dan SM 1,26. Perkembangan APK SMP yang sangat kecil diakibatkan tidak sejalannya perkembangan jumlah penduduk usia 13-15 dengan jumlah siswa SMP. APK SD mengalami penurunan sebesar -1,49% per tahun sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan kenaikan jumlah siswa SD.

Tabel 4.20  
Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010—2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	AP
PAUD	53,70	31,03	60,33	63,01	65,16	2,87
SD	116,65	115,33	115,43	115,88	110,68	-1,49
SMP	98,11	98,20	99,47	100,16	96,91	-0,30
SM	69,60	70,53	76,40	78,19	74,63	1,26

Grafik 4.12  
Perkembangan APK menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010—2013/2014

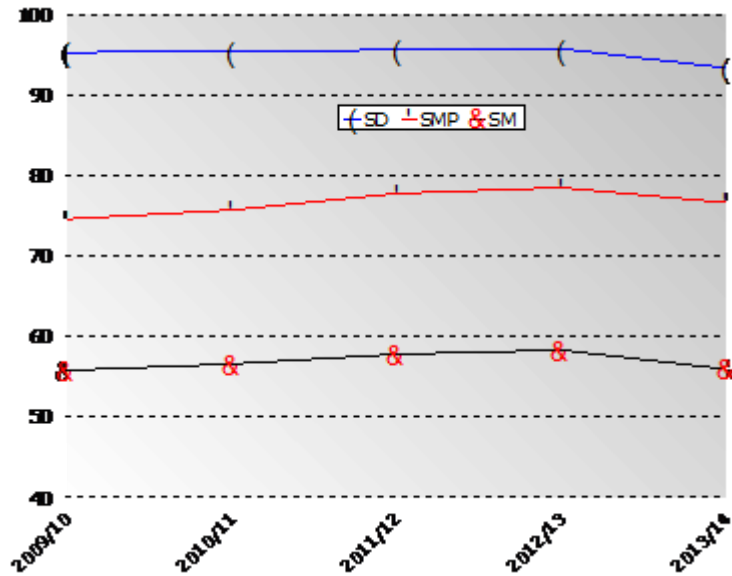


Tabel 4.21 menunjukkan perkembangan APM menurut jenjang pendidikan. Persentase kenaikan APM yang cukup besar terjadi selama 4 tahun terjadi pada SMP sebesar 0,51% per tahun dari 74,52% menjadi 76,55% dan terkecil pada SD sebesar -0,48% per tahun dari 95,23% menjadi 93,30%.

Tabel 4.21  
Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010—2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	AP
SD	95,23	95,41	95,55	95,71	93,30	-0,48
SMP	74,52	75,64	77,71	78,43	76,55	0,51
SM	55,73	56,52	57,74	58,25	55,88	0,04

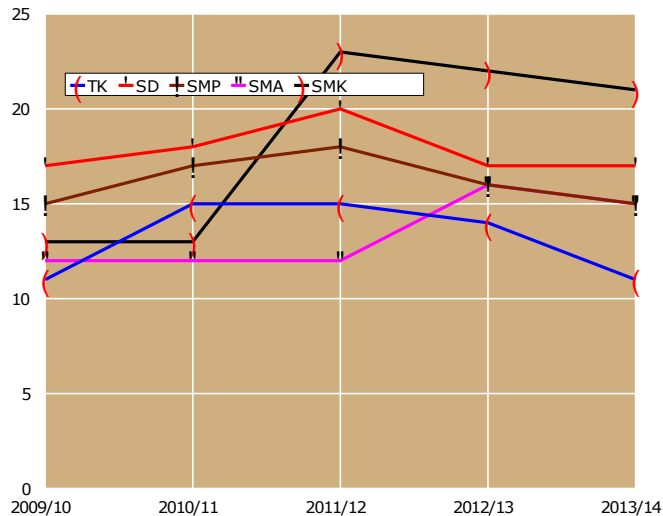
Grafik 4.13  
Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010—2013/2014



Tabel 4.22  
Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	AP
TK	11	11	13	14	11	0,00
SD	17	17	18	16	17	0,00
SMP	15	17	18	16	15	0,10
SMA	12	16	16	16	15	0,62
SMK	12	21	23	22	21	2,30

**Grafik 4.14**  
**Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2009/2010-2013/2014**

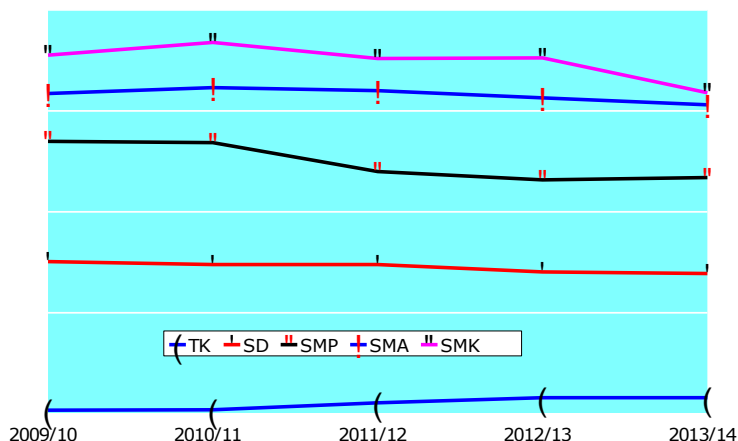


Tabel 4.22 menunjukkan perkembangan rasio siswa per guru menurut jenjang pendidikan, di mana jenjang TK dan SD tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Namun, pada SMP dan SMA mengalami kenaikan sebesar 0,10 dan 0,62 per tahun selama 4 tahun. Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada jenjang SMK selama 4 tahun dari 13 pada tahun 2009/2010 menjadi 21 pada tahun 2013/2014 dengan kenaikan 2,30 per tahun.

**Tabel 4.23**  
**Perkembangan Rasio Siswa Per Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Tahun 2009/2010-2013/2014**

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	AP
TK	44	44	51	56	56	3,00
SD	191	188	188	181	179	-3,00
SMP	310	309	280	272	274	-9,00
SMA	357	363	360	353	346	-2,75
SMK	395	408	392	393	358	-9,25

Grafik 4.15  
Perkembangan Rasio Siswa Per Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan  
Tahun 2009/2010-2013/2014

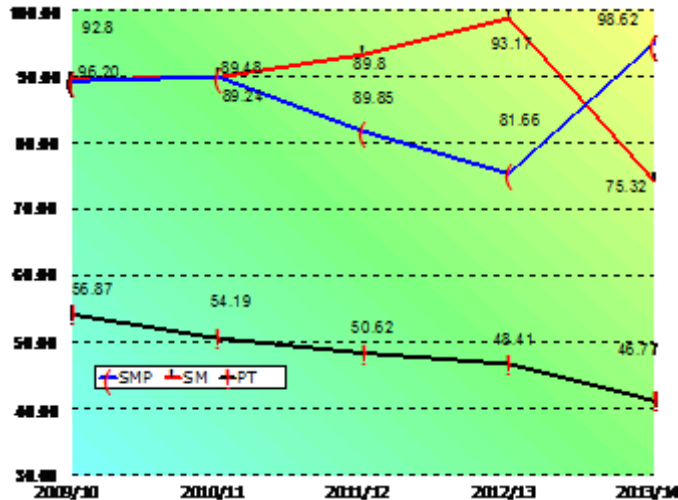


Tabel 4.23 menunjukkan perkembangan rasio siswa per sekolah menurut jenjang pendidikan. Hampir semua jenjang mengalami penurunan rasio, kecuali TK dan SMK, yang berarti meningkatnya jumlah sekolah lebih besar daripada jumlah siswa di jenjang SD sampai dengan SMK. Penurunan rasio terbesar pada SMK sebesar -9,25 per tahun atau dari 395 menjadi 358. Sedangkan untuk peningkatan rasio, peningkatan terbesar terjadi pada TK sebesar 3,0 per tahun selama 4 tahun dari 44 menjadi 56.

Tabel 4.24  
Perkembangan Angka Melanjutkan Ke SMP, SM, dan PT  
Tahun 2009/2010-2013/2014

Jenjang	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	AP
SMP	89,24	89,85	81,66	75,32	74,21	-3,76
SM	89,48	89,80	93,17	98,62	94,90	1,36
PT	54,19	50,62	48,41	46,77	41,26	-3,23

Grafik 4.16  
Perkembangan Angka Melanjutkan Ke SMP, SM, dan PT  
Tahun 2009/2010-2013/2014



Indikator pendidikan yang penting lainnya adalah perkembangan angka melanjutkan (AM) ke SMP dan SM. AM dihitung dari jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah lulusan pada jenjang sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Tabel 4.24 menunjukkan perkembangan AM dari 3 jenjang pendidikan, ternyata hanya AM SM yang naik dari 89,48% menjadi 94,90% atau meningkat 1,36% per tahun selama 4 tahun. Kenaikan AM SM terjadi karena ada kecenderungan lulusan MTs melanjutkan ke SMA atau SMA. Sedangkan dua jenjang lainnya terjadi hal sebaliknya yaitu penurunan AM. AM SMP turun dari 89,48% menjadi 74,21% atau menurun -3,76% per tahun selama 4 tahun. Penurunan AM SMP terjadi karena ada kecenderungan lulusan SD melanjutkan ke MTs. Sementara itu, AM ke perguruan tinggi juga memperlihatkan penurunan dari 54,19% menjadi 41,26% atau menurun -3,23% per tahun selama 4 tahun.

## B. Nonformal

Sesuai dengan fungsinya, pendidikan nonformal dirancang untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk yang tidak bisa mengikuti pendidikan di jalur formal. Di samping itu, pendidikan nonformal dirancang untuk meningkatkan keterampilan untuk bekerja, baik secara mandiri maupun bekerja pada orang/perusahaan. Untuk sekedar memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi jalur pendidikan nonformal,

data tahun 2013 pada Tabel 4.25 memperlihatkan bahwa dari 184,05 juta penduduk usia 15 tahun ke atas, ternyata sebanyak 125,58 juta (68,23%) diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja ini, terdapat 118,19 juta (64,22%) adalah bekerja dan sisanya sebesar 7,38 juta orang (4,01%) dalam status tidak bekerja (pengangguran terbuka). Selain itu, terlihat bahwa mereka yang bekerja terbesar (lebih dari 71%) pada kelompok usia 25-29 tahun sampai 45-49 tahun yang berjumlah masing-masing sekitar 11-17 juta dan kelompok usia 20-24 tahun, 50-54 tahun, dan 55--59 tahun yang berjumlah masing-masing sekitar 6-12 juta. Namun, pengangguran terbuka paling tinggi (lebih dari 10%) terjadi pada kelompok usia sekolah yaitu usia 20--24 tahun dengan jumlah 2,15 juta (10,42%).

**Tabel 4.25**  
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Golongan Umur dan Kegiatan Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja					%	Bukan Angkatan Kerja	%	Jumlah
	Bekerja	%	Pengangguran Terbuka	%	Subjumlah				
15-19	8.046.391	30,44	2.301.580	8,71	10.347.971	39,14	16.089.434	60,86	26.437.405
20-24	12.568.922	60,63	2.159.336	10,42	14.728.258	71,05	6.000.882	28,95	20.729.140
25-29	14.946.456	71,08	1.109.739	5,28	16.056.195	76,36	4.971.801	23,64	21.027.996
30-34	17.511.701	73,48	635.807	2,67	18.147.508	76,14	5.685.549	23,86	23.833.057
35-39	13.946.197	75,97	342.235	1,86	14.288.432	77,83	4.070.272	22,17	18.358.704
40-44	14.933.517	78,94	303.393	1,60	15.236.910	80,54	3.681.267	19,46	18.918.177
45-49	11.497.803	79,71	215.613	1,49	11.713.416	81,21	2.710.336	18,79	14.423.752
50-54	9.909.693	78,18	193.558	1,53	10.103.251	79,71	2.572.365	20,29	12.675.616
55-59	6.081.110	70,62	82.315	0,96	6.163.425	71,57	2.448.023	28,43	8.611.448
60+	8.750.988	45,97	45.161	0,24	8.796.149	46,21	10.239.390	53,79	19.035.539
<b>Jumlah</b>	<b>118.192.778</b>	<b>64,22</b>	<b>7.388.737</b>	<b>4,01</b>	<b>125.581.515</b>	<b>68,23</b>	<b>58.469.319</b>	<b>31,77</b>	<b>184.050.834</b>

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2013, BPS, 2014

**Tabel 4.26**  
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan dan Kegiatan Tahun 2013

Pendidikan	Angkatan Kerja					%	Bukan Angkatan Kerja	%	Jumlah
	Bekerja	%	Pengangguran Terbuka	%	Subjumlah				
Tidak/Belum pernah sekolah	5.273.427	55,10	77.450	0,81	5.350.877	55,91	4.219.026	44,09	9.569.903
Tidak/Belum tamat SD	15.601.996	66,06	477.156	2,02	16.079.152	68,08	7.538.562	31,92	23.617.714
Sekolah Dasar	33.039.191	67,13	1.339.072	2,72	34.378.263	69,85	14.840.150	30,15	49.218.413
SMP	22.139.232	53,52	1.681.945	4,07	23.821.177	57,58	17.545.991	42,42	41.367.168
SMA	19.763.084	63,95	1.925.563	6,23	21.688.647	70,18	9.214.821	29,82	30.903.468
SMK	11.251.795	70,90	1.259.444	7,94	12.511.239	78,84	3.357.854	21,16	15.869.093
Diploma I/II/III	3.111.579	76,18	187.059	4,58	3.298.638	80,76	785.611	19,24	4.084.249
Universitas	8.012.474	85,05	441.048	4,68	8.453.522	89,73	967.304	10,27	9.420.826
<b>Jumlah</b>	<b>118.192.778</b>	<b>64,22</b>	<b>7.388.737</b>	<b>4,01</b>	<b>125.581.515</b>	<b>68,23</b>	<b>58.469.319</b>	<b>31,77</b>	<b>184.050.834</b>

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2013, BPS, 2014

Berdasarkan Tabel 4.26, terlihat bahwa pengangguran terbuka sebagian besar adalah tamatan SD, SMP, SMA, dan SMK. Bila dibandingkan dengan penduduk sesuai dengan tingkat pendidikan maka persentase pengangguran terbuka terbesar adalah SMK (7,94%), SMA (6,23%), sedangkan jenjang lainnya (tidak pernah ke sekolah dan tidak tamatan SD)

kurang dari 5,00%.

Tantangan lain dari pendidikan nonformal adalah menuntaskan buta aksara yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat Indonesia. Seseorang dikatakan buta aksara apabila tidak dapat membaca dan menulis dengan huruf latin dan angka Arab dalam bahasa Indonesia serta tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan. Penduduk buta aksara terdiri dari tiga jenis, yaitu 1) buta aksara murni, yaitu mereka yang sejak lahir tidak pernah bersekolah disebabkan oleh hambatan faktor geografis dan ekonomi, 2) putus sekolah SD dan sederajat kelas 1 sampai kelas 3, dan 3) buta aksara kembali karena putus sekolah karena tidak mendapat latihan terlalu lama.

Tabel 4.27  
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia  
(*Human Development Index Ranking*)

Negara	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Singapura	25	28	23	23	26	12	11	9
Brunei	34	27	30	30	33	31	30	30
Malaysia	61	63	66	66	61	61	62	62
Thailand	74	81	87	87	103	91	89	89
<b>Indonesia</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>108</b>
Philipina	84	102	105	105	112	110	109	118
Vietnam	109	114	116	116	128	118	118	121
Kamboja	129	136	137	137	139	139	139	136
Laos	133	133	133	122	138	150	150	139
Myanmar	130	135	138	138	149	137	137	150

Sumber: UNDP 2013

Pemberantasan buta aksara menjadi salah satu prioritas Kemdikbud, khususnya Ditjen PAUDNI. Hal ini karena keterkaitannya yang sangat erat dengan tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Makin banyak penderita buta aksara maka makin miskin suatu negara. Berdasarkan Tabel 4.27, posisi Indonesia saat ini cukup memprihatinkan karena dari 182 negara di dunia, Indonesia saat ini berada pada posisi 108 dalam peringkat IPM tetap bila dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.28  
Jumlah Buta Aksara 15 – 59 tahun  
Tahun 2013

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 15-59	80.229.005	79.363.006	159.592.011
Buta Aksara	2.072.192	4.093.212	6.165.404
%	2,58	5,16	3,86

Sumber : Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 2015



Berdasarkan data pada Tabel 4.28 diketahui banyaknya penduduk usia 15-59 tahun yang buta aksara. Dari penduduk 15-59 tahun sebesar 159,59 juta ternyata yang buta aksara sebesar 6,16 juta. Dengan menggunakan rumusan angka buta aksara adalah perbandingan penduduk buta aksara usia 15-59 tahun dengan penduduk usia 15-59 tahun dan dinyatakan dalam persentase maka angka buta aksara (ABA) sebesar 3,86%. Bila dilihat dari jenis kelamin maka buta aksara perempuan sebesar 4,09 juta atau 5,16% lebih besar daripada laki-laki sebesar 2,07 juta atau 2,58%.

### 1. Lembaga/Kelompok Belajar

Satuan pendidikan nonformal berbentuk lembaga atau kelompok belajar. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kursus adalah lembaga, sedang program lainnya adalah kelompok belajar (kejar). Data jumlah lembaga/ kelompok belajar menurut program pendidikan nonformal tahun 2014 menunjukkan lembaga paling banyak adalah PAUD (100.416 lembaga), khususnya Kelompok Bermain (KB) sebanyak 70.931. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap penting dan memberikan perhatian yang cukup tinggi bagi anak usia prasekolah. Sebaliknya Paket A setara SD memiliki kelompok belajar paling sedikit, yaitu sebanyak 1.696. Hal ini menunjukkan dampak keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di mana sebagian besar anak sudah menyelesaikan pendidikan jenjang SD.

Tabel 4.29  
Perkembangan Jumlah Lembaga/Kelompok Belajar menurut Program  
Tahun 2010 –2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014	% Kenaikan
1	Pendidikan Keaksaraan	48.338	18.903	31.623	19.460	22.366	-53,73
2	PAUD	128.082	107.989	77.100	91.397	100.416	-21,60
	-KB	57.655	43.619	55.462	64.409	70.931	23,03
	-TPA	1.221	1.260	2.699	3.103	3.136	156,84
	-SPS	69.206	63.110	18.939	23.885	26.349	-61,93
3	Pendidikan Kesetaraan	26.038	20.907	16.315	13.563	13.144	-49,52
	-Paket A	5.424	5.504	2.772	2.590	1.696	-68,73
	-Paket B	14.322	9.130	6.548	4.050	4.480	-68,72
	-Paket C	6.292	6.273	6.995	6.923	6.968	10,74
4	Kursus	14.227	13.885	16.353	18.489	18.458	29,74

Tabel 4.30 menyajikan perkembangan jumlah lembaga/kejar menurut jenis program pendidikan nonformal. Jumlah lembaga/kejar cenderung fluktuatif, kecuali Taman Penitipan Anak (TPA) dan kursus yang terus meningkat. Peningkatan jumlah lembaga paling tinggi terjadi pada TPA

dengan rata-rata kenaikan sebesar 156,84%. Rata-rata kenaikan dalam 4 tahun yang terkecil pada kursus, yaitu sebesar 29,74%. KB mengalami fluktuasi jumlah lembaga tetapi masih menunjukkan peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 23,03%. Sedangkan program lainnya berfluktuasi namun cenderung menurun dengan penurunan dengan penurunan tertinggi pada pendidikan keaksaraan, sebesar -53,73%. Penurunan terendah pada Paket C setara SMA dengan penurunan sebesar -10,74%.

Tabel 4.30  
Perkembangan Jumlah PKBM dan TBM  
Tahun 2010 –2014

Lembaga	2010	2011	2012	2013	2014	% Kenaikan
PKBM	89,85	81,66	75,32	94,90	98,36	8,65
TMB	89,80	93,17	98,62	74,21	94,07	4,54

Di samping lembaga/kejar yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, ada lembaga lain yang sangat berperan dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). PKBM merupakan tempat penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan TBM adalah sarana membaca, seperti perpustakaan, yang menyediakan bacaan bagi masyarakat. Tabel 4.30 menyajikan perkembangan jumlah PKBM dan TBM. Pada tahun 2014 ada 8,65% PKBM dan 4,54% TBM. Pola perkembangan PKBM dan TBM sama, yaitu menurun pada tahun 2011 dan 2012 serta meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Peningkatan jumlah PKBM lebih rendah (8,65%) dibanding TBM (4,54%).

## 2. Peserta Didik

Data jumlah peserta didik menurut program pendidikan nonformal tahun 2014 menunjukkan peserta didik paling banyak adalah PAUD sebesar 6.92 juta. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah peserta didik KB dan SPS. Peserta didik TPA hanya 44.32 ribu. Sebaliknya Paket A setara SD memiliki peserta didik paling sedikit, yaitu 44,04 ribu. Hal ini sejalan dengan jumlah lembaga/kejar dimana PAUD paling banyak dan Paket A paling sedikit jumlahnya.

Tabel 4.31 menyajikan perkembangan jumlah peserta didik menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. Jumlah peserta didik ada yang meningkat dan ada yang menurun. Peserta didik pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan, kecuali Paket C setara SMA, menurun, sedangkan program lainnya meningkat. Peningkatan tertinggi terjadi pada KB dengan kenaikan sebesar 157,72% dari 1,31 juta menjadi 3,44 juta. Sebaliknya kenaikan terkecil pada Paket C setara SMA

sebesar -13,41% dari 295,95 ribu menjadi 256,26 ribu. Penurunan pada Paket A setara SD sebesar -70,86 dari 149,4 ribu pada tahun 2010 menjadi 44,4 ribu pada tahun 2014 (-70,54%).

Tabel 4.31  
Perkembangan Jumlah Peserta Didik menurut Program  
Tahun 2010 –2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014	% Kenaikan
1	Pendidikan Keaksaraan	859.741	419.020	316.225	197.298	283.874	-66,98
2	PAUD	2.650.343	3.970.161	5.807.108	6.601.180	6.924.831	161,28
	-KB	1.309.501	1.766.227	2.071.286	3.218.235	3.374.844	157,72
	-TPA	27.615	35.687	75.483	42.707	44.329	60,53
	-SPS	1.313.227	2.168.247	3.660.339	3.340.238	3.505.658	166,95
3	Pendidikan Kesetaraan	983.009	736.457	558.012	468.171	451.556	-54,06
	-Paket A	149.476	151.908	75.984	69.905	44.040	-70,54
	-Paket B	537.581	353.805	225.766	142.004	151.254	-71,86
	-Paket C	295.952	230.744	256.262	256.262	256.262	-13,41
4	Kursus	925.482	889.709	1.702.495	1.679.587	2.940.249	217,7

### 3. Lulusan

Tabel 4.32 menunjukkan perkembangan jumlah lulusan menurut program pendidikan nonformal tahun 2010 – 2014 tanpa lulusan PAUD karena tidak tersedia datanya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lulusan paling banyak adalah kursus sebesar 1,96 juta dan paling sedikit pada Paket A setara SD sebesar 25,6 ribu. Hal ini sesuai dengan jumlah peserta didik bila tidak termasuk PAUD.

Tabel 4.32  
Perkembangan Jumlah Lulusan menurut Program  
Tahun 2010 –2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014	% Kenaikan
1	Pendidikan Keaksaraan	356.345	326.154	332.037	196.156	234.926	-34,07
2	Pendidikan Kesetaraan	356.068	269.190	234.708	226.891	265.190	-25,52
	-Paket A	48.883	45.905	24.746	26.606	25.646	-47,54
	-Paket B	183.036	125.702	87.835	59.768	94.231	-48,52
	-Paket C	124.149	97.583	122.127	140.517	145.313	17,05
3	Kursus	615.955	592.892	1.093.107	1.074.969	1.964.703	218,97

Tabel 4.32 menunjukkan jumlah lulusan berkembang sesuai dengan jumlah peserta didik. Lulusan kursus meningkat, sedangkan lulusan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan menurun. Peningkatan lulusan kursus sebesar 218,97% dari 615,9 ribu menjadi 1,96 juta. Sebaliknya, penurunan terkecil pada Paket C setara SMA 124,14 ribu menjadi 145,31 ribu (17,05%). Penurunan lulusan tertinggi pada pendidikan keaksaraan dari 356,6 ribu pada tahun 2010 menjadi 265,1 ribu pada tahun 2014 (-25,52%).

#### 4. Pendidik

Data jumlah pendidik menurut program pendidikan nonformal tahun 2014 menunjukkan pendidik paling banyak adalah PAUD sebesar 330,5 ribu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah pendidik KB sebanyak 214,60 ribu. Sebaliknya Paket A setara SD memiliki pendidik paling sedikit, yaitu 4,15 ribu. Hal ini sejalan dengan jumlah lembaga/kejar dan peserta didik dimana PAUD paling banyak dan Paket A paling sedikit jumlahnya.

Tabel 4.33  
Perkembangan Jumlah Pendidik menurut Program  
Tahun 2010 – 2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014	% Kenaikan
1	Pendidikan Keaksaraan	157.438	29.686	40.236	21.275	22.366	-85,79
2	PAUD	437.336	278.041	210.591	232.679	330.537	-24,42
	-KB	205.603	125.573	148.339	161.092	214.607	4,38
	-TPA	5.870	4.161	8.237	8.149	11.085	88,84
	-SPS	225.863	148.307	54.015	63.438	104.845	-53,58
3	Pendidikan Kesetaraan	172.601	93.486	74.617	65.181	66.702	-61,35
	-Paket A	19.247	8.451	4.230	3.962	4.153	-78,42
	-Paket B	104.857	48.573	31.881	19.885	20.225	-80,71
	-Paket C	48.497	36.462	38.506	41.334	42.324	-12,73
4	Kursus	70.314	60.066	107.573	42.594	43.825	-37,67

Tabel 4.33 menyajikan perkembangan jumlah pendidik menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. Jumlah pendidik di hampir semua program menurun, kecuali KB dan TPA. Peningkatan tertinggi terjadi pada TPA dengan kenaikan sebesar 88,84% dari 5,8 ribu menjadi 11,1 ribu. Sebaliknya kenaikan terkecil pada KB sebesar 4,38% dari 205,6 ribu menjadi 214,6 ribu. Penurunan jumlah pendidik tertinggi pada pendidikan keaksaraan dari 157,4 ribu pada tahun 2010 menjadi 22,3 ribu pada tahun 2014 (-85,7%). Penurunan pendidik terkecil pada Paket C setara SMA dari 48,4 ribu pada tahun 2010 menjadi 42,3 ribu pada tahun 2014 (-12,73%).

#### 5. Indikator Pendidikan

Untuk pendidikan nonformal, ada 4 indikator pendidikan, yaitu rasio peserta didik per lembaga (R-PD/L), persentase lulusan (% Lulusan), rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P), dan rasio pendidik per lembaga (R-P/L). Rasio peserta didik per lembaga (R-PD/L) dihitung dengan membagi jumlah peserta didik dengan jumlah lembaga. Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah peserta didik dalam setiap lembaga atau kejar atau kapasitas layanan sebuah lembaga. Persentase lulusan dihitung dengan membagi jumlah lulusan dengan jumlah peserta didik, dinyatakan dengan persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas proses

pembelajaran. Rasio peserta didik per pendidik (R-PD/P) dihitung dengan membagi jumlah peserta didik dengan jumlah pendidik. Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah peserta didik yang dilayani oleh seorang pendidik atau kualitas layanan setiap guru. Rasio pendidik per lembaga (R-P/L) dihitung dengan membagi jumlah pendidik dengan jumlah lembaga. Indikator ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah pendidik dalam setiap lembaga atau kejar.

Tabel 4.34  
Indikator Pendidikan menurut Program  
Tahun 2013/2014

No.	Program	Peserta Didik/ Lbg/Kel. Belajar	% Lulusan	Pendidik/ Lbg/Kel. Belajar	Peserta Didik/ Pendidik
1	Pendidikan Keaksaraan	13	82,76	1,00	13
2	PAUD	69	...	3,29	21
	-KB	48	...	3,03	16
	-TPA	14	...	3,53	4
	-SPS	133	...	3,98	33
3	Pendidikan Kesetaraan	34	58,73	5,07	7
	-Paket A	26	58,23	2,45	11
	-Paket B	34	62,30	4,51	7
	-Paket C	37	56,70	6,07	6
4	Kursus	159	66,82	2,37	67

Tabel 4.34 menunjukkan indikator pendidikan untuk masing-masing program pendidikan nonformal pada tahun 2014. Data %Lulusan untuk PAUD tidak tersedia. R-PD/L paling tinggi adalah kursus sebesar 159, diikuti dengan SPS sebesar 133. Program lainnya memiliki rasio antara 30 hingga 50, dan rasio paling kecil adalah pendidikan keaksaraan sebesar 13. Bila dilihat %Lulusan, pendidikan keaksaraan memiliki efektifitas pembelajaran yang paling baik yang ditunjukkan dengan %Lulusan tertinggi, yaitu 82,76%. Untuk pendidikan kesetaraan dan kursus, %Lulusan paling tinggi 66,82% pada kursus dan paling rendah 56,70% pada Paket C setara SMA. Sesuai dengan standar pendidik masing-masing program, R-P/L bervariasi. R-P/L pendidikan keaksaraan dan Paket A setara SD sekitar 1, yaitu 1,00 dan 2,45. Untuk Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA rasio masing-masing sebesar 4,51 dan 6,0. Kursus memiliki R-P/L sebesar 2,37, sedangkan pada PAUD masing-masing program memiliki rasio sekitar 3,2. R-PD/P bervariasi antarprogram. Pendidikan keaksaraan, TPA, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA memiliki rasio di bawah 10, masing-masing sebesar 9, 5, 7, dan 6. Rasio tertinggi sebesar 33 pada SPS. Semakin tinggi R-PD/P semakin kurang perhatian yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya proses belajar mengajar dan rendahnya kualitas hasil pembelajaran.

Tabel 4.35  
Perkembangan Rasio PD/L menurut Program  
Tahun 210-2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidikan Keaksaraan	18	22	10	10	13
2	PAUD	21	37	75	72	69
	-KB	23	40	37	50	48
	-TPA	23	28	38	14	14
	-SPS	19	34	193	140	133
3	Pendidikan Kesetaraan	38	35	34	35	34
	-Paket A	28	28	27	27	26
	-Paket B	38	39	34	38	34
	-Paket C	47	37	37	37	37
4	Kursus	65	64	104	91	159

Tabel 4.35 menyajikan perkembangan R-PD/L menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. R-PD/L berfluktuasi dan di hampir semua cenderung program meningkat, kecuali pendidikan keaksaraan dan TPA. R-PD/L pada pendidikan keaksaraan turun dari 18 menjadi 13 dan pada TPA dari 23 menjadi 14. Peningkatan tertinggi terjadi pada SPS dari 19 di tahun 2010 menjadi 133 di tahun 2014, sedangkan yang terendah adalah KB dari 23 menjadi 48.

Tabel 4.36  
Perkembangan %Lulusan menurut Program  
Tahun 2010—2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidikan Keaksaraan	41,45	77,84	105,00	99,42	82,76
2	Pendidikan Kesetaraan	36,22	36,55	42,06	48,46	58,73
	-Paket A	32,70	30,22	32,57	38,06	58,23
	-Paket B	34,05	35,53	38,91	42,09	62,30
	-Paket C	41,95	42,29	47,66	54,83	56,70
3	Kursus	66,56	66,64	64,21	64,00	66,82

Tabel 4.36 menyajikan perkembangan %Lulusan menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. Persentase lulusan program pendidikan nonformal berfluktuasi dan cenderung meningkat. Pada pendidikan keaksaraan %Lulusan terus meningkat dari 65,20% pada tahun 2010 hingga tahun 2014, kemudian turun sedikit menjadi 99,42% pada tahun 2014. Untuk pendidikan kesetaraan, %Lulusan pada tahun 2010 menurun dari 36,22% menjadi 36,55%, namun kemudian terus meningkat dari 58,73% pada tahun 2014. Pola yang sama juga terjadi pada Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA. Pada paket A setara SD penurunan

%Lulusan masih terjadi pada tahun 2011 dan baru meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Untuk kursus, %Lulusan berfluktuasi setiap tahun meskipun masih di sekitar 66%.

Tabel 4.37  
Perkembangan R-P/L menurut Program  
Tahun 2010—2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidikan Keaksaraan	3	2	1	1	1
2	PAUD	3	3	3	3	3
	-KB	4	3	3	3	3
	-TPA	5	3	3	3	4
	-SPS	3	2	3	3	4
3	Pendidikan Kesetaraan	7	4	5	5	5
	-Paket A	4	2	2	2	2
	-Paket B	7	5	5	5	5
	-Paket C	8	6	6	6	6
4	Kursus	5	4	7	2	2

Tabel 4.37 menyajikan perkembangan R-P/L menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. R-P/L program pendidikan nonformal cenderung konstan, kecuali kursus. Perkembangan R-P/L pendidikan keaksaraan tahun 2010 hingga tahun 2014 relatif konstan sebesar 1. Ada kenaikan pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 3 dan 2, kemudian kembali menjadi 1 sampai tahun 2014. Hal yang sama terjadi pada perkembangan R-P/L PAUD, yaitu konstan sebesar 3. Pada tahun 2010 ada kenaikan R-P/L pada KB dan TPA menjadi 4 dan 5, kemudian kembali menjadi 3. Sedangkan pada SPS, R-P/L turun menjadi 2 pada tahun 2011, kemudian kembali sebesar 3 pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada pendidikan kesetaraan, R-P/L konstan pada 3 tahun terakhir, sebesar 2, 5, 6 untuk Paket A, B, dan C. Pada tahun 2010 R-P/L meningkat, untuk Paket A setara SD naik dari 2 menjadi 4, paket B setara SMP naik dari 6 menjadi 7, dan Paket C setara SMA naik dari 4 menjadi 8. Pada Kursus, R-P/L berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup drastis dari 7 menjadi 2.

Tabel 4.38 menyajikan perkembangan R-PD/P menurut jenis program pendidikan nonformal dari tahun 2010 sampai 2014. R-PD/P program pendidikan nonformal cenderung berfluktuasi. Perkembangan R-PD/P pendidikan keaksaraan tahun 2010 hingga tahun 2014 berfluktuasi dari 5 turun menjadi 14, kemudian turun menjadi 8, naik lagi menjadi 9, dan akhirnya sebesar mencapai 13. Hal yang sama terjadi pada perkembangan R-PD/P PAUD, R-PD/P pada tahun 2010 sebesar 6, kemudian naik menjadi 14,

tahun 2011 naik lagi menjadi 28 selama 2 tahun kemudian turun menjadi 21 pada tahun 2014. Perkembangan R-PD/P pendidikan kesetaraan, R-PD/P pada tahun 2010 sebesar 6, kemudian naik menjadi 6, tahun 2012 naik lagi menjadi 8, dan 2 tahun terakhir konstan sebesar 7. Pada kursus, R-PD/P meningkat dari tahun ke tahun dari 10 pada tahun 2010 menjadi 67 pada tahun 2014.

Tabel 4.38  
Perkembangan R-PD/P menurut Program  
Tahun 2010—2014

No.	Program	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidikan Keaksaraan	5	14	8	9	13
2	PAUD	6	14	28	28	21
	-KB	6	14	14	20	16
	-TPA	5	9	9	5	4
	-SPS	6	15	68	53	33
3	Pendidikan Kesetaraan	6	8	7	7	7
	-Paket A	8	18	18	18	11
	-Paket B	5	7	7	7	7
	-Paket C	6	6	7	6	6
4	Kursus	13	15	16	39	67



## BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN

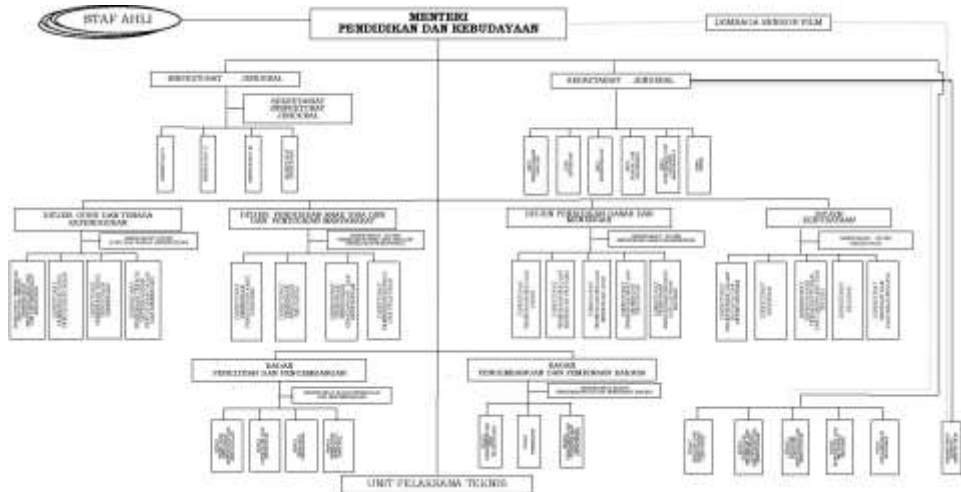
### **A. Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kemdikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Inspektorat Jenderal;
7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
10. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
11. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
12. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

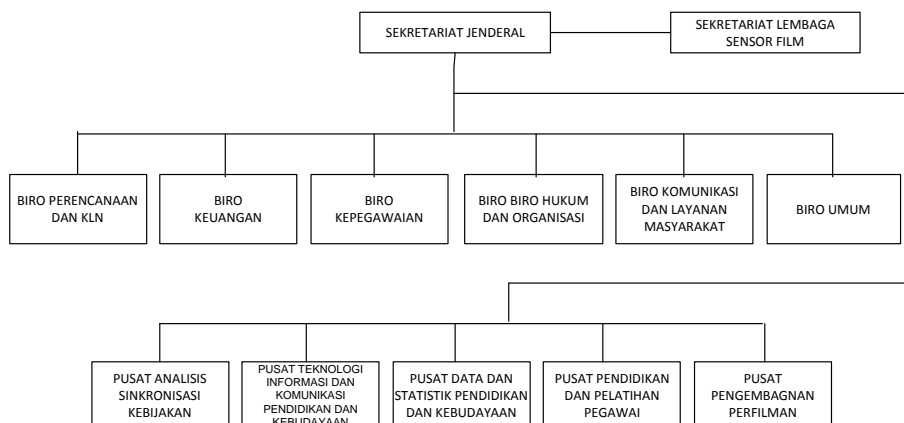
Diagram 5.1  
Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015



### 1. Sekretariat Jenderal (Setjen)

Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemdikbud. Fungsi Setjen ada tujuh, yaitu: 1) koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; 6) penyelenggaraan pengelolaan barang kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

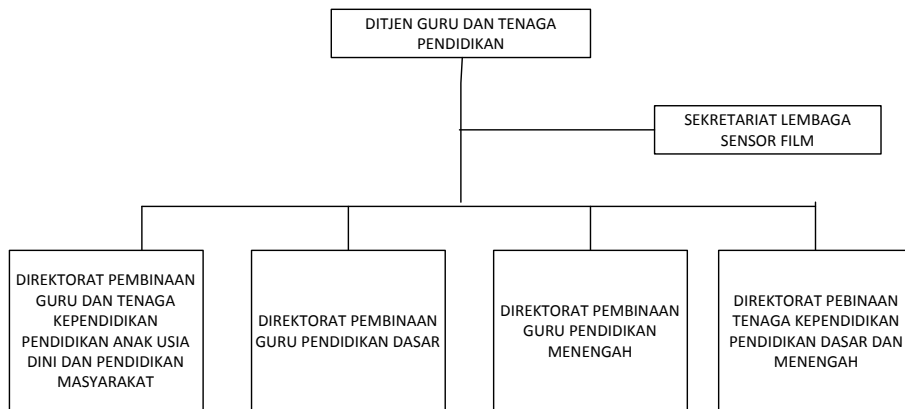
**Diagram 5.2**  
**Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015**



## 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan delapan fungsi, yaitu: 1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya; 3) pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan; 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

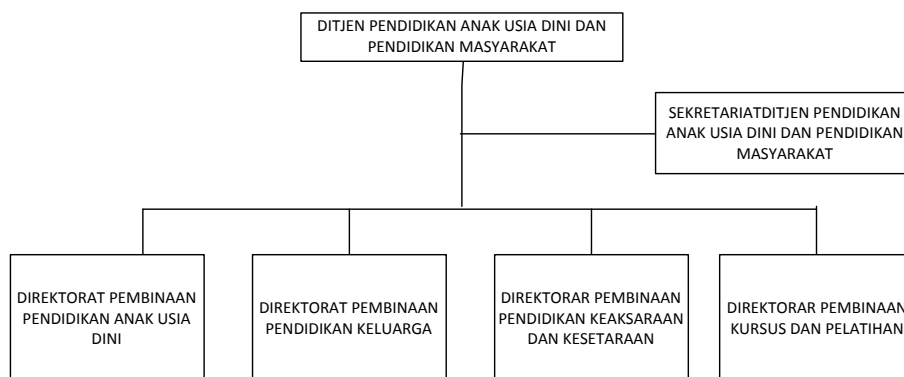
**Diagram 5.3**  
**Struktur Organisasi Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan**  
**Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015**



### 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Ditjen PAUD Dikmas mempunyai tugas menyelenggarakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan tujuh fungsi, yaitu: 1) perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

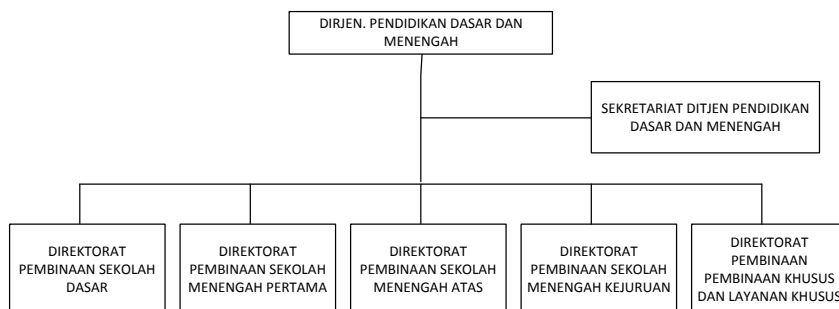
**Diagram 5.4**  
**Struktur Organisasi Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan**  
**Pendidikan Masyarakat**  
**Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015**



#### 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Ditjen Dikdasmen mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan delapan fungsi, yaitu 1) perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; 3) fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan; 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah; 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah; 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah; dan 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

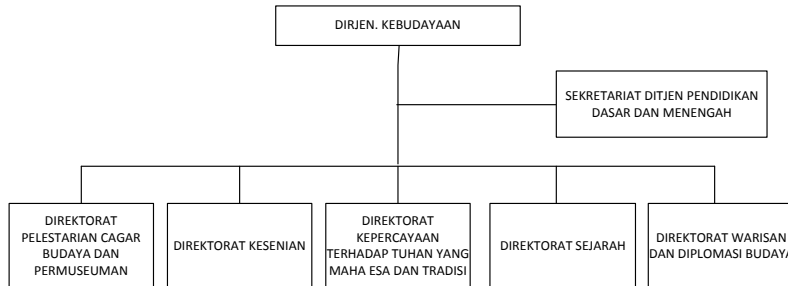
**Diagram 5.5**  
**Struktur Organisasi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015**



## 5. Direktorat Jenderal Kebudayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan sembilan fungsi, yaitu: 1) perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi; 3) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan; 5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya; 8) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

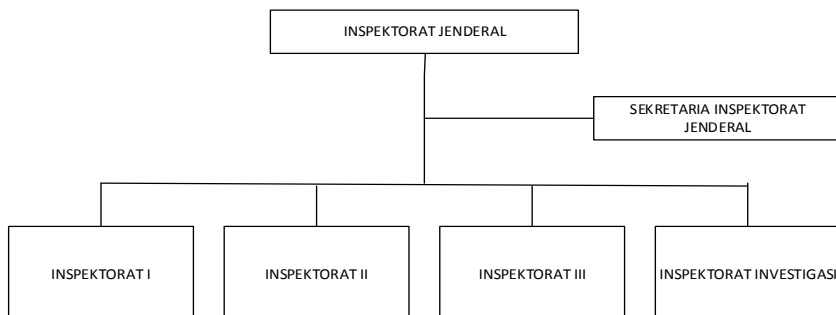
**Diagram 5.6**  
**Struktur Organisasi Dirjen Kebudayaan**  
 Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015



## 6. Inspektorat Jenderal

Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kemdikbud. Dalam melaksanakan tugas Irjen menyelenggarakan enam fungsi, yaitu: 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

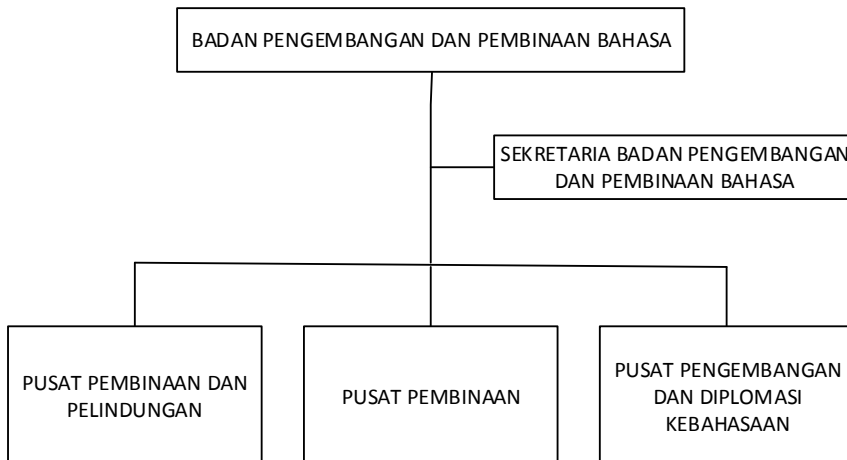
**Diagram 5.7**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal**  
 Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015



## 7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan lima fungsi, yaitu: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; 2) pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; 4) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Diagram 5.8  
Struktur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015



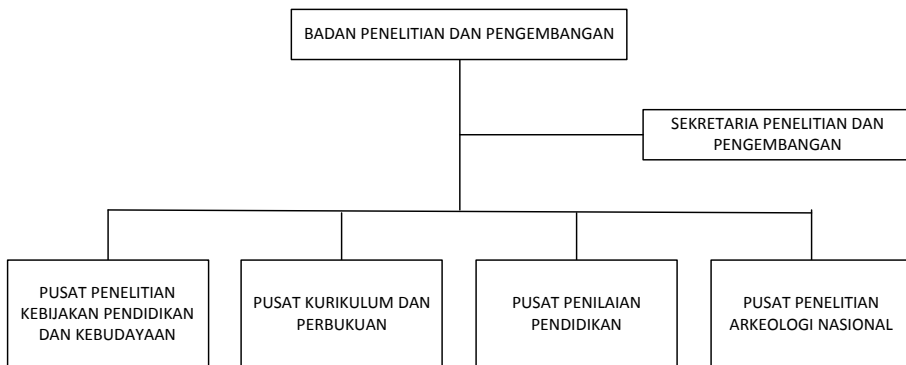
## 8. Badan Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan lima fungsi, yaitu: 1) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan



pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; 2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; 4) pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

Diagram 5.9  
Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan  
Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 tahun 2015



## B. Badan Akreditasi Nasional

Untuk menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dalam PP Nomor 19/2005 ditetapkan lima badan, yaitu 1) Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), 3) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), 4) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF), dan 5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Tujuan penetapan SNP ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sehubungan dengan itu, untuk penjaminan dan pengendalian mutu (*quality assurance and quality control*) pendidikan tersebut agar sesuai standar pendidikan nasional dan mutu yang berkelanjutan/berkesinambungan sesuai dengan tuntutan yang selalu berubah baik di tingkat nasional, regional dan internasional, diberlakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi.

SNP juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Fungsi perencanaan, pelaksanaan dari pengawasan tersebut meliputi delapan hal, yaitu 1) standar isi, 2) proses, 3) kompetensi lulusan, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan dan 8) penilaian pendidikan.

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Kedelapan SNP yang menyangkut mutu pendidikan tersebut disajikan berikut ini. Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Bagi pendidikan dasar dan menengah baik yang umum maupun kejuruan kurikulumnya terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Standar proses merupakan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang berstandar diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang lingkup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik, dan yang terlebih penting dalam proses pembelajaran adalah memberikan keteladanan. Untuk mendukung standar proses tersebut setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasilnya yang standarnya dikembangkan oleh BSNP yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam

penentuan lulusan peserta didik yang meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta PAUD meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

Standar sarana wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni 1) standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, 2) standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan 3) standar pengelolaan oleh pemerintah. Pada prinsipnya pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi mengacu pada paradigma masing-masing jenjang. Pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang bercirikan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dengan memberikan kebebasan untuk mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan lingkup fungsional pengelolaan lainnya.

Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas tiga jenis, yaitu 1) biaya investasi, 2) biaya operasi, dan 3) biaya personil. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja

tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidik (guru) dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji tersebut, biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi. Biaya personil sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi terdiri atas tiga hal, yaitu 1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk ulangan harian/tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan berupa ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas yang dilakukan secara berkesinambungan. Untuk pendidikan dasar dan menengah terdapat penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional (UN). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada jenjang pendidikan tinggi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta bentuk lain yang diatur oleh masing-masing PT.

#### 1. Badan Standar Nasional Pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. BSNP bertugas membantu Mendikbud dan memiliki kewenangan untuk lima tugas, yaitu 1) mengembangkan standar nasional pendidikan, 2) menyelenggarakan ujian nasional, 3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, 4) merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan 5) menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran.

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan nasional. BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex officio* diketuai oleh pejabat Kemdikbud yang ditunjuk oleh Mendikbud. BSNP menunjuk tim-tim ahli yang bersifat *ad hoc* sesuai kebutuhan. BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Kemdikbud

dan departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.

## 2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Dengan terbitnya Permendiknas Nomor 7 Tahun 2007 (Permendiknas Nomor 7/2007) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Permendiknas Nomor 8/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) menandai telah berakhirnya peran lembaga tersebut sebagai pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Namun, bukan berarti kedua lembaga tersebut tidak melayani pendidikan dan pelatihan bagi guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Sumber daya yang dimiliki oleh LPMP dan P4TK merupakan sumber daya yang masih dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membantu akselerasi peningkatan kualitas sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kedua lembaga tersebut lebih mengarah pada mengawal perjalanan UU Nomor 20/2003, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14/2005), PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 19/2005) serta PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sejalan dengan perubahan fungsi LPMP dan P4TK maka lembaga tersebut harus lebih kreatif, dinamis dan inovatif dalam mengembangkan program-programnya sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

LPMP merupakan pelaksana lapangan dalam mengawal proses pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan PP Nomor 19/2005. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis Kemdikbud yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Demikian juga kehadiran P4TK menjadi lembaga yang lebih luas lagi perannya dalam pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk lebih mampu mengembangkan maupun pendalaman dalam bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. P4TK lebih berperan memfasilitasi dalam informasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensinya sebagai pusat pemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kehadiran LPMP dan P4TK memiliki tiga tujuan, yaitu 1) meningkatkan mutu dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu berperan serta mengawal terlaksananya SNP, 2) memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan 3) menyediakan informasi mutu pendidikan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dalam Permendiknas Nomor 7 Tahun 2008 dinyatakan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, LPMP melaksanakan fungsinya dalam lima hal, yaitu 1) pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, 2) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, 3) supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam mencapai standar nasional pendidikan; 4) fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan, dan 5) pelaksanaan urusan administrasi.

Dalam pelaksanaan fungsinya dengan jelas LPMP sebagai unitpelaksanan teknis (UPT) pusat di provinsi untuk memfasilitasi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan (sekolah) dalam pencapaian SNP. Fungsi LPMP tersebut harus mampu memberikan rekomendasi upaya peningkatan mutu pendidikan baik pelaksanaan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar sarana prasaran, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Dengan demikian, kegiatannya lebih diarahkan untuk memberikan rekomendasi dan bantuan teknis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di kabupaten/kota.

Dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2007, P4TK memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya. Dalam melaksanakan tugasnya P4TK menyelenggarakan lima fungsi, yaitu 1) penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, 2) pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 3) fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, 4) evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan 5) pelaksanaan urusan administrasi P4TK.

Pelaksanaan fungsi P4TK sebagai sumber informasi mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan sekaligus memfasilitasi kebutuhan pemerintah

daerah dalam peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya dalam bidang studi tertentu agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan metodologi pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun multimedia lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kedua lembaga dalam mengawal satuan pendidikan untuk mencapai SNP maka LPMP dan P4TK wajib melakukan kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengembangan pendidikan. Produk LPMP dan P4TK adalah merupakan rekomendasi dan upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Mengingat mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain pendidik dan tenaga kependidikan maka rekomendasi merupakan produk utama dalam penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, LPMP dan P4TK perlu mengembangkan standar-standar yang akan menjadi acuan dalam mengembangkan satuan pendidikan. Kegiatan supervisi, bantuan teknis, studi pencapaian standar nasional maupun fasilitasi upaya-upaya peningkatan mutu baik mutu pendidikan maupun mutu pendidik dan tenaga kependidikan, akan merupakan kegiatan LPMP dan P4TK yang tidak akan pernah berhenti dan selalu mencari peluang dalam peningkatan mutu sumber daya pendidikan.

Kehadiran LPMP dan P4TK agar dapat memberikan harapan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki kedua lembaga tersebut sehingga kehadirannya menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah. Selain itu, kemitraan dan kerjasama perlu dikembangkan agar perjalanan penjaminan mutu pendidikan dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi pendidikan nasional.

### 3. Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuan serta didasarkan pada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antarsekolah tetapi sekolah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan. Di samping itu, akreditasi juga merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan pendidikan yang telah ditentukan.

Akreditasi sekolah, baik terhadap kelayakan maupun kinerja, dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Sebagai implikasinya, hanya sekolah yang telah terakreditasi yang berhak mengeluarkan ijazah atau sertifikat kelulusan. Ruang lingkup akreditasi sekolah meliputi TK, TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK dan SMLB, baik yang berstatus negeri maupun swasta.

Tugas BAN-SM ada tiga, yaitu 1) merumuskan kebijakan operasional, 2) melakukan sosialisasi kebijakan, dan 3) melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. BAN-SM memiliki tujuh fungsi, yaitu 1) merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah, 2) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri, 3) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah, 4) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, 5) mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional, 6) melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada menteri dan 7) melaksanakan ketatausahaan BAN-SM.

#### 4. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal

Tugas Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) ada tiga, yaitu 1) merumuskan kebijakan operasional, 2) melakukan sosialisasi kebijakan, dan 3) melaksanakan akreditasi pendidikan nonformal. BAN-PNF memiliki tujuh fungsi, yaitu 1) merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi PNF, 2) merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi PNF untuk diusulkan kepada menteri, 3) melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi PNF, 4) melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi PNF, 5) mengumumkan hasil akreditasi PNF secara nasional, 6) melaporkan hasil akreditasi PNF kepada menteri dan 7) melaksanakan ketatausahaan BAN-PNF.



## 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah organisasi non-struktural di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BAN-PT mempunyai fungsi: 1) Melakukan penyusunan yang berupa a) kriteria tingkat akreditasi, b) kebijakan dan kriteria penilaian program studi dalam rangka penetapan tingkat akreditasi dan c) kelengkapan organisasi setiap satuan/bagian struktur organisasi BAN-PT; 2) Melakukan penilaian secara berkala terhadap mutu dan efisiensi perguruan tinggi sebagai dasar pemberian rekomendasi penetapan akreditasi lembaga, program studi, dan langkah-langkah pembinaannya; dan 3) Membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian sendiri.

### C. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan terdiri dari anggaran yang berupa rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Semua anggaran berupa rupiah murni berasal dari dana pemerintah sedangkan pinjaman luar negeri bersumber dari dana bantuan internasional (*World Bank/WB, Asian Development Bank/ADB, OECF, IDB, donor-donor bilateral/ multilateral*).

Anggaran yang bersumber dari pemerintah dan bantuan internasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Selanjutnya, oleh Kemkeu menyalurkan ke kementerian yang selama ini menangani pendidikan, yaitu Kemdikbud dan Kemenag. Selain itu, Kemkeu juga langsung menyalurkan anggaran pendidikan ke pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kantor-kantor wilayah anggaran (kanwil anggaran) di provinsi dalam bentuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Mengenai dana masyarakat, pada umumnya disalurkan langsung oleh masyarakat ke satuan-satuan pendidikan.

Selain DAU dan DAK, Kemdikbud mengupayakan jenis anggaran pendidikan yang khusus diberikan ke dinas pendidikan provinsi dan PTN yang diberi nama dana dekonsentrasi (Dekon) dan penyalurannya dilakukan oleh Kemenkeu melalui kanwil anggaran di provinsi. Di samping itu, Kemdikbud juga menyalurkan jenis anggaran lain berupa "*blockgrant*" yang disebut dana tugas pembantuan (DTP). Dana ini disalurkan langsung oleh Kemdikbud ke dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan kabupaten/kota serta PTN.

Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi dalam bentuk uang atau

pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya proses pendidikan yang ada. Pendidikan yang ditempuh melalui pendidikan formal dan nonformal memiliki implikasi perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi yang berbeda. Demikian pula halnya dengan pembiayaan. Orang tua memiliki peran dalam proses pendidikan. Peserta didik dapat bersekolah karena adanya peran orang tua dalam menyediakan berbagai keperluan termasuk penyediaan biaya pendidikan.

Jumlah dan persentase anggaran pendidikan tiap subfungsi pada tahun anggaran 2013 disajikan pada Tabel 5.1. Berdasarkan anggaran Kemdikbud yang ada, terdapat 10 subfungsi, yaitu a) lembaga eksekutif, legislatif, keuangan, fiskal dan luar negeri, b) penelitian dasar dan pengembangan iptek, c) PAUD, d) pendidikan dasar, e) pendidikan menengah, f) pendidikan tinggi dan nonformal, g) pendidikan tinggi, h) pelayanan bantuan terhadap pendidikan, i) penelitian dan pengembangan pendidikan, dan j) pemberdayaan perempuan.

Tabel 5.1  
Anggaran Pendidikan Menurut Asal Tiap Program  
Tahun 2013

(ribuan Rp)

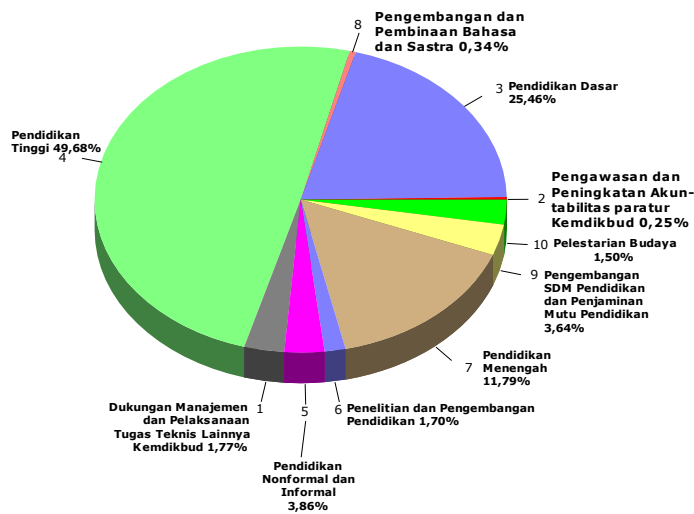
No.	Subfungsi	Rupiah Murni		Pinjaman LN		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemdikbud	2.437.151.387	3,07	2.787.200	0,11	2.439.938.587	2,98
	%	99,89		0,11			
2	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemdikbud	205.000.000	0,26	0	0,00	205.000.000	0,25
	%	100,00		0,00			
3	Pendidikan Dasar	16.331.564.492	20,55	478.837.025	19,18	16.810.401.517	20,51
	%	97,15		2,85			
4	Pendidikan Tinggi	39.281.759.150	49,42	1.874.206.790	75,09	41.155.965.940	50,20
	%	95,45		4,55			
5	Pendidikan Nonformal dan Informal	2.388.322.530	3,00	27.712.000	1,11	2.416.034.530	2,95
	%	98,85		1,15			
6	Penelitian dan Pengembangan	1.287.968.505	1,62	7.493.500	0,30	1.295.462.005	1,58
	%	99,42		0,58			
7	Pendidikan Menengah	12.579.289.900	15,83	65.549.600	2,63	12.644.839.500	15,42
	%	99,48		0,52			
8	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	379.531.800	0,48	0	0,00	379.531.800	0,46
	%	100,00		0,00			
9	Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.579.209.400	3,25	39.347.600	1,58	2.618.557.000	3,19
	%	98,50		1,50			
10	Pelestarian Budaya	2011620000,00	2,53	0	0,00	2.011.620.000	2,45
	%	100,00		0,00			
	Jumlah	79.481.417.164	100,00	2.495.933.715	100,00	81.977.350.879	100,00
		96,96		3,04		100,00	

Sumber: Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, Kemdikbud

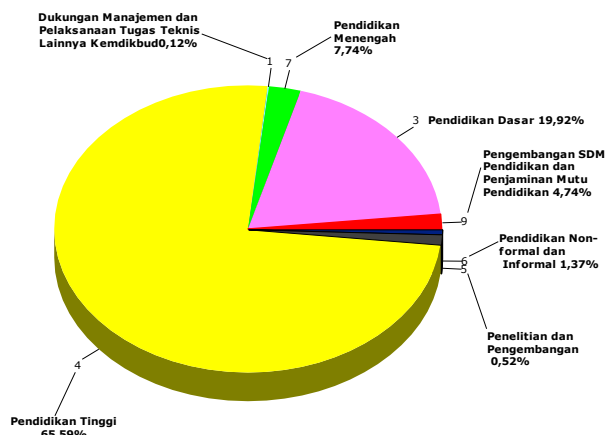
Berdasarkan Tabel 5.1, anggaran pendidikan sebesar 81.977,3 milyar yang berasal dari rupiah murni sebesar 79.481,4 milyar dan pinjaman luar negeri sebesar 2.495,9 milyar. Berdasarkan Grafik 5.1 tentang anggaran dari rupiah murni maka anggaran terbesar adalah untuk program pendidikan

tinggi sebesar 39.281,7 milyar (49,42%), kedua besar adalah program pendidikan dasar sebesar 16.331,5 milyar (20,55%), sedangkan yang terkecil adalah untuk program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra sebesar 379.531,8 juta (0,48%). Sesuai dengan anggaran rupiah murni dan berdasarkan Tabel 5.1 maka anggaran pinjaman luar negeri terbesar juga pada program pendidikan tinggi sebesar 1.874,2 milyar (75,09%) sedangkan yang terkecil adalah program pengembangan dan pembinaan dan sastra, serta pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud yaitu sebesar 0 rupiah (0%). Bila dilihat secara keseluruhan anggaran rupiah murni dan pinjaman luar negeri maka program pendidikan tinggi menduduki posisi tertinggi sebesar 39.281,7 milyar (49,42%) dan terendah adalah program pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra sebesar 379,5 juta (0,48%).

Grafik 5.1  
 Persentase Anggaran Pendidikan Berupa Rupiah Murni Tiap Program Tahun 2013



Grafik 5.2  
 Persentase Anggaran Pendidikan Berupa Pinjaman Luar Negeri  
 Tiap Program, Tahun 2013



Dari Tabel 5.2 dan Grafik 5.3 terlihat bahwa Kemdikbud memperoleh alokasi anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana 96,96% atau 79,5 triliun berupa rupiah murni dan 3,04% atau 2,50 triliun berupa pinjaman luar negeri. Bila gabungan APBN dan anggaran pendidikan adalah 100% maka APBN adalah 99,01% dan anggaran Kemdikbud adalah 0,99%. Hal ini berarti anggaran Kemdikbud sangat kecil karena kurang dari 10%.

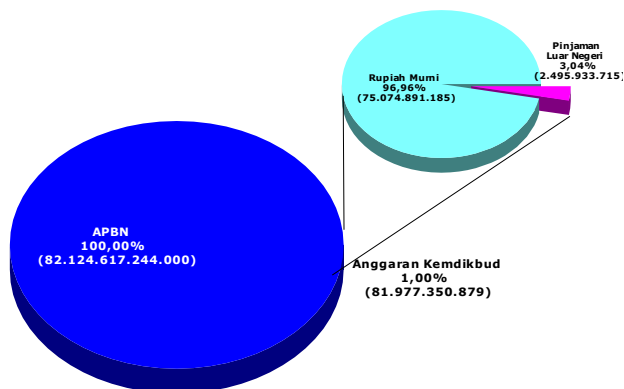
Tabel 5.2  
 Anggaran Pendidikan Menurut Asal dan Jenis Anggaran  
 Tahun 2013

Jenis Anggaran	Rupiah Murni		Pinjaman Luar Negeri		Jumlah
	Rupiah Murni	%	Pinjaman Luar Negeri	%	
APBN	-	-	-	-	82.124.617.244.000
Anggaran Kemdikbud	79.481.417.164	96,96	2.495.933.715	3,04	81.977.350.879
%	-	-	-	-	0,10

Sumber: Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, Kemdikbud

Tabel 5.3 dan Grafik 5.4 menunjukkan anggaran Kemdikbud tiap unit utama di Kemdikbud sebanyak 10 unit utama. Anggaran tiap unit utama juga dibedakan menjadi dua, yaitu rupiah murni dan pinjaman luar negeri. Anggaran yang berupa rupiah murni sebesar 79.481,4 milyar, dengan anggaran terbesar terdapat di Ditjen Dikti sebesar 39.281,7 milyar (49,42%) sedangkan terkecil di Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar 379,5 miliar (0,48%).

Grafik 5.3  
 Persentase Anggaran Pendidikan Kemdikbud Menurut Asal  
 Tahun 2013



Anggaran berupa pinjaman luar negeri sebesar 2.495.933.715 miliar hanya terdapat di tujuh unit utama, yaitu Sekjen, Ditjen Dikdas, Ditjen Dikti, Ditjen PAUDNI, Balitbang, Ditjen Dikmen, dan Badan PSDMP dan PMP. Dari ketujuh unit utama tersebut yang mendapatkan pinjaman luar negeri terbesar adalah Ditjen Dikti sebesar 1.874,2 miliar (75,09%) dan terkecil Setjen sebesar 2,7 miliar (1,11%).

Bila dilihat dari kedua jenis anggaran tersebut baik dari rupiah murni maupun pinjaman luar negeri maka anggaran terbesar pada Ditjen Dikti sebesar 41.155,9 miliar (50,20%) dan anggaran terkecil pada Inspektorat Jenderal sebesar 205 miliar (0,25%).

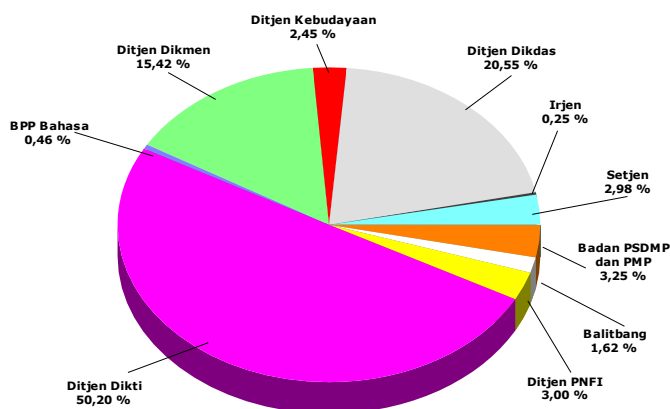
**Tabel 5.3**  
**Anggaran Pendidikan Menurut Asal Tiap Unit Utama**  
**Tahun 2013**

(Ribuan Rp)

No.	Unit Utama	Rupiah Murni		Pinjaman Luar Negeri		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sekretariat Jenderal	2.437.151.387	99,89	2.787.200	0,11	2.439.938.587
	%	3,07		0,11		2,98
2	Inspektorat Jenderal	205.000.000	100,00	0	0,00	205.000.000
	%	0,26		0,00		0,25
3	Ditjen Dikdas	16.331.564.492	97,15	478.837.025	2,85	16.810.401.517
	%	20,55		19,18		20,51
4	Ditjen Dikti	39.281.759.150	95,45	1.874.206.790	4,55	41.155.965.940
	%	49,42		75,09		50,20
5	Ditjen PNFI	2.388.322.530	98,85	27.712.000	1,15	2.416.034.530
	%	3,00		1,11		2,95
6	Balitbang	1.287.968.505	99,42	7.493.500	0,58	1.295.462.005
	%	1,62		0,30		1,58
7	Ditjen Dikmen	12.579.289.900	99,48	65.549.600	0,52	12.644.839.500
	%	15,83		2,63		15,42
8	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	379.531.800	100,00	0	0,00	379.531.800
	%	0,48		0,00		0,46
9	Badan PSDMP dan PMP	2.579.209.400	98,50	39.347.600	1,50	2.618.557.000
	%	3,25		1,58		3,19
10	Ditjen Kebudayaan	2.011.620.000,00	100,00	0	0,00	2.011.620.000
	%	2,53		0,00		2,45
Jumlah		79.481.417.164	96,96	2.495.933.715	3,04	81.977.350.879
		100,00		100,00		100,00

Sumber: Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, Kemdikbud

**Grafik 5.4**  
**Anggaran Pendidikan Menurut Asal Tiap Unit Utama**  
**Tahun 2013**



Biaya pendidikan pada tiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan yang signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan, hal ini disebabkan oleh perbedaan biaya hidup yang cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Biaya hidup memiliki kaitan langsung dengan biaya pendidikan yang ditanggung orang tua karena pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Biaya hidup yang berbeda berpengaruh langsung dengan biaya pengadaan sumber pendidikan yang digunakan. Sebagian masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya karena biaya pendidikan cenderung lebih besar untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik perkotaan maupun pedesaan. Kebutuhan pembiayaan lebih besar untuk jenjang pendidikan lebih tinggi dapat dimaklumi karena makin tinggi jenjang pendidikan maka kebutuhan sumber daya pendidikan cenderung makin tinggi pula.

Tabel 5.4  
Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan yang Dikeluarkan Orang Tua

(Ribuan Rp)

No.	Jenjang Pendidikan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan	% Kota thd Desa
1	SD/MI	1.161.420	714.330	929.130	1,63
		1,62	1,67	1,65	
2	SMP/MTs	1.877.050	1.192.180	1.533.610	1,57
		1,50	1,72	1,61	
3	SM/MA	2.816.020	2.053.960	2.475.410	1,37
		2,07	2,38	2,24	
4	PT	5.818.670	4.890.260	5.555.230	1,19

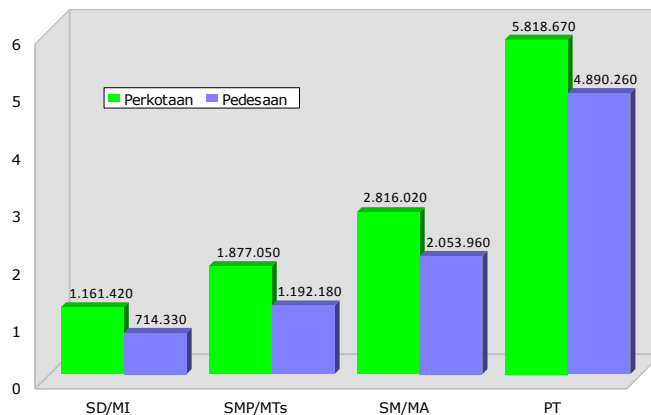
Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa rata-rata satuan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua selama bulan Januari sampai Juni 2012 yang bersekolah terjadi perbedaan antara pedesaan dan perkotaan. Biaya pendidikan SD di perkotaan 1,63 kali lebih besar daripada di pedesaan, SMP di perkotaan 1,57 kali lebih besar daripada di pedesaan, SM di perkotaan 1,37 kali lebih besar daripada di pedesaan sedangkan PT di perkotaan 1,19 kali lebih besar daripada di pedesaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makin tinggi jenjang pendidikan ternyata makin kecil perbedaan biaya antara perkotaan dan pedesaan. Sebaliknya, makin rendah jenjang pendidikan maka terjadi perbedaan yang makin besar antara perkotaan dengan pedesaan.

Tabel 5.4 dan Grafik 5.5 menunjukkan rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua di perkotaan dan pedesaan. Pada SD adalah Rp 929,1 ribu, meningkat menjadi Rp 1.533,6 ribu atau naik 1,65 kali untuk

jenjang SMP, meningkat menjadi Rp 2.475,4 ribu atau naik 1,61 kali untuk jenjang SM, dan meningkat menjadi Rp 5.555,2 ribu atau naik 2,24 kali untuk PT. Untuk daerah perkotaan, rata-rata biaya pendidikan SD yang menjadi beban orang tua sebesar Rp 1.161,4 ribu; SMP sebesar Rp 1.877,0 ribu atau naik 1,62 kali dari SD; SM sebesar Rp 2.816,0 ribu atau naik 1,50 kali dari SMP; dan PT sebesar Rp 5.818,7 ribu atau naik 2,07 kali. Untuk daerah pedesaan, rata-rata biaya pendidikan SD yang menjadi beban orang tua sebesar Rp 714,3 ribu; SMP sebesar Rp 1.192,2 ribu atau naik 1,67 kali; SM sebesar Rp 2.054 ribu atau naik 1,72 kali; dan PT sebesar Rp 4.890,3 ribu atau naik 2,38 kali.

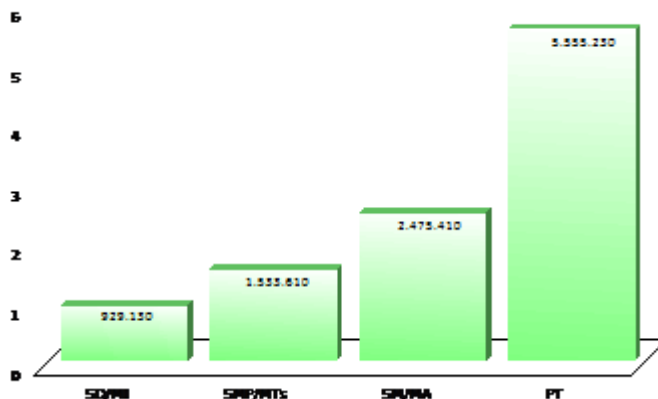
Grafik 5.5  
Rata-rata Biaya Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah  
(dalam ribuan Rupiah)



Pada Grafik 5.6 terlihat bahwa satuan biaya tertinggi pada PT sebesar Rp 5.555,2 ribu, kemudian SM sebesar Rp 2.475,4 ribu, SMP sebesar Rp 1.553,6 ribu, dan SD sebesar Rp 929,1 ribu. Makin tinggi biaya pendidikan di jenjang yang lebih tinggi ini disebabkan karena besarnya kebutuhan sumber daya pendidikan yang diperlukan, sementara bantuan biaya dari pemerintah pada jenjang pendidikan lebih tinggi makin kecil.



Grafik 5.6  
Perbandingan Rata-Rata Satuan Biaya Pendidikan  
Yang Dikeluarkan Orang Tua, Januari–Juni 2012  
(dalam ribuan Rupiah)



Tabel 5.5  
Perbandingan Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan  
Januari-Juni 2009 dan Januari-Juni 2012

Daerah	Tahun	SD	SMP	SM	PT
Perkotaan	2009	787.329	1.429.797	2.396.621	4.221.081
	2012	1.161.420	1.877.050	2.816.020	5.818.670
	Kenaikan	1,48	1,31	1,17	1,38
Pedesaan	2009	546.217	941.823	1.781.549	3.798.577
	2012	714.330	1.192.180	2.053.960	4.890.260
	Kenaikan	1,31	1,27	1,15	1,29
Rata2	2009	654.417	1.171.602	2.141.294	4.126.079
	2012	929.130	1.533.610	2.475.410	5.555.230
	Kenaikan	1,42	1,31	1,16	1,35

Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Berdasarkan data pada Tabel 5.5. dapat diketahui bahwa rata-rata biaya satuan pendidikan selama 3 tahun telah terjadi kenaikan baik untuk SD, SMP, SM maupun PT, masing-masing 1,42 kali, 1,31 kali, 1,16 kali, dan 1,35 kali, dimana kenaikan di pedesaan lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan di perkotaan untuk semua jenjang pendidikan. Pada SD pedesaan meningkat 1,31 kali dan perkotaan meningkat 1,48 kali. Pada SMP pedesaan meningkat 1,27 kali dan perkotaan meningkat 1,31 kali. Pada SM pedesaan meningkat 1,15 kali dan perkotaan meningkat 1,17 kali. Hal yang sama untuk PT pedesaan meningkat 1,29 kali dan perkotaan meningkat 1,38 kali. Dengan demikian, peningkatan rata-rata satuan biaya ternyata tidak hanya

pada jenjang yang paling tinggi melainkan pada semua jenjang dan semuanya lebih besar dari 1,15 kali dan terbesar justru pada SD dan terkecil pada SM.

Tabel 5.6  
Rata-rata Biaya Satuan Pendidikan Tiap Provinsi  
(Januari - Juni 2012)

(Ribun Rp)

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	PT
1	DKI Jakarta	1.476,47	2.396,99	3.854,92	7.611,90
2	Jawa Barat	996,50	1.753,87	2.817,02	6.096,22
3	Banten	1.151,98	1.712,04	2.885,03	6.319,44
4	Jawa Tengah	742,37	1.357,39	2.524,86	5.663,88
5	DI Yogyakarta	1.153,25	1.839,39	2.680,60	6.320,17
6	Jawa Timur	996,92	1.622,31	2.405,19	5.234,85
7	Aceh	848,77	1.264,85	1.580,27	3.993,72
8	Sumatera Utara	820,05	1.254,60	2.099,97	5.041,21
9	Sumatera Barat	813,73	1.409,32	2.209,10	4.697,60
10	Riau	998,65	1.699,78	2.274,13	6.158,91
11	Kepulauan Riau	1.595,41	1.993,14	3.367,82	9.808,12
12	Jambi	860,28	1.387,01	2.131,13	5.470,31
13	Sumatera Selatan	832,57	1.262,90	2.096,91	5.631,29
14	Bangka Belitung	879,19	1.472,21	2.190,48	4.623,89
15	Bengkulu	624,81	1.244,74	2.383,69	5.176,09
16	Lampung	657,65	1.242,72	2.367,25	5.463,87
17	Kalimantan Barat	930,19	1.531,61	2.545,76	3.756,75
18	Kalimantan Tengah	819,01	1.357,95	1.863,63	4.189,62
19	Kalimantan Selatan	1.076,28	1.727,74	2.700,40	5.135,90
20	Kalimantan Timur	1.561,63	1.982,48	2.577,31	5.218,08
21	Sulawesi Utara	800,43	1.313,33	2.240,79	5.483,88
22	Gorontalo	573,68	975,47	1.957,21	4.358,30
23	Sulawesi Tengah	556,37	1.069,70	1.732,64	4.333,84
24	Sulawesi Selatan	627,42	1.166,04	1.961,45	5.364,94
25	Sulawesi Barat	489,69	885,08	1.707,92	4.840,59
26	Sulawesi Tenggara	809,35	1.064,24	1.578,72	3.814,49
27	Maluku	809,60	1.100,13	1.420,06	4.438,36
28	Maluku Utara	914,82	1.492,67	2.037,22	4.555,05
29	Bali	962,57	1.816,21	3.064,50	6.168,37
30	Nusa Tenggara Barat	519,49	947,20	1.752,96	4.393,11
31	Nusa Tenggara Timur	1.021,54	1.622,04	2.522,93	4.588,24
32	Papua	1.591,43	2.262,85	3.284,19	6.056,43
33	Papua Barat	1.115,68	1.472,10	2.329,64	4.032,85
	Indonesia	929,13	1.533,61	2.475,41	555,23

Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Tabel 5.6 menunjukkan rata-rata biaya satuan pendidikan yang dikeluarkan orang tua per jenjang pendidikan tiap provinsi. Satuan biaya SD terendah terjadi di provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 489,7 ribu dan tertinggi di

provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 1.595,4 ribu. Satuan biaya SMP terendah juga terdapat di provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 885,1 ribu dan tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2.397,0 ribu. Sedangkan untuk satuan biaya SM terendah terdapat di provinsi Maluku sebesar Rp 1.420,1 ribu dan yang tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.854,9 ribu. Satuan biaya PT terendah terjadi di provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 3.756,8 ribu dan tertinggi terdapat di provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 9.808,1 ribu. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa di provinsi Kepulauan Riau biaya pendidikan untuk SD dan PT paling tinggi, sedangkan untuk biaya pendidikan SMP dan SM paling tinggi terletak di provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, biaya pendidikan terendah untuk SD dan SMP terletak di provinsi Sulawesi Barat, SM di provinsi Maluku, dan PT di provinsi Kalimantan Barat.

Bila dibandingkan dengan rata-rata nasional maka hanya 12 provinsi memiliki biaya satuan SD lebih besar dari nasional, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Untuk biaya satuan SMP yang lebih besar dari nasional terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk biaya satuan SM yang lebih besar dari nasional terdapat di 12 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sedangkan untuk biaya satuan PT yang lebih besar dari nasional terdapat di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bali, dan Papua.

Pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua diperuntukkan pada 14 jenis pengeluaran seperti yang terdapat pada Tabel 5.7. Pengeluaran terbesar SD pada uang saku sebesar 56,37% dan terkecil pada OSIS sebesar 0,08%. Pengeluaran terbesar SMP juga pada uang saku sebesar 47,27% dan terkecil juga pada OSIS sebesar 0,30%. Pengeluaran terbesar SM juga pada uang saku sebesar 40,56% dan terkecil juga pada OSIS sebesar 0,46%. Pengeluaran terbesar PT juga pada uang saku sebesar 30,69% dan terkecil juga pada kursus yang diselenggarakan sekolah sebesar 0,21%.

**Tabel 5.7**  
**Persentase Pengeluaran Pendidikan Oleh Orang Tua menurut Jenis**  
**(Januari - Juni 2012)**

No.	Jenis Pengeluaran	SD	SMP	SM	PT
1	Biaya Pendaftaran	3,76	6,91	11,09	9,52
2	SPP	6,53	7,48	14,91	22,18
3	Komite Sekolah	0,68	0,99	1,31	...
4	Praktikum/Keterampilan	0,23	0,35	1,10	1,02
5	OSIS	0,08	0,30	0,46	...
6	Evaluasi/Ujian	0,17	0,37	0,61	0,96
7	Bahan Penunjang Mata Pelajaran	0,63	0,66	0,68	1,20
8	Seragam Sekolah dan Olahraga	6,67	5,50	3,29	0,29
9	Buku Pelajaran/Panduan/Diktat	2,60	2,64	2,61	2,30
10	Lembar Kerja Siswa	2,69	3,16	2,08	...
11	Alat Tulis dan Perlengkapan Lainnya	5,50	4,11	2,39	1,24
12	Kursus yang Diselenggarakan Sekolah	0,55	0,74	0,74	0,21
13	Transportasi	12,65	18,34	17,20	19,66
14	Uang Saku	56,37	47,29	40,56	40,17
15	Lainnya	0,89	1,16	0,97	1,25
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Pengeluaran orang tua untuk pendidikan sebanyak 14 jenis dirangkum menjadi lima jenis, yaitu 1) uang sekolah, 2) sarana belajar, 3) pakaian, 4) transportasi, dan 5) lainnya yang dirinci menurut daerah dan jenjang pendidikan. Uang sekolah merupakan rekapitulasi dari enam jenis, yaitu pendaftaran, (SPP), komite sekolah, praktek, (OSIS), dan ujian. Sarana belajar terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan belajar, buku, dan alat tulis sedangkan lainnya terdiri dari tiga jenis, yaitu kursus, lainnya, dan uang saku

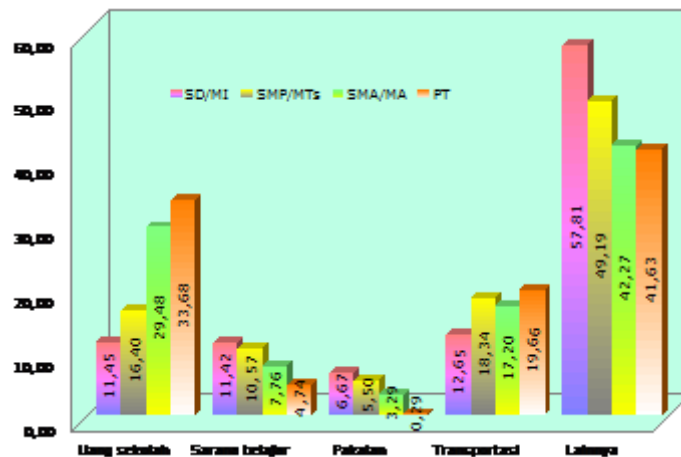
Berdasarkan Tabel 5.8 dan Grafik 5.7, pengeluaran terbesar SD, SMP, SM, dan PT justru berasal dari pengeluaran lainnya, yaitu masing-masing 57,81%, 49,17%, 42,27%, dan 41,63%. Di sisi lain pengeluaran terkecil SD, SMP, SM, dan PT berasal dari pakaian, yaitu masing-masing 6,67%, 5,50%, 3,29%, dan 0,29%. Untuk daerah perkotaan, pengeluaran terbesar pada setiap jenjang ada pada pengeluaran lainnya, di mana SD sebesar 52,54%, SMP sebesar 46,21%, dan SM sebesar 40,58%. Sedangkan pengeluaran terkecil untuk jenjang SD, SMP, dan SM ada pada pakaian, masing-masing sebesar 6,23%, 4,97%, dan 2,95%. Untuk daerah pedesaan, pengeluaran terbesar lainnya masing-masing untuk SD, SMP, dan SM masing-masing sebesar 62,64%, 53,13%, dan 44,29%. Sedangkan yang terkecil untuk masing-masing jenjang adalah pakaian, yaitu SD sebesar 7,08%, SMP sebesar 6,03%, dan SM sebesar 3,70%.

Tabel 5.8  
 Persentase Pengeluaran Pendidikan menurut 5 Jenis  
 (Januari--Juni 2012)

No.	Jenis Pengeluaran	SD	SMP	SM	PT
1	Perkotaan+Pedesaan				
	Uang sekolah	11,45	16,40	29,48	33,68
	Sarana belajar	11,42	10,57	7,76	4,74
	Pakaian	6,67	5,50	3,29	0,29
	Transportasi	12,65	18,34	17,20	19,66
5	Lainnya	57,81	49,19	42,27	41,63
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00
1	Perkotaan				
	Uang sekolah	13,20	19,37	32,45	
	Sarana belajar	12,55	10,95	8,10	
	Pakaian	6,23	4,97	2,95	
	Transportasi	15,48	18,50	15,92	
5	Lainnya	52,54	46,21	40,58	
Jumlah		100,00	100,00	100,00	
1	Pedesaan				
	Uang sekolah	9,87	13,48	25,93	
	Sarana belajar	10,37	10,17	7,33	
	Pakaian	7,08	6,03	3,70	
	Transportasi	10,04	18,19	18,75	
5	Lainnya	62,64	52,13	44,29	
Jumlah		100,00	100,00	100,00	

Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Grafik 5.7  
 Persentase Biaya Pendidikan menurut Jenis Pengeluaran



**Tabel 5.9**  
**Perbandingan Persentase Pengeluaran Pendidikan menurut 5 Jenis**  
**(Perkotaan+Pedesaan)**

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun	SD	SMP	SM	PT
1	Uang sekolah	2009	27,30	27,09	36,25	33,37
		2012	11,45	16,40	29,48	33,68
		% Naik	0,42	0,61	0,81	1,01
2	Sarana belajar	2009	10,14	8,25	6,54	6,74
		2012	11,42	10,57	7,76	4,74
		% Turun	1,13	1,28	1,19	0,70
3	Pakaian	2009	23,72	18,93	12,36	7,62
		2012	6,67	5,50	3,29	0,29
		% Naik	0,28	0,29	0,27	0,04
4	Transportasi	2009	8,25	14,88	16,90	19,14
		2012	12,65	18,34	17,20	19,66
		% Naik	1,53	1,23	1,02	1,03
5	Lainnya	2009	30,59	30,85	27,95	33,13
		2012	57,81	49,19	42,27	41,63
		% Naik	1,89	1,59	1,51	1,26
Jumlah			100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Pendidikan, Surver Sosial Ekonomi Nasional, 2013

Berdasarkan perkembangan pengeluaran pendidikan selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai 2012 yang terdapat pada Tabel 5.9 maka seluruh pengeluaran pendidikan mengalami peningkatan. Untuk peningkatan terbesar pada semua jenjang ada pada lainnya, di mana SD dari 30,59% menjadi 57,81% atau meningkat 1,89 kali, SMP dari 30,85% menjadi 49,17% atau meningkat 1,59 kali, SM dari 27,95% menjadi 42,27% atau meningkat 1,51 kali. Sedangkan untuk PT peningkatan terjadi dari 33,13% menjadi 41,63 atau meningkat 1,26 kali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2014). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia 2013., Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). Statistik Pendidikan 2012, Survei Sosial Ekonomi Nasional., Jakarta: BPS.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Pembangunan Pendidikan Nasional 2005--2008, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2008., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Membaca Jadikan Kualitas Hidup Lebih Baik., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Peningkatan Budaya Baca., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Profil Direktorat Pendidikan Masyarakat 2006., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Membaca Jadikan Kualitas Hidup Lebih Baik., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Peningkatan Budaya Baca., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. (2006). Profil Direktorat Pendidikan Masyarakat 2006., Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tahun 2005, Menggunakan Lensa Gender Bidang Pendidikan., Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Ditjen Diklusepa. (2001). Jumlah BPKB, SKB, dan PKBM berdasarkan Proyek PPLS., Jakarta: Depdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah, Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah., Jakarta: Kemdikbud.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasa/Madrasah Ibtidaiyah., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Madrasah Tsanawiyah., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Menengah, Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2006). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah., Jakarta: Kemdikbud.
- OECD-UNESCO, (2011). Analysis of the World Education Indicators (An Executive Summary). UNESCO: Paris
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. (2014). Ringkasan Statistik Pendidikan Indonesia 2013/2014, *Indonesia Educational Statistics*, Jakarta: Kemdikbud.



Pusat Data dan Statistik Pendidikan. (2013). Rangkuman Statistik Persekolahan 2012/2013., Jakarta: Setjen Kemdikbud.

Republik Indonesia, 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan., Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional., Jakarta: Sekretariat Negara.